



KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A BANDA ACEH

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025-2029



aceh.basarnas.go.id/



kansaraceh@gmail.com



Humas Basarnas Aceh



@Basarnas aceh



@basarnas_aceh

JL. Sultan Malikul Saleh No. 108, Gp. Lhong Raya Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh 23238 Telp / Fax: (0651 - 33876)



**RENCANA STRATEGIS
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BANDA ACEH
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029 telah disusun dengan baik. Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh serta sebagai alat untuk mengukur kinerja dan akuntabilitas organisasi untuk masa 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 lalu, yang di susun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Dalam Renstra ini menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang akan menjadi landasan bagi seluruh kegiatan operasional dan manajerial Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh selama 5 (lima) tahun ke depan yang berpedoman pada Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029, yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan pengembangan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan, serta optimalisasi sinergi dan kolaborasi dengan seluruh potensi Pencarian dan Pertolongan.

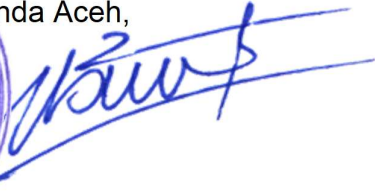
Terwujudnya Renstra ini tidak lepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, baik itu dari instansi pemerintah dan unsur terkait, potensi Pencarian dan Pertolongan, hingga masyarakat luas. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi acuan yang jelas dan terarah bagi seluruh jajaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam menjalankan tugas mulia ini. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang dalam rangka mewujudkan pelayanan Pencarian dan Pertolongan yang cepat, tepat, aman, dan terpadu.



Banda Aceh, 07 Agustus 2025

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Banda Aceh,


Ibnu Harris Al Hussain, S.Si., M.Si.
Pembina (IV/a)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR DIAGRAM	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	1
1.1.2 Kondisi Wilayah dan Lingkup Kerja	2
1.1.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024	13
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	25
1.2.1 Potensi yang Dimiliki	25
1.2.2 Permasalahan Utama	34
1.3 PELUANG DAN TANTANGAN	53
1.3.1 Peluang	53
1.3.2 Tantangan	60
 BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	 62
2.1 VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH	62
2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	63
2.1.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	64
2.2 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH	66
2.2.1 Tujuan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	66
2.2.2 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	66
 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	 73
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH	73
3.1.1 Program dan Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	75
3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	77

3.1.3	Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.....	99
3.2	KERANGKA REGULASI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH.....	102
3.3	KERANGKA KELEMBAGAAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH.....	103
3.3.1	Pengembangan Struktur Organisasi.....	103
3.3.2	Kegiatan Strategis Pengembangan Struktur Organisasi	104
3.3.3	Penguatan Sumber Daya Manusia	117
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	124
4.1	TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029.....	124
4.1.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.....	125
4.1.2	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.....	127
4.2	KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025-2029	160
BAB V	PENUTUP	165

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota	5
Tabel 1.2	Potensi Danau Aceh	7
Tabel 1.3	Data Iklim Rata-Rata Provinsi Aceh Tahun 2013-2022	7
Tabel 1.4	Proyeksi Jumlah Penduduk Aceh Tahun 2025-2045.....	9
Tabel 1.5	Tabel Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024	15
Tabel 1.6	Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024	17
Tabel 1.7	Rencana, Alokasi, dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020 (dalam jutaan rupiah).....	21
Tabel 1.8	Rencana, Alokasi, dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2021-2024 (dalam jutaan rupiah).....	24
Tabel 1.9	Komposisi Pranata Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.....	26
Tabel 1.10	Sebaran Diklat yang Telah Diikuti <i>Rescuer</i> Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	27
Tabel 1.11	Sebaran dan Kondisi Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	29
Tabel 1.12	Sebaran dan Kondisi Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	31
Tabel 1.13	Sebaran dan Kondisi Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	33
Tabel 1.14	Sebaran dan Kondisi Sarana Unit K-9 SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	34
Tabel 1.15	Rekapitulasi Kebutuhan, Bezzeting, dan Kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	35
Tabel 1.16	Kebutuhan Sarana Prasarana dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	37
Tabel 1.17	Kegiatan Prioritas yang Terdampak Akibat Kebijakan <i>Refocusing</i> dan <i>Automatic Adjustment</i> Pada Tahun 2020-2024	49
Tabel 1.18	Kegiatan Prioritas yang Terdampak Akibat Kebijakan Efisiensi Anggaran Pada Tahun 2025	51
Tabel 1.19	Objek Wisata Unggulan Provinsi Aceh.....	54
Tabel 1.20	Potensi Bencana Aceh.....	56
Tabel 3.1	Arah Kebijakan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029	73
Tabel 3.2	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	75
Tabel 3.3	Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	76

Tabel 3.4	Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029	79
Tabel 3.5	Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029	97
Tabel 3.6	Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029	99
Tabel 3.7	Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR Tahun 2025-2029.....	106
Tabel 3.8	Rekapitulasi Kecelakaan Berdasarkan Klasifikasi Kecelakaan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen Oktober 2016-Agustus 2025	108
Tabel 3.9	Rekapitulasi Kecelakaan Berdasarkan Kondisi Korban Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen Oktober 2016-Agustus 2025	108
Tabel 3.10	Rekapitulasi Kecelakaan Berdasarkan Klasifikasi Kecelakaan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon April 2020-Agustus 2025	114
Tabel 3.11	Rekapitulasi Kecelakaan Berdasarkan Kondisi Korban Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon April 2020-Agustus 2025	114
Tabel 3.12	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029	118
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029	126
Tabel 4.2	Matriks Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029	128
Tabel 4.3	Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029	158
Tabel 4.4	Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah).....	162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Provinsi Aceh	4
Gambar 1.2	Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh.....	6
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.....	11
Gambar 1.4	Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	12
Gambar 1.5	Peta Indeks Rawan Bencana Aceh.....	56
Gambar 2.1	Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029	67
Gambar 3.1	Peta Jarak Antara Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten/Kota, Pelabuhan, dan Bandara Udara.....	109
Gambar 3.2	Peta Rawan Bencana Tanah Longsor di Takengon dan Sekitarnya.....	116

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Aceh Tahun 2006-2023	8
Diagram 1.2	Perbandingan Kompetensi Diklat Teknis SAR	52
Diagram 1.3	Perbandingan Kompetensi Diklat Teknis Manajerial	52
Diagram 1.4	Perbandingan Kompetensi Diklat Teknis Logistik.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-------------|---|
| Lampiran I | Matriks Kinerja dan Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029 |
| Lampiran II | Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana, berisi program-program pembangunan di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis jangka menengah untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas layanan Pencarian dan Pertolongan, serta mendukung kebijakan nasional dalam membangun sistem penanggulangan bencana dan kedaruratan yang tangguh dan adaptif di Provinsi Aceh.

Kondisi umum Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh baik dari aspek tugas dan fungsi, kondisi wilayah dan lingkup kerja, serta capaian kinerja dan realiasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024 akan dijelaskan sebagai berikut :

1.1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
2. Pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
3. Pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
4. Pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
5. Koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;
6. Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
7. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;
8. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan;
9. Pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
10. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

1.1.2 Kondisi Wilayah dan Lingkup Kerja

A. Geografi

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi tertua di Indonesia dan memiliki kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-1667 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah Provinsi Aceh mencapai sekitar 5.677.081 hektar atau 56.770,81 km², yang mencakup wilayah daratan serta wilayah perairan laut teritorial dan kepulauan. Cakupan wilayah perencanaan tata ruang sebagaimana tertuang dalam RTRW Provinsi Aceh meliputi seluruh 23 Kabupaten/Kota, yang tersebar dari wilayah pantai barat hingga pantai timur Aceh.

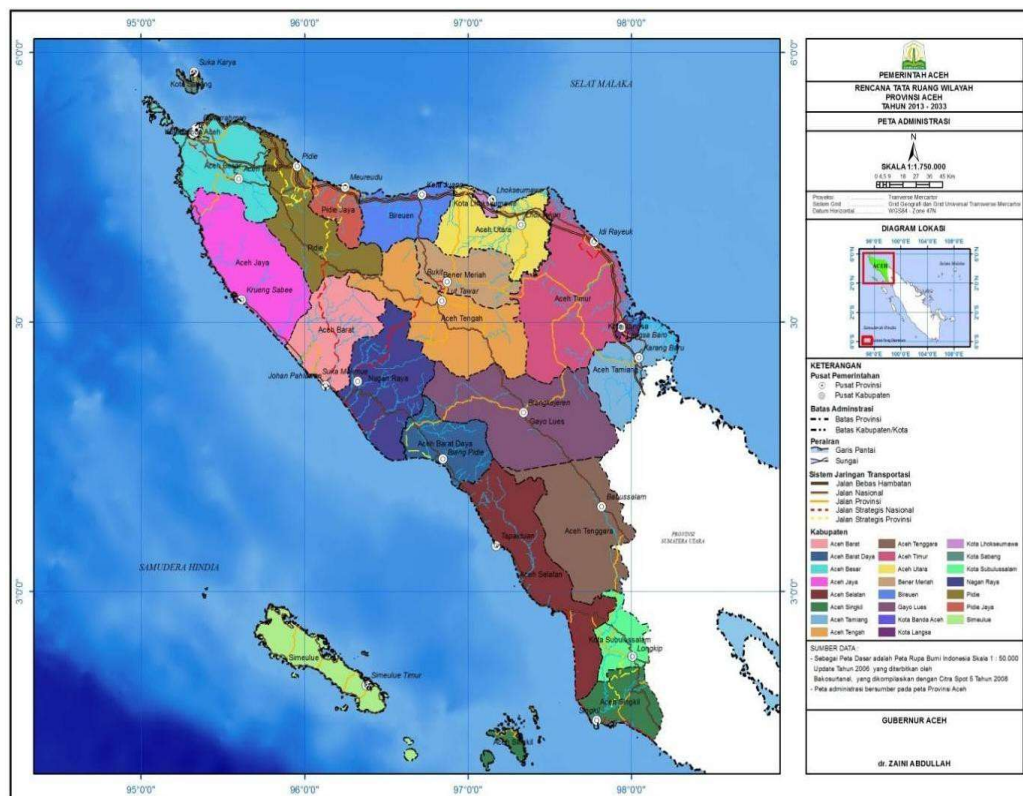
Secara geografis, Provinsi Aceh terletak pada antara 2°– 6° Lintang Utara dan 95°– 99° Bujur Timur, dan merupakan wilayah paling barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Letaknya sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah Barat dan Selatan, serta Selat Malaka di sebelah Timur dan Utara, yang merupakan salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Aceh juga berbatasan darat dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah Tenggara. Selain itu, Aceh memiliki pulau-pulau strategis seperti Pulau Weh (Sabang), Pulau Simeulue, dan Pulau Banyak, yang memiliki peran penting dalam geopolitik dan keselamatan pelayaran. Berdasarkan letak geografis, batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Malaka
Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Dari keseluruhan wilayah administrasi tersebut, Aceh terdiri atas lebih dari 290 kecamatan, ribuan desa/gampong, serta beberapa kelurahan yang mayoritas tersebar di kawasan perkotaan. Kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Pidie, sedangkan wilayah dengan cakupan geografis paling luas adalah Kabupaten Aceh Timur, yang mencakup sebagian besar wilayah pesisir timur. Di sisi lain, wilayah administrasi terkecil berdasarkan luas adalah Kota Sabang, yang terletak di Pulau Weh dan Pulau Banyak, yang memiliki peran penting dalam geopolitik dan keselamatan pelayaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait batas administrasi antar Kabupaten dalam Provinsi Aceh dan dengan provinsi yang berbatasan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 5.683.370,397 ha yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Aceh Tahun 2020-2040 adalah sebesar 4.400.156,053 ha (12 mil laut dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke

arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan). Secara administratif, Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten, 5 Kota, 290 Kecamatan, 6.515 Gampong sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.



Sumber : Qanun RTRW Aceh Tahun 2013-2033

Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Aceh

Dengan kondisi geografis tersebut, Aceh memiliki potensi besar namun sekaligus tantangan dalam hal keselamatan dan perlindungan masyarakat. Kawasan pesisirnya rawan terhadap bencana tsunami dan gelombang tinggi, sementara daerah pegunungan di bagian tengah rawan longsor dan gempa. Letak strategis dan kerentanan wilayah ini menjadikan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh memiliki peran sangat penting dalam membangun sistem Pencarian dan Pertolongan yang responsif, menjangkau seluruh wilayah, dan mampu mendukung ketahanan nasional di wilayah paling barat Indonesia.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Ibu Kota Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Wilayah	Jumlah Pulau
Simeulue	Sinabang	1.821,75	3,21	
Aceh Singkil	Singkil	1.852,82	3,26	
Aceh Selatan	Tapaktuan	4.175,37	7,35	
Aceh Tenggara	Kutacane	4.179,12	7,35	
Aceh Timur	Idi Rayeuk	5.432,63	9,56	
Aceh Tengah	Takengon	4.521,70	7,96	
Aceh Barat	Meulaboh	2.818,17	4,96	
Aceh Besar	Kota Jantho	2.882,83	5,07	
Pidie	Sigli	3.133,93	5,51	
Bireuen	Bireuen	1.793,27	3,15	
Aceh Utara	Lhoksukon	2.711,15	4,77	
Aceh Barat Daya	Blang Pidie	1.882,28	3,31	
Gayo Lues	Blang Kejeren	5.541,28	9,75	
Aceh Tamiang	Karang Baru	2.184,40	3,84	
Nagan Raya	Suka Makmue	3.416,32	6,01	
Aceh Jaya	Calang	3.893,05	6,85	
Bener Meriah	Simpang Tiga Redelong	1.930,75	3,40	
Pidie Jaya	Meureudu	953,12	1,68	
Kota Banda Aceh	-	55,85	0,10	
Kota Sabang	-	122,04	0,21	
Kota Langsa	-	217,17	0,38	
Kota Lhokseumawe	-	136,49	0,24	
Kota Subulussalam	-	1.183,60	2,08	
Aceh	Banda Aceh	56.839,09	100,00	363

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Secara topografi Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian Utara dan Timur Aceh.

Wilayah Sungai di Provinsi MRO :

- 01.05.A5 WS-ACEH-MEUREUDU
- 01.02.B WS-TEUNOM-LAMBEUSO
- 01.03.D WS-PASE-PELANGAN
- 01.04.A3 WS-WOLLA-BATEUE
- 01.05.A3 WS-JAMBO-AYE
- 01.05.B WS-TAMIANG-LANGSA
- 01.07.B WS-BARUS-KLUET
- 01.05.C WS-SIMEULUE
- 01.05.A2 WS-SIMEULUE-GENDREL

Keterangan :

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas kelompok pulau-pulau dalam WS
- Batas Wilayah Sungai
- Batas DAS
- Garis Pantai
- Venak/Danau

Gambar 1.2 Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh

6

Tabel 1.2 Potensi Danau Aceh

No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1	Danau Aneuk Laot	Sabang	45,49	3.000.000
2	Danau Laut Tawar	Aceh Tengah	5.654,00	175.000.000
3	Danau Laut Penang Suasa	Aceh Jaya	47,73	7.064.040
4	Danau Laut Bangko	Aceh Selatan	70,76	2.400.00
5	Danau Peastep	Aceh Singkil	10,86	2.000.000
6	Danau Paris	Aceh Singkil	57,75	877.650
7	Danau Bungara	Aceh Singkil	77,78	1.446.375
8	Danau Pinang	Aceh Singkil	34,49	516.750
9	Danau Lincier	Aceh Singkil	64,53	9.034.200
10	Danau Opupu	Simeulue	138,10	19.334.000
Total			6.201,4	220.673.015

Sumber : Dinas Pengairan Aceh

Secara klimatologi kondisi iklim Aceh dipengaruhi oleh arah angin yang senantiasa bertukar setiap tahunnya, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan data dari 5 stasiun meteorologi dan klimatologi yaitu Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Stasiun Meteorologi Maimun Saleh Sabang, Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien Nagan Raya, Stasiun Meteorologi Malikussaleh Aceh Utara, dan Stasiun Klimatologi Aceh Besar selama 20 tahun dari mulai tahun 2003-2022, diperoleh gambaran iklim di Aceh sebagai berikut :

Tabel 1.3 Data Iklim Rata-Rata Provinsi Aceh Tahun 2013-2022

No	Parameter	Iklim Rata-Rata Tahun 2013-2022					Rata-Rata
		Stasiun Sabang	Stasiun Banda Aceh	Stasiun Nagan Raya	Stasiun Aceh Utara	Stasiun Aceh Besar	
1	Suhu Udara	27,05	27,02	25,63	26,59	26,74	26,6
2	Suhu Udara Maksimum (°C)	30,85	32,41	31,2	31,27	32,79	31,7
3	Suhu Udara Minimum (°C)	22,31	23,29	22,45	23,14	22,59	22,76
4	Kelembaban Udara (%)	84,14	77,64	84,34	83,24	83,9	82,65
5	Lama Penyinaran Matahari (%)	57,9	51,35	54,77	60,14	51,5	55,13
6	Kec. Angin Rata-Rata (Knot)	8,87	4,99	4,11	4,09	2,42	4,89
7	Curah Hujan (mm)	2062,15	1989,3	3853,3	1439,42	1772,6	2223,35

Sumber : Data Analisis BMKG Aceh Tahun 2023

B. Demografi

Kurun periode tahun 2006-2023, jumlah penduduk Aceh mengalami tren penurunan. Berdasarkan data awal tahun 2006, total jumlah penduduk berjumlah 4.153.573 jiwa. Total penduduk tahun 2021 adalah sebesar 5.333.733 jiwa, sedangkan pada tahun 2022 jumlah penduduk menjadi 5.407.855 jiwa. Berdasarkan proporsi persebaran penduduk per wilayah, pada tahun 2022, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebesar 609.705 jiwa (11,33%), disusul Kabupaten Bireuen sebesar 445.503 jiwa (8,28%) dan Kabupaten Pidie sebesar 436.796 jiwa (8,12%). Sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terendah adalah Kota Sabang, yaitu sebesar 42.867 jiwa (0,80%) dan Kabupaten Simeulue 94.560 jiwa (1,76%).

Angka pertumbuhan penduduk Aceh tersebut masih di bawah rata-rata nasional, dimana pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2021 berada pada angka 1,22 persen dan pada tahun 2022 melambat menjadi 1,17 persen. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk tersebut diantaranya angka kematian dan angka kelahiran penduduk. Berdasarkan data termutakhir tahun 2023, jumlah penduduk Aceh mencapai 5.515.839 jiwa. Jumlah ini tumbuh sebesar 1,99 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2022.



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester 1, 2023

Diagram 1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Aceh Tahun 2006-2023

Jika dilihat dari tren pertumbuhan penduduk Aceh, pada tahun 2020 jumlah penduduk Aceh turun cukup tajam sebesar -1,78 persen. Penurunan ini sebagai dampak dari pandemi Covid 19. Pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan penduduk Aceh kembali tumbuh positif, dimana pada tahun 2021 tumbuh sebesar 1,11 persen dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 1,39 persen. Berdasarkan data per wilayah, Kabupaten/Kota dengan angka pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kota Subulussalam, yaitu sebesar 1,79 persen, disusul Kabupaten Aceh Utara 1,573 persen dan Kabupaten Aceh Besar yaitu sebesar 1,35 persen. Kabupaten/Kota dengan angka pertumbuhan terendah adalah Kota Langsa yaitu sebesar -1.29 persen.

Aceh memiliki luas wilayah sebesar 57.956 Km² dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 92,83 Jiwa/Km². Terdapat disparitas sebaran penduduk yang cukup tinggi antara wilayah Kabupaten/Kota di Aceh dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah. Daerah perkotaan yang memiliki luas wilayah lebih kecil memiliki rasio kepadatan tinggi, sedangkan pada beberapa Kabupaten dengan luas wilayah yang besar memiliki rasio kepadatan penduduk lebih rendah.

Kurun periode tahun 2020-2045 persentase pertumbuhan penduduk Aceh diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2025 hingga 2030 yang merupakan puncak bonus demografi di Indonesia dan Aceh. Jika dilihat perbandingan jangka lima tahunan, pertumbuhan penduduk pada tahun 2025 (dibandingkan dengan tahun 2020) diperkirakan mencapai 6,96 persen, dan sedikit berkontraksi menjadi 5,98 persen pada tahun 2030. Pada tahun 2045 pertumbuhan penduduk diperkirakan berhasil ditekan dengan pertumbuhan sekitar 3,6 persen.

Tabel 1.4 Proyeksi Jumlah Penduduk Aceh Tahun 2025-2045

Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
5.379,93	5.625,96	5.962,84	6.267,37	6.537,63	6.773,38

Sumber : DRKA Aceh Tahun 2023

Bonus demografi dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi jika Sumber Daya Manusia (SDM) dipersiapkan dengan baik dan terencana. Kebijakan yang berpihak terhadap pembangunan SDM akan sangat bermanfaat bagi pemanfaatan bonus demografi ke depan. Sebaliknya, tanpa persiapan yang matang, bonus demografi menjadi permasalahan bagi pembangunan.

C. Lingkup Kerja

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis fungsional dibina oleh Deputy Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan, Deputy Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan serta Deputy Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan.

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, bahwa struktur organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh terdiri dari :

1. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala. Mempunyai tugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan secara keseluruhan.

2. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

3. Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan

Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.

4. Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan

Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta masyarakat Pencarian dan Pertolongan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh hingga saat ini memiliki Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang terdiri dari jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan, Pranata SDM Aparatur, Arsiparis, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Pranata Hubungan Masyarakat, Perawat, dan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.



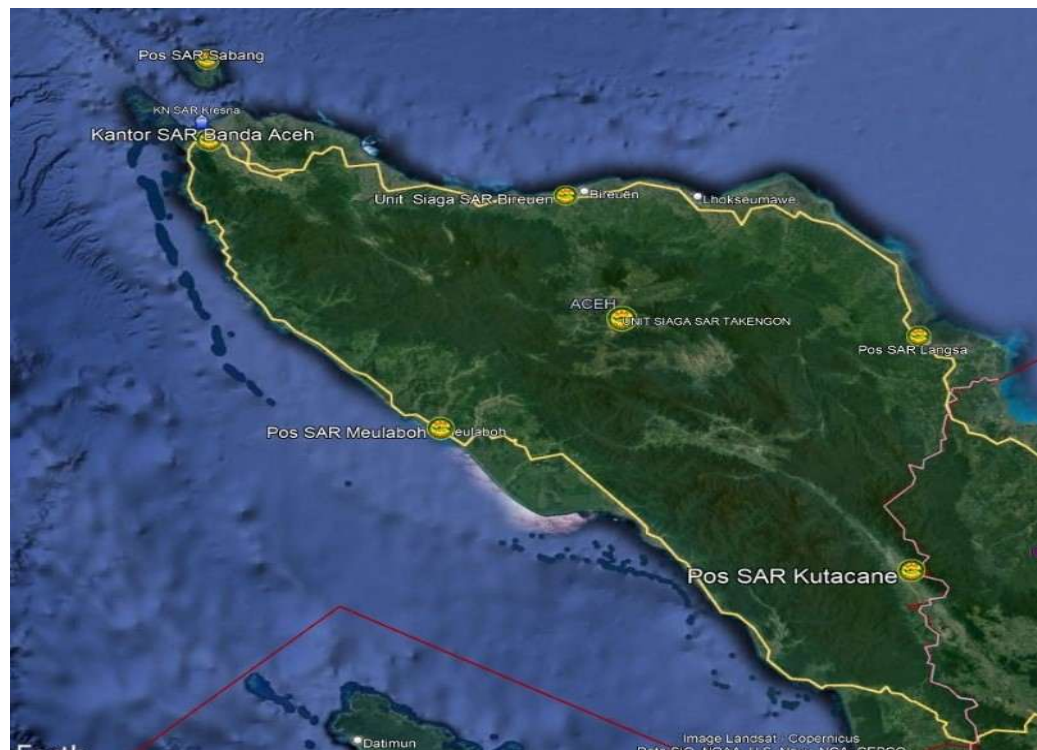
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh merupakan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A yang memiliki 4 (empat) Pos Pencarian dan Pertolongan dan 2 (dua) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan, yaitu :

- a. Pos Pencarian dan Pertolongan Meulaboh;
- b. Pos Pencarian dan Pertolongan Kutacane;
- c. Pos Pencarian dan Pertolongan Langsa;
- d. Pos Pencarian dan Pertolongan Sabang;
- e. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen; dan
- f. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon.

Batas Wilayah Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh meliputi :

- a. Utara berbatasan langsung dengan Samudera Hindia;
- b. Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara;
- c. Barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia; dan
- d. Timur berbatasan langsung dengan Selat Malaka.



Gambar 1.4 Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

Berikut ini adalah data singkat tentang Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh :

- a. Alamat : Jl. Sultan Malikul Saleh No. 108 Lhong Raya, Banda Aceh
- b. Kontak : 0651 – 21324 / 115 (*Telephone Central*)
0651 – 33876 (*Telephone dan Faximilie*)
- c. E-mail : sar.aceh@basarnas.go.id
- d. Website : <http://www.aceh.basarnas.go.id>
- e. Jumlah personil 137 orang dengan rincian :
 - 74 orang di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh
 - 8 orang di Pos Pencarian dan Pertolongan Meulaboh
 - 9 orang di Pos Pencarian dan Pertolongan Kutacane
 - 7 orang di Pos Pencarian dan Pertolongan Langsa
 - 7 orang di Pos Pencarian dan Pertolongan Sabang
 - 7 orang di Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen
 - 9 orang di Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon
 - 16 orang di KN. SAR Kresna 232
 - 1 orang Basarnas Special Group (BSG) di Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

1.1.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024

A. Capaian Kinerja

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029 harus memperhatikan capaian dan kendala pada periode Renstra sebelumnya (2020-2024). Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*base-line*) serta mengambil pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya.

Tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan

secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5 Tabel Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	25 Menit	24 Menit	23 Menit	22 Menit	21 Menit
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	n/a	n/a	85	85	85
	SK.2. Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	n/a	n/a	90	90	90
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	100%	100%	100%	100%
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	n/a	n/a	100	100	100
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100%	100%	90%	90%	90%

T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	100%	100%	40%	40%	40%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	90	90	90	90
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	n/a	n/a	90	90	90
		11. Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB

Berdasarkan LAKIP Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh, hasil capaian kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh pada Tahun 2020-2024 sesuai sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.6 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	25 Menit	15,81 Menit	136,7%	24 Menit	16,41 Menit	131,6%	23 Menit	15,89 Menit	130,91%	22 Menit	14,70 Menit	133,18%	21 Menit	16,18 Menit	122,95%
	2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100%	99,92%	99,92%	100%	91,03%	91,03%	100%	98,75%	98,75%	100%	98,47%	98,47%	100%	99,57%	99,57%
	3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85	88,43	104,03%	85	87,38	102,80%	85	88,74	104,40%
SK.2. Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90	69,07	76,74%	90	70,50	78,33%	90	67,95	75,50%

SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	60%	60%	100%	n/a	n/a	100%	50%	50%	100%	86%	86%	100%	76%	76%
SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	n/a	100	100%	n/a	n/a	n/a	100	87,38	87,38%	100	86,2	86,2%	100	77,8	77,80%
SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100%	70%	70%	100%	86,33%	86,33%	90%	80,91%	89,90%	90%	82,08%	91,20%	90%	89,15%	99,06%
SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	100%	26%	26%	100%	25,50%	25,50%	40%	35%	87,50%	40%	36%	90%	40%	37%	92,50%

SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	97,22	108%	90	98,18	109,09%	90	97,17	107,97%	90	95,14	105,71%	90	98,13	109,03%
	10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90	85,70	95,22%	90	87,68	97,42%	90	85,02	94,47%
	11. Nilai SAKIP	BB (70,01)	B (63,90)	91,27%	BB (70,01)	B (65,85)	94,06%	BB (70,01)	B (65,25)	93,20%	BB (70,01)	BB (71,65)	102,3%	BB (70,01)	BB (73,65)	105,1%

Sumber : LAKIP Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024

Berdasarkan **Tabel 1.6** di atas bahwa secara umum capaian kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh pada Tahun 2020-2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh, terdapat 3 (tiga) indikator yang sudah mencapai tingkat ketercapaian sebesar $\geq 100\%$ secara rata-rata, yang meliputi indikator :

1. Kecepatan tanggap (*response time*) pada operasi Pencarian dan Pertolongan (130,66%).
2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (103,74).
3. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (108,12%).

Sementara itu, terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki tingkat ketercapaian sebesar $\geq 95\%$ secara rata-rata, yang meliputi indikator :

1. Persentase korban terevakuasi pada operasi Pencarian dan Pertolongan (97,54%).
2. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya (95,70%).
3. Nilai SAKIP (97,18%).

Selain itu juga terdapat 5 (lima) indikator yang memiliki ketercapaian sebesar $\leq 95\%$ secara rata-rata, yang meliputi indikator :

1. Indeks Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (76,85%).
2. Persentase potensi Pencarian dan Pertolongan yang dibina (68%).
3. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi (87,84%).
4. Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga Pencarian dan Pertolongan (87,29%).
5. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan (64,3%).

B. Realisasi Anggaran

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diperoleh, APBN yang dialokasikan setiap tahun belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran yang diusulkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh setiap tahunnya. Berdasarkan Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024 kebutuhan penganggaran selama lima tahun mencapai Rp. 240,01 Miliar, namun hanya memperoleh alokasi 50,27% (Rp. 120,66 Miliar) dan berhasil direalisasikan 96,66% (Rp. 116,63 Miliar). Untuk lebih jelasnya perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 1.7** dan **Tabel 1.8**.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kemampuan Basarnas untuk menyediakan anggaran bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh periode Tahun 2020-2024 relatif terbatas. Hal ini perlu mendapatkan perhatian untuk ke depannya, diperlukan potensi sumber daya pendanaan lainnya guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Secara umum kemampuan daya serap anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh periode Tahun 2020-2024 sudah cukup tinggi, yakni sekitar 96,66% dari alokasi anggaran. Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran yang cukup tinggi perlu dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.7 Rencana, Alokasi, dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2020 (dalam jutaan rupiah)

No.	Program	Tahun 2020			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	12.749	13.848	13.170	95.10

2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.930	219	219	99.91
3.	Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	13.555	6.905	6.897	99.88
Total		30.234	20.974	20.287	96.73

Pada tahun 2020, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh memiliki 3 (tiga) program utama, dimana 2 (dua) Program bersifat teknis yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan, dan 1 (satu) program lainnya bersifat generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Sementara pada tahun 2021-2024, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh memiliki 2 (dua) program utama, dimana 1 (satu) program bersifat teknis yaitu Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana dan 1 (satu) program lainnya bersifat generik yaitu Program Dukungan Manajemen.

Perubahan 3 (tiga) program menjadi 2 (dua) program berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yaitu perubahan sistem perencanaan dan penganggaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. RSPP ini berfokus pada penerapan anggaran berbasis kinerja, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat diarahkan pada hasil yang lebih terukur dan akurat dan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Selama kurun waktu tahun 2020-2023, kerangka dan fokus anggaran sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020. Secara umum kerangka anggaran pada tahun 2020-2021 berfokus pada penanganan Covid-19, sementara pada tahun 2022-2023 berfokus pada pemulihan ekonomi nasional pasca terjadinya Covid-19 tersebut. Secara umum pelaksanaan anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam rentang tahun 2020-2023 dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan; dan
- b. Adanya kebijakan *Automatic Adjustment* (pemblokiran) terhadap anggaran yang sudah dialokasikan.

Tabel 1.8 Rencana, Alokasi, dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2021-2024
(dalam jutaan rupiah)

No.	Program	Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1.	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	16.066	5.647	5.596	99.09	12.536	6.575	6.503	98.91	13.900	7.530	7.499	99.59	12.795	7.535	7.249	96.19
2.	Dukungan Manajemen	17.650	15.478	14.305	92.42	16.017	15.854	14.884	93.88	13.961	19.791	19.407	98.06	21.727	21.167	20.797	98.25
Total		33.716	21.125	19.901	94.20	28.553	22.429	21.387	95.36	27.861	27.451	27.037	98.49	34.522	28.703	28.046	97.71

Sumber : RKA-K/L Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2021-2024 dan LAKIP Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2021-2024

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh untuk menganalisis segala sumber daya atau kemampuan yang dimiliki suatu organisasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan atau mencapai tujuan yang diharapkan serta mengidentifikasi hambatan atau permasalahan di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan layanan Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat di wilayah Aceh.

1.2.1 Potensi yang Dimiliki

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan isu strategis yang dihadapi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh tetap memiliki sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan kualitas layanan Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat. Potensi tersebut mencakup kekuatan yang telah dimiliki saat ini yang mendukung peran dan eksistensi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh secara lebih luas di wilayah strategis Provinsi Aceh dan sekitarnya dan kelemahan yang akan dihadapi oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh ke depannya. Adapun potensi-potensi tersebut adalah sebagai berikut :

A. Memiliki Pranata Pencarian dan Pertolongan (*rescuer*) yang Berkompeten

Tolak ukur keberhasilan pelayanan Pencarian dan Pertolongan terletak pada kecepatan dalam menanggapi kecelakaan yang terlihat dari tindakan awal saat pencarian dan pengerahan unsur-unsur dalam upaya operasi Pencarian dan Pertolongan yaitu salah satunya adalah sumber daya manusia, khususnya Pranata Pencarian dan Pertolongan (*rescuer*).

Rescuer merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan pencarian dan pertolongan dan menyelamatkan jiwa manusia, melakukan evakuasi terhadap korban yang selamat maupun meninggal, serta harus menguasai berbagai

teknik Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan menjelaskan bahwa jenjang jabatan fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan terdiri atas :

- a. Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula;
- b. Pranata Pencarian dan Pertolongan Terampil;
- c. Pranata Pencarian dan Pertolongan Mahir; dan
- d. Pranata Pencarian dan Pertolongan Penyelia.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh memiliki Pranata Pencarian dan Pertolongan sebanyak 89 personil, yang terdiri dari :

Tabel 1.9 Komposisi Pranata Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah
1	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	36
2	Pranata Pencarian dan Pertolongan Terampil	45
3	Pranata Pencarian dan Pertolongan Mahir	8
4	Pranata Pencarian dan Pertolongan Penyelia	-
TOTAL		89

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 2 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi *Rescuer* di Lingkungan Badan SAR Nasional menjelaskan bahwa Standar Kompetensi *Rescuer* adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki *rescuer* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. *Rescuer* wajib memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan dan jabatannya dan wajib mempertahankan kompetensi melalui diklat guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Standar kompetensi teknis *rescuer* yang dimaksud selain mempunyai kemampuan fisik yang baik, mental stabil, kemampuan renang gaya dada dan gaya bebas, *watertrappen*, juga telah menempuh minimal Diklat Prajabatan, Diklat Dasar, Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional, dan Diklat SAR Lanjutan sebagaimana Lampiran Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 2 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi *Rescuer* di Lingkungan Badan SAR Nasional.

Berdasarkan data diklat yang telah diikuti oleh *rescuer* Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh diperoleh bahwa sebanyak 69 personil telah mendapatkan Pelatihan Dasar SAR serta Diklat SAR Lanjutan yang tersebar pada Diklat MFR, Water Rescue, HART, VAR, Jungle Rescue, CSR, CSSR, Instruktur SAR, hingga SAR Plan dari 89 jumlah keseluruhan *rescuer* yang ada dan sebanyak 20 personil CPNS saat ini sedang melaksanakan Pelatihan Dasar SAR.

Tabel 1.10 Sebaran Diklat yang Telah Diikuti *Rescuer* Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

No.	Pendidikan dan Latihan	Jumlah
1	Diklat Prajabatan	89
2	Pelatihan Dasar SAR (Latdas SAR)	69
3	Medical First Responder (MFR)	65
4	Water Rescue	16
5	High Angle Rescue Technique (HART)	9
6	Jungle Rescue	12
7	Scuba Diver	62
8	Confined Space Rescue (CSR)	2
9	Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR)	7
10	Heli Rescue	2
11	Vehicle Accident Rescue (VAR)	3
12	Vertical Rescue	1
13	Urban SAR	3
14	BST, SCRB, AFF	4
15	Diklat Operator Radio	3
16	Diklat Instruktur	2

17	SAR Planning	3
18	Mine Rescue	3
19	Pilot Drone	6
20	Diklat Mentor	1

Pendidikan, pelatihan, dan pembinaan bagi *rescuer* Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh secara berkelanjutan dan merata merupakan sarana untuk menunjang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan skill mengenai pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh agar lebih baik, berkualitas, dan profesional.

B. Memiliki Sarana Pencarian dan Pertolongan Dalam Kondisi *Serviceable* dan Siap Digunakan Dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan

1. Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat

Mobilitas darat merupakan fondasi penting dalam mendukung kecepatan respon dari tim Pencarian dan Pertolongan ke lokasi kejadian, khususnya di wilayah daratan luas dan pegunungan Aceh. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh terus berupaya melengkapi armada kendaraan taktis dan logistik untuk menjangkau lokasi-lokasi terpencil dengan medan ekstrem. Keberadaan kendaraan tangguh dan serbaguna menjadi elemen vital dalam mendukung operasi evakuasi, distribusi logistik, maupun pengiriman alat berat.

Dalam rangka mendukung keberhasilan operasi Pencarian dan Pertolongan baik dalam capaian *response time* dan waktu tempuh, maka diperlukan sarana sebagai upaya tindak awal untuk menuju lokasi terjadinya kecelakaan/bencana, salah satunya menggunakan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat.

Saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh memiliki sarana kendaraan operasional yang *serviceable* dan siap digunakan dalam operasi Pencarian dan Pertolongan baik di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh, Pos SAR, maupun Unit Siaga SAR sebagai berikut :

Tabel 1.11 Sebaran dan Kondisi Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

No.	Sarana SAR Darat	Nomor Plat	Lokasi Penempatan	Kondisi
1	Rescue Truck Type I	BL 8023 JH	KPP Banda Aceh	Baik
2	Rescue Car Type I	BL 8024 JH	KPP Banda Aceh	Baik
3	Rescue Car Type I	BL 8034 JK	Pos SAR Meulaboh	Baik
4	Rescue Car Type II	BL 1036 AF	KPP Banda Aceh	Baik
5	Rescue Car Type II	BL 8022 JH	Unit Siaga SAR Bireuen	Baik
6	Rescue Car Type II	BL 8032 JK	KPP Banda Aceh	Baik
7	Rescue Car Type II	BL 8009 JK	KPP Banda Aceh	Baik
8	Rescue Car Type II	B 9218 PSE	Pos SAR Sabang	Baik
9	Rescue Car Type II	BL 1070 JK	Pos SAR Kutacane	Baik
10	Rescue Car Type II	BL 1005 AM	Pos SAR Langsa	Baik
11	Rescue Car Type II	B 1597 PQR	Pos SAR Meulaboh	Baik
12	Rescue Truck Type II	BL 8036 JK	Unit Siaga SAR Bireuen	Baik
13	Rescue Truck Type II	BL 8021 JH	Pos SAR Langsa	Baik
14	Rescue Truck Type II	B 9431 PQR	KPP Banda Aceh	Baik
15	Rescue Truck Type II	B 9073 POR	Pos SAR Sabang	Baik
16	Rescue Truck Type II	B 9003 PQR	Pos SAR Kutacane	Baik
17	Rescue Truck Type II	BL 8035 JK	Pos SAR Meulaboh	Baik
18	SAR Com Vehicle	BL 1004 AN	Pos SAR Sabang	Baik
19	Rapid Deployment	BL 1003 AF	KPP Banda Aceh	Baik
20	Rapid Deployment	BL 1004 AO	KPP Banda Aceh	Baik
21	Rapid Deployment	BL 1002 AF	KPP Banda Aceh	Baik
22	Rapid Deployment	BL 1014 AF	KPP Banda Aceh	Baik
23	Rapid Deployment	BL 1090 AR	KPP Banda Aceh	Baik
24	Rapid Deployment	BL 1002 AF	KPP Banda Aceh	Baik
25	Kendaraan Penumpang	BL 9006 JK	Unit Siaga SAR Bireuen	Baik
26	Kendaraan Penumpang	BL 8073 AG	Pos SAR Sabang	Baik
27	Kendaraan Penumpang	BL 8074 AG	Pos SAR Kutacane	Baik
28	Kendaraan Penumpang	BL 9025 AO	KPP Banda Aceh	Baik
29	Kendaraan Roda 2	BL 2347 AR	Pos SAR Meulaboh	Baik
30	Kendaraan Roda 2	BL 2352 AR	Pos SAR Langsa	Baik
31	Kendaraan Roda 2	BL 2346 AR	Pos SAR Kutacane	Baik
32	Kendaraan Roda 2	BL 2353 AR	KPP Banda Aceh	Baik
33	Kendaraan Roda 2	BL 2867 AF	KPP Banda Aceh	Baik

34	Kendaraan Roda 2	BL 2868 AF	KPP Banda Aceh	Baik
35	Kendaraan Roda 2	BL 2870 AF	Pos SAR Meulaboh	Baik
36	Motor Trail (Kawasaki)	BL 2025 AZ	KPP Banda Aceh	Baik
37	Motor Trail (Kawasaki)	B 3911 PIQ	Unit Siaga SAR Takengon	Baik
38	Motor Trail 150 cc	BL 2861 AJ	KPP Banda Aceh	Baik
39	Motor Trail 150	BL 2975 AJ	Unit Siaga SAR Bireuen	Baik
40	Motor Trail 150	BL 2026 AZ	Pos SAR Sabang	Baik
41	Motor Trail PS. 42/16	BL 2857 AJ	Pos SAR Langsa	Baik
42	Motor Trail PS. 42/16	BL 2936 AJ	Pos SAR Kutacane	Baik
43	Motor Trail PS. 42/16	BL 2862 AJ	Pos SAR Meulaboh	Baik
44	ATV Heavy Duty	-	KPP Banda Aceh	Baik
45	Amphibious Truck Carrier	BL 8020 JH	KPP Banda Aceh	Baik
46	ATV Amphibi - Personil Rescue	-	KPP Banda Aceh	Baik
47	ATV Amphibi - Medical Rescue Evacuation	-	KPP Banda Aceh	Baik

2. Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut

Selain Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat, Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut juga tidak kalah pentingnya dalam mendukung pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan di perairan, hal ini berdasarkan sebagian wilayah Aceh dikelilingi oleh perairan dan jalur pelayaran yang padat, Aceh memiliki tantangan tersendiri dalam operasi Pencarian dan Pertolongan di laut. Kecelakaan laut, kapal tenggelam, dan kondisi cuaca ekstrem menjadi potensi ancaman keselamatan yang memerlukan kesiapan sarana laut yang memadai. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh mengoperasikan berbagai jenis armada laut yang disesuaikan dengan karakteristik lokasi dan kebutuhan operasi Pencarian dan Pertolongan. Armada ini memainkan peran vital dalam memastikan keselamatan di wilayah laut, selat, sungai, hingga kawasan pesisir terpencil.

Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut mencakup Kapal Negara (KN) SAR, Rigid Inflatable Boat (RIB), dan perahu karet sebagai alat utama dalam merespon kecelakaan atau kondisi darurat di perairan. KN. SAR berfungsi sebagai platform utama untuk misi besar di laut lepas, dengan kemampuan navigasi dan penyelamatan yang memadai. RIB memiliki keunggulan dalam

kecepatan dan manuver di perairan sempit, ideal untuk pencarian di pantai dan selat. Perahu karet digunakan sebagai alat bantu evakuasi dan distribusi logistik di area banjir atau daerah pesisir yang dangkal. Penambahan unit dan peningkatan spesifikasi kapal menjadi fokus jangka panjang agar peralatan Pencarian dan Pertolongan laut semakin responsif dan tangguh.

Berikut ini adalah sebaran dan kondisi Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh :

Tabel 1.12 Sebaran dan Kondisi Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

No	Sarana SAR Laut	Jenis	Lokasi Penempatan	Kondisi
1	KN. SAR Kresna 232 40 Meter	Kapal SAR Kelas II	KPP Banda Aceh	Baik
2	Rigid Inflatable Boat (RIB) 8.5 Meter / Avon	RIB Kelas II	Pos SAR Meulaboh	Baik
3	Rigid Inflatable Boat (RIB) 8.5 Meter / Avon	RIB Kelas II	Pos SAR Langsa	Baik
4	Rigid Inflatable Boat (RIB) 9 Meter / Ribcraft	RIB Kelas II	Pos SAR Sabang	Baik
5	Rigid Inflatable Boat (RIB) 12 Meter / Dao Yacht	RIB Kelas I	Unit Siaga SAR Takengon	Baik
6	Rigid Inflatable Boat (RIB) 12 Meter	RIB Kelas I	KPP Banda Aceh	Baik
7	Rubber Boat 3.5 Meter / Avon	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
8	Rubber Boat 3.5 Meter / Avon	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
9	Rubber Boat 3.5 Meter / Avon	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
10	Rubber Boat 3.5 Meter / Avon	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
11	Rubber Boat 3.5 Meter / Avon	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
12	Rubber Boat 3.5 Meter / Avon	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
13	Rubber Boat 4 Meter / Avon	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
14	Rubber Boat 4 Meter /	Landing Craft	KPP Banda Aceh	Baik

	Avon	Rubber		
15	Rubber Boat 4 Meter / Avon	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
16	Rubber Boat 4 Meter / Avon	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
17	Rubber Boat 4 Meter / Avon	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
18	Rubber Boat 4 Meter / Avon	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
19	Rubber Boat 4 Meter / Achilles	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
20	Rubber Boat 3 Meter / Merin International	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
21	Rubber Boat 3 Meter / Merin International	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
22	Rubber Boat 3 Meter / Merin International	Landing Craft Rubber	Pos SAR Kutacane	Baik
23	Rubber Boat 3 Meter / Merin International	Landing Craft Rubber	Pos SAR Langsa	Baik
24	Rubber Boat 3 Meter / Merin International	Landing Craft Rubber	Pos SAR Meulaboh	Baik
25	Rubber Boat / Achilles SG-140	Landing Craft Rubber	Pos SAR Meulaboh	Baik
26	Rubber Boat / Achilles SG-140	Landing Craft Rubber	Pos SAR Sabang	Baik
27	Rubber Boat / Achilles SG-140	Landing Craft Rubber	Unit Siaga SAR Bireuen	Baik
28	Rubber Boat 3 Meter / Sillinger	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
29	Rubber Boat 3 Meter / Sillinger	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
30	Rubber Boat 3 Meter / Sillinger	Landing Craft Rubber	Pos SAR Langsa	Baik
31	Rubber Boat 3 Meter / Neptune	Landing Craft Rubber	Pos SAR Meulaboh	Baik
32	Rubber Boat 3 Meter / Neptune	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
33	Rubber Boat / MilPro	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
34	Rubber Boat 4.25 Meter / Sillinger	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
35	Rubber Boat Boogie	Rafting Boat	KPP Banda Aceh	Baik

36	Rubber Boat Boogie	Rafting Boat	Unit Siaga SAR Takengon	Baik
37	Rubber Boat / Comodo	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik
38	Rubber Boat / Comodo	Landing Craft Rubber	KPP Banda Aceh	Baik

3. Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara

Dalam upaya meningkatkan efektivitas operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat atau laut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh telah mulai memanfaatkan sarana udara sebagai bagian dari strategi modernisasi Pencarian dan Pertolongan. Penggunaan teknologi udara dinilai sangat penting terutama di wilayah Aceh yang memiliki topografi kompleks seperti pegunungan, hutan lebat, dan pulau-pulau kecil. Penguatan unit udara ini sejalan dengan arah kebijakan nasional Basarnas yang mengedepankan teknologi untuk meningkatkan efektivitas operasi Pencarian dan Pertolongan. Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh saat ini adalah *drone* yang digunakan untuk operasi Pencarian dan Pertolongan di area sulit dijangkau.

Drone berfungsi untuk pengamatan udara, pemetaan lokasi kejadian, dan pencarian visual secara *real time* di area terbuka seperti hutan, gunung, dan laut. Pengembangan kemampuan operator serta pemeliharaan rutin menjadi prioritas utama agar efektivitas alat tetap optimal.

Berikut ini adalah sebaran dan kondisi terkait *drone* yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh :

Tabel 1.13 Sebaran dan Kondisi Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

No	Sarana SAR Udara	Jenis	Lokasi Penempatan	Kondisi
1	Drone	Thermal Unmanned Aerial Vehicle	- KPP Banda Aceh - Pos SAR Langsa - Unit Siaga SAR Bireuen - Unit Siaga SAR Takengon	Baik

4. Sarana Unit K-9 SAR

Unit K-9 SAR merupakan anjing pelacak yang dilatih secara khusus guna membantu pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan, hal ini sangat berharga dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban karena memiliki penciuman dan pendengaran yang jauh lebih tajam dari pada manusia. Kemampuan ini memungkinkan anjing pelacak untuk mendeteksi korban yang tertimbun dibawah reruntuhan atau tumpukan material, mendeteksi korban hilang di hutan maupun bencana gempa bumi dan/atau tanah longsor, hingga menyisir area yang luas dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan manusia pada umumnya.

Berikut ini adalah sebaran dan kondisi Sarana Unit K-9 SAR yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh :

Tabel 1.14 Sebaran dan Kondisi Sarana Unit K-9 SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

No	Sarana Unit K-9 SAR	Jenis	Lokasi Penempatan	Kondisi
1	K9 Rambo	German Shepherd	KPP Banda Aceh	Baik
2	K9 Gypsy	German Shepherd	KPP Banda Aceh	Baik
3	K9 Luna	Labrador Retriever	KPP Banda Aceh	Baik

1.2.2 Permasalahan Utama

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh sebagai garda terdepan memberikan layanan Pencarian dan Pertolongan di Provinsi Aceh, tentu menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berikut permasalahan utama yang dihadapi :

A. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu kelemahan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh hingga saat ini adalah pemenuhan kuantitas SDM yang masih belum mencukupi baik tenaga Pranata Pencarian dan Pertolongan (*rescuer*), Anak Buah Kapal (ABK), tenaga administrasi, maupun tenaga teknis lainnya. Hal ini berdampak pada penyelenggaraan kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang belum optimal. Berdasarkan peta jabatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda

Aceh Bulan Juni Tahun 2025 jumlah tenaga Pranata Pencarian dan Pertolongan yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh sebanyak 89 orang yang merupakan 11.23% dari kebutuhan tenaga *rescuer* yaitu 792 orang. Selain itu jumlah ABK yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh hanya sebanyak 11 orang, sehingga jumlah ABK yang sudah terpenuhi saat ini baru sebesar 57.89% dari kebutuhan ABK yaitu 19 orang, begitupun juga dengan tenaga administrasi baik jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional yang dimiliki sebanyak 36 orang yang merupakan 29.75% dari kebutuhan tenaga administrasi yaitu 121 orang.

Tabel 1.15 Rekapitulasi Kebutuhan, Bezzeting, dan Kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

No	Nomenklatur Jabatan	Kebutuhan ASN	Bezzeting		Kekurangan
			PNS	PPPK	
1	Jabatan Administrator	1	1	-	-
2	Jabatan Pengawas	3	3	-	-
3	Jabatan Pelaksana	60	13	6	41
4	Jabatan Fungsional	57	13	-	44
5	Pranata Pencarian dan Pertolongan	792	89	-	703
6	Anak Buah Kapal (ABK)	19	11	-	8
Total Jumlah		932	136		796

Berdasarkan data **Tabel 1.15** di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dengan jumlah pegawai sebanyak 136 orang masih membutuhkan SDM sebanyak 796 orang dari total kebutuhan SDM berjumlah 932 orang. Dari data tersebut, maka pemenuhan SDM sangat mutlak dilakukan baik melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun melalui Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerimaan pegawai melalui jalur prestasi juga merupakan salah satu cara untuk menjaring talenta-talenta terbaik di berbagai bidang guna memenuhi kebutuhan SDM Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.

B. Keterbatasan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan Secara Kuantitas dan Kualitas

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan yang cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi, diperlukan sarana prasarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang mampu menangani setiap jenis kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.

Penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan memerlukan sarana dan prasarana yang berbeda tergantung pada jenis kecelakaan, bencana atau kondisi membahayakan manusia yang ditangani. Untuk menetapkan jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan, dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan, maka Basarnas telah menetapkan standar kebutuhan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : SK-KBSN. 55/SP.01.02/II/BSN-2020 tentang Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Kondisi saat ini sarana prasarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh masih sangat terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas, hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran Basarnas secara keseluruhan dan pemenuhan sarana prasarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan hanya diadakan secara terpusat oleh Kantor Pusat Basarnas. Berikut kebutuhan sarana, prasarana, dan peralatan Pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh :

Tabel 1.16 Kebutuhan Sarana Prasarana dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

I. Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat

No	Sarana	Standar Pemenuhan Kantor	Standar Pemenuhan Pos SAR	Standar Pemenuhan Unit Siaga SAR	Total Standar Pemenuhan	Bezzeting	Kekurangan
1	Rescue Truck						
	a. Rescue Truck Type I	2	0	0	2	1	1
	b. Rescue Truck Type II	3	8	2	13	6	7
	c. Rescue Truck Type III						
	1). Multi Purpose Vehicle Logistic Support	1	0	0	1	0	1
	2). Truck Angkut Sarana	1	0	0	1	1	0
	3). Disaster Support Tactical Equipment Vehicle	1	0	0	1	0	1
2	Rescue Car						
	a. Rescue Car Type I	2	4	2	8	2	6
	b. Rescue Car Type II						
	1). Rescue Car Double Cabin	3	8	2	13	11	2
	2). Rescue Carrier Vehicle	2	4	2	8	3	5
	c. Rescue Car Type III						
	1). Slip On Unit Vehicle	1	0	0	1	0	1
	2). Ambulance	1	0	0	1	4	0
	3). SAR Mission Coordinator Vehicle	1	0	0	1	0	1
3	All Terain Vehicle						
	a. ATV Heavy Duty	1	0	0	1	1	0
	b. Amphibious All Terrain Vehicle	2	0	0	2	2	0
	c. Beach Patrol Vehicle	1	0	0	1	0	1

4	Rescue Excavator	1	0	0	1	0	1
5	Rescue Motorcyle						
	a. Rescue Motorcycle Type I	2	4	2	8	8	0
	b. Rescue Motorcycle Type II	5	12	4	21	7	14

II. Sarana Pencarian dan Pertolongan Perairan

No	Sarana	Standar Pemenuhan Kantor	Standar Pemenuhan Pos SAR	Standar Pemenuhan Unit Siaga SAR	Total Standar Pemenuhan	Bezzeting	Kekurangan
1	Kapal SAR						
	a. Kapal SAR Kelas II (Panjang 30 s.d < 40 M)	2	0	0	2	1	1
	b. Kapal SAR Kelas IV (Panjang 12 s.d < 20 M)	1	0	0	1	0	1
2	Rigid Inflatable Boat (RIB)						
	a. RIB Kelas I (≥ 10 Meter)	2	4	2	8	2	6
	b. RIB Kelas II (< 10 Meter)	2	4	2	8	3	5
3	Rubber Boat						
	a. Landing Craft Rubber	11	32	10	53	30	23
	b. Rafting Boat	4	12	4	20	2	18
4	Rescue Fast Water	3	8	0	11	0	11

III. Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara

No	Sarana	Standar Pemenuhan Kantor	Standar Pemenuhan Pos SAR	Standar Pemenuhan Unit Siaga SAR	Total Standar Pemenuhan	Bezzeting	Kekurangan
1	Paramotor	1	4	2	7	0	7

IV. Peralatan Pencarian Darat

No	Sarana	Standar Pemenuhan Kantor	Standar Pemenuhan Pos SAR	Standar Pemenuhan Unit Siaga SAR	Total Standar Pemenuhan	Bezzeting	Kekurangan
1	Radio Locator						
	a. Ground Penetrating Radar	2	0	0	2	0	2
	b. Radar Life Locator	2	0	0	2	2	0
	c. Sound Detector	2	0	0	2	1	1
2	Image Detector Cam						
	a. Telescopic Camera	2	0	0	2	1	1
	b. Thermal Imaging Camera	2	0	0	2	1	1
3	Navigation Kit	2	4	2	8	0	8
4	Teropong/Binocular	2	4	2	8	8	0

V. Peralatan Pencarian Perairan

No	Sarana	Standar Pemenuhan Kantor	Standar Pemenuhan Pos SAR	Standar Pemenuhan Unit Siaga SAR	Total Standar Pemenuhan	Bezzeting	Kekurangan
1	Remotely Operated Vehicle (ROV) Portable	2	0	0	2	0	2
2	Underwater Metal Detector	1	0	0	1	0	1
3	Marine Multi Band Direction Finder	1	0	0	1	0	1
4	Automatic Identification System (AIS)	1	0	0	1	0	1
5	Search Light for Marine	1	0	0	1	0	1
6	Thermal Surveillance Camera	1	0	0	1	0	1
7	Teropong/Binocular	2	4	2	8	0	8

8	Navigation Kit	2	4	2	8	0	8
---	----------------	---	---	---	---	---	---

VI. Peralatan Pencarian Udara

No	Sarana	Standar Pemenuhan Kantor	Standar Pemenuhan Pos SAR	Standar Pemenuhan Unit Siaga SAR	Total Standar Pemenuhan	Bezzeting	Kekurangan
1	Unnamed Aerial Vehicle (Rotary/Fixed Wing)	2	0	0	2	0	2
2	Navigation Kit	2	4	2	8	0	8
3	Drone	2	8	4	14	1	13

VII. Peralatan Ekstrikasi

No	Sarana	Standar Pemenuhan Kantor	Standar Pemenuhan Pos SAR	Standar Pemenuhan Unit Siaga SAR	Total Standar Pemenuhan	Bezzeting	Kekurangan
1	Heavy Rescue Hydraulic Set						
	a. Rescue Tools w/ motor pump	2	4	2	8	2	6
	b. Rescue Tools w/battery	2	4	2	8	1	7
2	Shoring Set	2	4	2	8	0	8
3	Rotary Saw	2	4	2	8	12	0
4	Chain Saw	2	4	2	8	2	6
5	Floor Saw Cutting Machine	2	4	2	8	0	8
6	Demolition Hammer	2	4	2	8	0	8
7	Rotary Hammer Drill	2	4	2	8	2	6
8	Reciprocating Saw	2	4	2	8	0	8
9	Cutting Welder (alat potong besi/las)	2	4	2	8	1	7

10	Elektrik Drill (bor)	2	4	2	8	0	8
11	Coring Drill (breaching system)	2	4	2	8	3	5
12	Bolt Cutter (pemotong kawat)	2	4	2	8	2	6
13	Chipping Hammer	2	4	2	8	0	8
14	Glass Breaker Set	2	4	2	8	0	8
15	Cribbing Karet	2	4	2	8	0	8
16	Sledge Hammer	2	4	2	8	0	8
17	Building Maintenance Kit	2	4	2	8	0	8
18	Step Chock	2	4	2	8	0	8
19	Wedges Karet	2	4	2	8	0	8
20	Wheel Chock	2	4	2	8	0	8
21	Cutting Metal System	2	4	2	8	0	8
22	Pry Bar	2	4	2	8	5	3
23	Linggis Serbaguna	2	4	2	8	3	5
24	Sekop Cangkul Lipat	2	4	2	8	2	6
25	Kapak Serbaguna	2	4	2	8	2	6
26	Self Cointaned Breathing Apparatus (SCBA) with Wireless Communication						
	a. Close Circuit	2	4	2	8	0	8
	b. Open Circuit	2	4	2	8	0	8
27	Blower/Air Fan dan Exhaust	2	4	2	8	0	8

VIII. Peralatan Mountaineering

No	Sarana	Standar Pemenuhan Kantor	Standar Pemenuhan Pos SAR	Standar Pemenuhan Unit Siaga SAR	Total Standar Pemenuhan	Bezzeting	Kekurangan
1.	Ascender Launcher	2	4	2	8	0	8
2.	Tactical Ascender	2	4	2	8	1	7
3	Anchor Device (Choke)	2	4	2	8	0	8
4	Anchor Device (Hexentric)	2	4	2	8	0	8
5	Anchor Device (Piton)	2	4	2	8	0	8
6	Anchor Sling	2	4	2	8	0	8
7	Anchor Strap	2	4	2	8	0	8
8	Ascender Handle	2	4	2	8	14	0
9	Ascender Non Handle	2	4	2	8	7	1
10	Autostop Descender	2	4	2	8	6	2
11	In Panic Descender	2	4	2	8	16	0
12	Carabiner Screw Gate	2	4	2	8	105	0
13	Carabiner Screw Gate Big Size	2	4	2	8	0	8
14	Carabiner with Lock	2	4	2	8	40	0
15	Alat Pengukur Kekuatan / Enforcer Load Cell Kit	2	4	2	8	0	8
16	Delta MR (Million Rapid)/Delta Quick Link	2	4	2	8	9	0
17	Double Pulley with Swivel	2	4	2	8	0	8
18	Edge Pad	2	4	2	8	0	8
19	Edge Roller	2	4	2	8	5	3
20	Evacuation Set	2	4	2	8	0	8
21	Figure of Eight	2	4	2	8	10	0
22	Figure of Eight with Gear	2	4	2	8	14	0

23	Paw S Anchor Plate	2	4	2	8	0	8
24	Paw/Rigging Plate (Large)	2	4	2	8	0	8
25	Paw/Rigging Plate (Medium)	2	4	2	8	2	6
26	Paw/Rigging Plate (Small)	2	4	2	8	0	8
27	Pulley	2	4	2	8	8	0
28	Pulley with Swivel	2	4	2	8	0	8
29	Rigging Plate (3D)	2	4	2	8	0	8
30	Rock and Concrete Anchor / Dinaboll (12/16 mm)	2	4	2	8	0	8
31	Tali Kernmantel						
	a. Tali Kernmantel Statik (11 mm)	2	4	2	8	6	2
	b. Tali Kernmantel Statik (13 mm)	2	4	2	8	0	8
	c. Tali Pemandu Glow in the Dark	2	4	2	8	0	8
	d. Tali Safety	2	4	2	8	2	6
	e. Tali Utama	2	4	2	8	6	2
32	Webbing (min 4 m)	2	4	2	8	21	0
33	Webbing Tabular (Min. 5 meter / 2.5 cm)	2	4	2	8	0	8
34	Prusik (1.8 mm)	2	4	2	8	51	0
35	Pro Traxion	2	4	2	8	5	3
36	Protection Shield	2	4	2	8	0	8
37	Sharp Edge Protection Cover SEP 10	2	4	2	8	0	8
38	Full Body Harness	2	4	2	8	18	0
39	Sit Harness	2	4	2	8	30	0
40	Mini Traxion	2	4	2	8	0	8
41	Multi Pod	2	4	2	8	0	8
42	Tripod dan Winch	2	4	2	8	0	8
43	Multipurpose Device (MPD)	2	4	2	8	0	8

44	Rescue Cender	2	4	2	8	4	4
45	Gear Bag	2	4	2	8	3	5
46	Floodlight	2	4	2	8	0	8
47	Kootenay Pulley	2	4	2	8	0	8
48	Blocking Pulley	2	4	2	8	11	0
49	Tandem Pulley	2	4	2	8	0	8
50	Swivel	2	4	2	8	6	2
51	Rope Cutting Gun	2	4	2	8	0	8

IX. Peralatan Material Berbahaya

No	Sarana	Standar Pemenuhan Kantor	Standar Pemenuhan Pos SAR	Standar Pemenuhan Unit Siaga SAR	Total Standar Pemenuhan	Bezzeting	Kekurangan
1	Alat Dekontaminasi Area	2	4	2	8	0	8
2	Gully Sealing	2	4	2	8	0	8
3	Handhald Chemical Detector	2	4	2	8	0	8
4	Gas Detector	2	4	2	8	1	7
5	Berms	2	4	2	8	0	8
6	Closed Rubber Tanks	2	4	2	8	0	8
7	Drainage Pipe Sealing Bag	2	4	2	8	0	8
8	Drainage Sealing Bag	2	4	2	8	0	8
9	Inflatable Pipe Plugs	2	4	2	8	0	8
10	Large Leaks Sealing Bag	2	4	2	8	0	8
11	Mega Leak Sealing Kit	2	4	2	8	0	8
12	Mini Leaks Sealing Bag	2	4	2	8	0	8
13	Pipe Plugs Kit	2	4	2	8	0	8

14	Sealing Bandages	2	4	2	8	0	8
15	Sealing Tubes	2	4	2	8	0	8
16	Self Supporting Interceptive Tanks	2	4	2	8	0	8
17	Transport Tanks	2	4	2	8	0	8
18	Vacuum Drainage Bag	2	4	2	8	0	8
19	Wedge and Cone Plugs	4	4	2	8	0	8

X. Peralatan Pertolongan Perairan

No	Sarana	Standar Pemenuhan Kantor	Standar Pemenuhan Pos SAR	Standar Pemenuhan Unit Siaga SAR	Total Standar Pemenuhan	Bezzeting	Kekurangan
1	Chamber	2	4	2	8	0	8
2	Rapid Thruster Diving Vehicle	2	4	2	8	0	8
3	Under Water Evacuation Equipment	2	4	2	8	0	8
4	Sea Lifting Ballon	2	4	2	8	1	7
5	Life Buoy With Remote System	2	4	2	8	4	4
6	Portable Sea Navigation	2	4	2	8	0	8
7	Tali Pandu Rescue	2	4	2	8	0	8
8	Tali Lempar Rescue	2	4	2	8	10	0
9	Life Craft	2	4	2	8	0	8
10	Life Jacket	2	4	2	8	79	0
11	Ring Buoy	2	4	2	8	27	0
12	Flexible Buoy	2	4	2	8	10	0
13	Torpedo Buoy	2	4	2	8	0	8
14	Shark Reppelant	2	4	2	8	0	8
15	Bola Tanda	2	4	2	8	0	8

16	Day Marker	2	4	2	8	0	8
----	------------	---	---	---	---	---	---

XI. Peralatan Pertolongan Udara

No	Sarana	Standar Pemenuhan Kantor	Standar Pemenuhan Pos SAR	Standar Pemenuhan Unit Siaga SAR	Total Standar Pemenuhan	Bezzeting	Kekurangan
1	Rescue Net	2	0	0	2	0	2
2	Fast Rope	2	4	2	8	0	8
3	Rescue Jangkar	2	4	2	8	0	8

XII. Peralatan Medis

No	Sarana	Standar Pemenuhan Kantor	Standar Pemenuhan Pos SAR	Standar Pemenuhan Unit Siaga SAR	Total Standar Pemenuhan	Bezzeting	Kekurangan
1	Trauma Kit	2	4	2	8	0	8
2	Responder Kit	2	4	2	8	0	8

XIII. Tandu Evakuasi

No	Sarana	Standar Pemenuhan Kantor	Standar Pemenuhan Pos SAR	Standar Pemenuhan Unit Siaga SAR	Total Standar Pemenuhan	Bezzeting	Kekurangan
1	Tandu Vakum	2	4	2	8	0	8
2	Tandu Basket/Basket Stretcher	2	4	2	8	1	7
3	Basket Stretcher w/ Floatation	2	4	2	8	0	8
4	Long Spinal Board + Head Immobilizer Device (HID) + Spider Strap	2	4	2	8	1	7

5	Tandu Lipat / Folding Stretcher	2	4	2	8	7	1
6	Tandu Scoop / Scoop Stretcher	2	4	2	8	1	7
7	Pitagor Stretcher	2	4	2	8	0	8
8	Sked Stretcher	2	4	2	8	1	7
9	Long Spinal Board untuk di Air	2	4	2	8	0	8
10	Slix 100 Rescue Stretcher	2	4	2	8	0	8
11	Cave Rescue Stretcher	2	4	2	8	0	8

XIV. Sarana Unit K-9 SAR

No	Sarana	Standar Pemenuhan Kantor	Standar Pemenuhan Pos SAR	Standar Pemenuhan Unit Siaga SAR	Total Standar Pemenuhan	Bezzeting	Kekurangan
1	Anjing Pelacak	2	4	2	8	3	5

Secara kualitas sarana, prasarana, dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang sebagian besar dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh memerlukan peremajaan lebih lanjut guna mengganti sarana prasarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang memasuki akhir masa pakai sehingga mengakibatkan rusak berat dan tidak berfungsi dengan baik sehingga membahayakan personil di lapangan dan juga membutuhkan sarana prasarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang sesuai dengan perkembangan teknologi baru dan mutakhir sehingga dapat meningkatkan kinerja personil dalam menyelenggarakan operasi Pencarian dan Pertolongan.

C. Efisiensi Anggaran dan Kebijakan *Refocusing* serta *Automatic Adjustment*

Kebutuhan anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh merupakan kebutuhan optimal guna penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Basarnas yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Namun dengan adanya efisiensi anggaran, kebijakan *refocusing* dan *automatic adjustment* (pemblokiran) yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap anggaran yang sudah dialokasikan, maka akan berdampak pada program kerja dan kegiatan serta kesiapan sarana prasarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang akan digunakan dalam operasi Pencarian dan Pertolongan.

Dalam rentang tahun 2020-2021 kebijakan *refocusing* anggaran dilakukan untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 dan kebijakan *automatic adjustment* merupakan mekanisme pencadangan belanja Kementerian/Lembaga yang diblokir sementara pada Pagu Belanja Kementerian/lembaga. Kebijakan ini dilakukan guna menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik sejak awal tahun 2023 hingga saat ini.

Dengan adanya kebijakan *refocusing* dan *automatic adjustment* ini mengakibatkan sebagian besar program kerja dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan baik serta resiko ketidakmampuan mencapai target output dengan anggaran terbatas. Berikut kegiatan prioritas

yang terdampak akibat kebijakan *refocusing* dan *automatic adjusment* dalam rentang tahun 2020-2024 :

Tabel 1.17 Kegiatan Prioritas yang Terdampak Akibat Kebijakan *Refocusing* dan *Automatic Adjusment* Pada Tahun 2020-2024

No.	Kegiatan Prioritas	Volume	Anggaran Terblokir (Rp.)
Tahun 2020			
1	Pengadaan Meubelair Kantor SAR Banda Aceh	1 Paket	200.000.000,-
2	Pengadaan Sound System Kantor SAR	1 Paket	120.000.000,-
3	Pembangunan Gedung Siaga Pos SAR Langsa	210 M2	1.050.000.000,-
4	Pembangunan Saluran Pos SAR Langsa	320 M2	320.000.000,-
5	Pembangunan Saluran Pos SAR Kutacane	450 M2	450.000.000,-
6	Pengadaan Peralatan <i>High Angle Rescue</i>	1 Paket	150.000.000,-
7	Pembangunan Tower Komunikasi 50 Meter Pos SAR	1 Paket	300.000.000,-
8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SAR	2 Paket	540.000.000,-
9	Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR	1 Dokumen	300.000.000,-
10	Rapat Koordinasi	1 Dokumen	200.000.000,-
11	Pemeliharaan Peralatan SAR Komunikasi	1 Tahun	100.000.000,-
12	Pelatihan Potensi SAR Pos SAR Kutacane	1 Dokumen	225.000.000,-
13	Pelatihan Potensi SAR Pos SAR Langsa	1 Dokumen	225.000.000,-
Tahun 2021			
1	Pengadaan Tower Komunikasi 50 Meter 2 (dua) Pos Pencarian dan Pertolongan	2 Unit	300.000.000,-
2	Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional)	62 Unit	1.740.176.000,-
3	Pembinaan SAR Pegawai Kantor SAR	1 Tahun	36.357.000,-
4	Rapat Koordinasi	1 Dokumen	160.000.000,-
5	Program SAR <i>Goes to School</i>	1 Tahun	50.000.000,-
6	Pelatihan Potensi SAR Kantor SAR Banda Aceh	150 Orang	675.000.000,-
7	Latihan SAR Daerah	1 Kegiatan	120.000.000,-

Tahun 2022			
1	Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional)	67 Unit	740.000.000,-
2	Rapat Koordinasi	1 Kegiatan	160.000.000,-
3	Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR	1 Operasi	235.510.000,-
4	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Air (Prioritas Nasional)	50 Orang	278.750.000,-
5	Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan	1 Kegiatan	50.778.000,-
6	Latihan SAR Satuan di Air	1 Kegiatan	46.247.000,-
7	Pembangunan Gudang Peralatan Pos SAR Langsa	100 M2	566.500.000,-
Tahun 2024			
1	Rapat Koordinasi dan Penyusunan Kontingensi SAR	1 Kegiatan	160.000.000,-
2	Latihan SAR Gabungan	1 Kegiatan	94.648.000,-

Setelah terbitnya kebijakan *refocusing* anggaran dan kebijakan *automatic adjustment* sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2025 Pemerintah kembali menerbitkan kebijakan Efisiensi Anggaran yang berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang instruksi dari Presiden kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk melaksanakan efisiensi belanja negara dan daerah pada Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini mencakup pembatasan belanja non prioritas seperti belanja seremonial dan perjalanan dinas, dan belanja barang yang tidak mendukung program prioritas serta fokus pada kinerja pelayanan publik untuk mengalihkan anggaran demi kepentingan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Berikut kegiatan prioritas yang terdampak akibat kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 :

Tabel 1.18 Kegiatan Prioritas yang Terdampak Akibat Kebijakan Efisiensi Anggaran Pada Tahun 2025

No.	Kegiatan Prioritas	Volume	Jumlah Pemotongan Anggaran (Rp.)
Tahun 2025			
1	Pelaksanaan Kompetensi Tenaga SAR yang Dipelihara	97 Orang	337.872.000,-
2	Latihan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan Nasional	1 Kegiatan	7.112.000,-
3	Biaya Rotasi Petugas Siaga	1 Laporan	19.320.000,-

D. Terbatasnya Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kapasitas pegawai

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh, maka dibutuhkan pemenuhan pengembangan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi. Pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga menghasilkan SDM yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam mengembangkan kompetensi dan peningkatan kapasitas pegawai masih bergantung pada kegiatan Pelatihan dan/atau Diklat yang diadakan oleh Balas Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan (Balai SDM PP), sehingga pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas SDM yang diharapkan belum terpenuhi secara merata secara keseluruhan bagi setiap personil karena keterbatasan anggaran dan SDM dari penyelenggara Pelatihan dan/atau Diklat.

Data kompetensi pegawai menunjukkan bahwa sebagian besar personil telah memiliki sertifikasi di bidang SAR, komunikasi, medis, dan penyelaman, serta keterampilan pendukung lainnya. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan pengembangan kapasitas dan kompetensi lanjutan, baik dari sisi teknis maupun manajerial, untuk menjawab tantangan lapangan yang semakin kompleks, seperti bencana hidrometeorologi, kecelakaan transportasi, dan

operasi Pencarian dan Pertolongan di daerah terpencil. Adapun data kompetensi pegawai yang dimiliki saat ini untuk menjadi bahan evaluasi penting dalam menyusun arah pengembangan SDM yang lebih profesional, tanggap, dan adaptif di masa mendatang sebagai berikut :

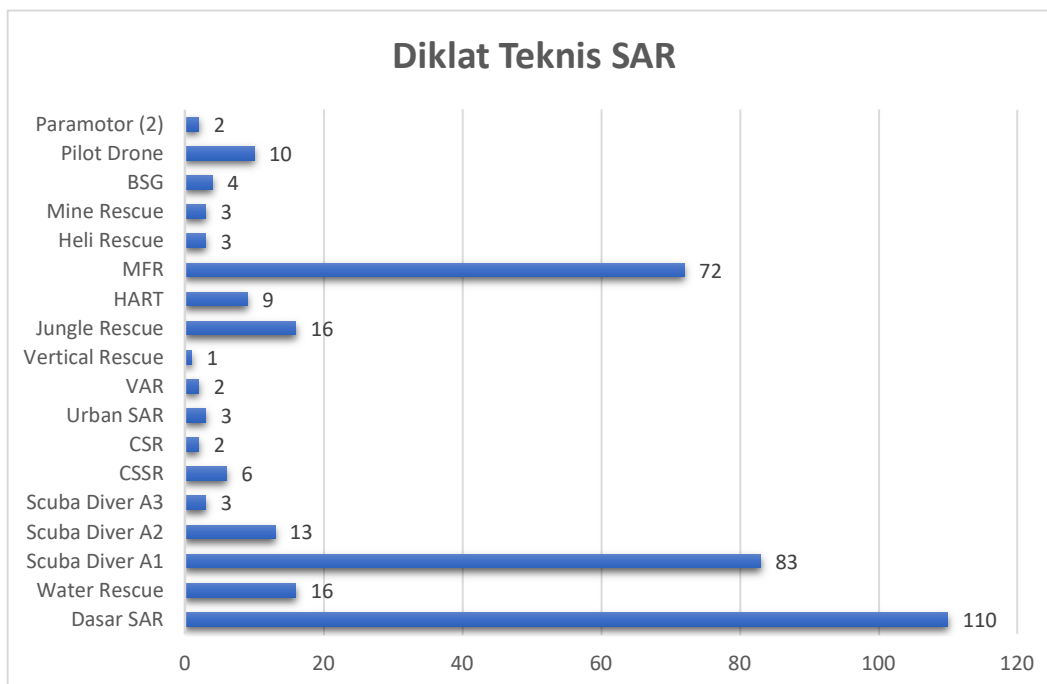


Diagram 1.2 Perbandingan Kompetensi Diklat Teknis SAR

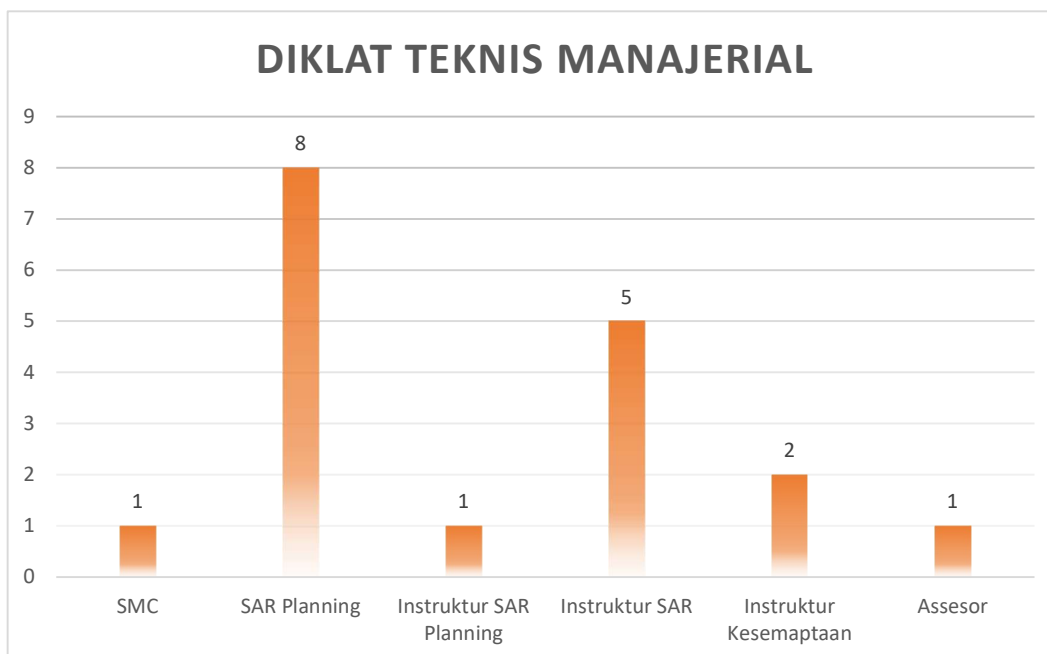


Diagram 1.3 Perbandingan Kompetensi Diklat Teknis Manajerial



Diagram 1.4 Perbandingan Kompetensi Diklat Teknis Logistik

1.3 PELUANG DAN TANTANGAN

1.3.1 Peluang

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh memiliki peluang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, peluang ini sangat terkait dengan posisi geografis Aceh dan kebutuhan layanan Pencarian dan Pertolongan. Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh guna memperkuat, memperluas kapasitas, kapabilitas, serta jejaring kerjasama Pencarian dan Pertolongan dalam menghadapi tantangan kebencanaan dan keadaan darurat yang memang sangat relevan di wilayah Aceh adalah sebagai berikut :

A. Destinasi Wisata

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas layanan Pencarian dan Pertolongan di masa depan. Salah satu peluang utama adalah dari segi aspek destinasi wisata, Provinsi Aceh memiliki kekayaan destinasi wisata yang sangat beragam dan potensial, baik dari segi alam, budaya, maupun sejarah. Sebagai provinsi paling barat Indonesia, Aceh memiliki letak geografis yang strategis, garis pantai yang panjang, dan gugusan pulau yang mempesona, menjadikannya salah satu tujuan wisata unggulan nasional. Di antara destinasi yang paling

dikenal adalah Pulau Weh dan Kota Sabang, yang menjadi titik nol kilometer Indonesia dan dikenal dunia karena keindahan bawah lautnya seperti di Rubiah *Sea Garden*. Selain itu, Danau Laut Tawar di Takengon juga menjadi magnet wisata alam dataran tinggi yang menawarkan pengalaman ekowisata dan budaya kopi Gayo yang khas.

Destinasi lain seperti Pantai Lhoknga dan Lampuuk di Aceh Besar kerap dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara karena ombaknya yang cocok untuk surfing dan pemandangan matahari terbenam yang memesona. Sementara itu, Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh menjadi ikon wisata religi dan sejarah yang sarat makna, terutama karena peran sentralnya dalam peristiwa tsunami tahun 2004. Wilayah selatan Aceh seperti Pulau Banyak di Aceh Singkil dan kawasan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh Tenggara dan Gayo Lues juga memiliki daya tarik tersendiri yang mengundang petualang dan pecinta alam.

Tabel 1.19 Objek Wisata Unggulan Provinsi Aceh

No	Nama Destinasi	Lokasi	Jenis Wisata	Keterangan
1	Pulau Weh & Kota Sabang	Kota Sabang	Bahari, Diving, Sejarah	Wilayah Kepulauan dan Bahari
2	Rubiah Sea Garden	Kota Sabang	Snorkeling, Konservasi Laut	Wilayah Kepulauan dan Bahari
3	Pulau Banyak	Aceh Singkil	Ekowisata, Bahari	Wilayah Kepulauan dan Bahari
4	Pantai Ujung Batee	Aceh Besar	Pantai, Wisata Keluarga	Wilayah Kepulauan dan Bahari
5	Pantai Lampuuk & Lhoknga	Aceh Besar	Surfing, Wisata bahari	Wilayah Kepulauan dan Bahari
6	Danau Laut Tawar	Aceh Tengah	Alam, Danau, Budaya Gayo	Wilayah Dataran Tinggi dan Ekowisata
7	Gunung Burni Telong	Aceh Tengah	Pendakian, Alam	Wilayah Dataran Tinggi dan Ekowisata
8	Taman Nasional Gunung Leuser	Gayo Lues, Aceh Tenggara	Ekowisata, Flora Fauna	Wilayah Dataran Tinggi dan Ekowisata
9	Masjid Raya Baiturrahman	Banda Aceh	Religi, Sejarah Tsunami	Wilayah Perkotaan dan Wisata Budaya/Religi

10	Museum Tsunami	Banda Aceh	Edukasi Kebencanaan	Wilayah Perkotaan dan Wisata Budaya/Religi
11	Kompleks Gunung	Banda Aceh	Sejarah, Budaya Melayu	Wilayah Perkotaan dan Wisata Budaya/Religi

Namun demikian, tingginya aktivitas wisata di wilayah pesisir, kepulauan, dan pegunungan juga meningkatkan potensi risiko kecelakaan atau kejadian darurat. Oleh karena itu, keberadaan sistem Pencarian dan Pertolongan yang andal di sekitar destinasi wisata menjadi sangat penting. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh perlu merespon perkembangan ini dengan memperkuat kapasitas personil, sarana evakuasi laut dan udara, serta skema koordinasi dengan pengelola destinasi dan potensi Pencarian dan Pertolongan. Dengan sinergi yang baik, wisata Aceh berkembang secara berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek keselamatan pengunjungnya.

B. Resiko Kebencanaan

Terkait tingginya risiko bencana di Indonesia, pemerintah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (2020-2044) dengan Visi "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan", visi tersebut diwujudkan dengan misi :

- 1) Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan;
- 2) Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif; dan
- 3) Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

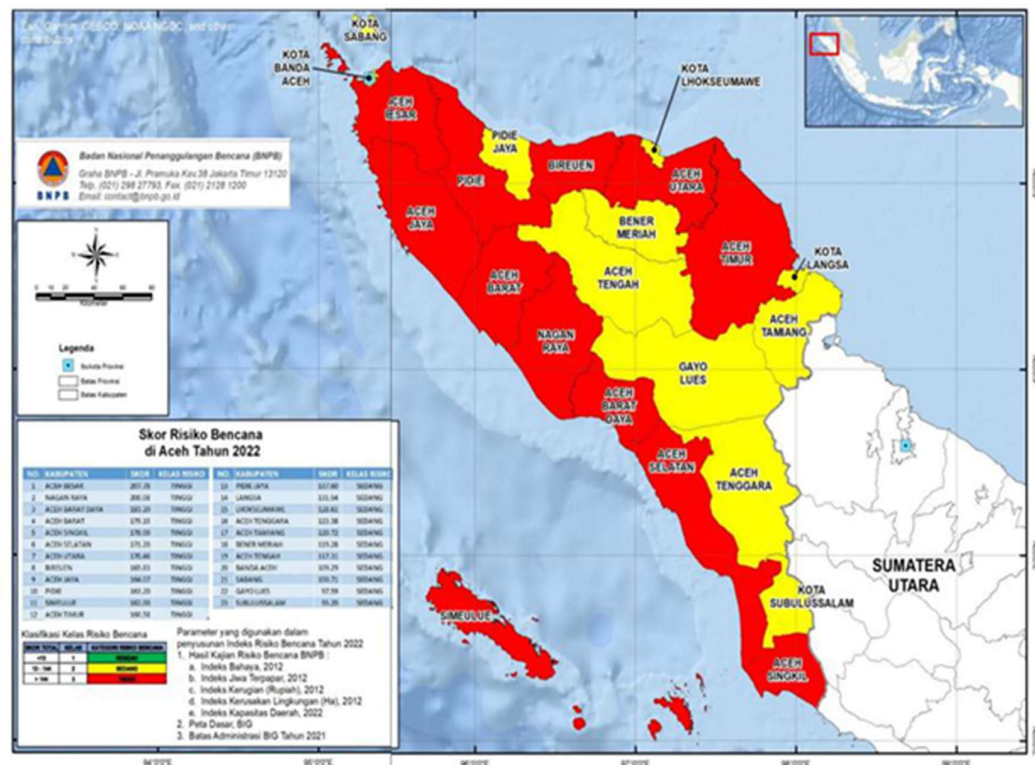
Berdasarkan catatan historis kebencanaan, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2009 hingga tahun 2019 dilaporkan sebanyak 1.038 kejadian bencana atau rata-rata 531 kejadian bencana per tahun. Sehingga potensi bencana di Aceh menjadi 15 jenis sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 1.20**.

Tabel 1.20 Potensi Bencana Aceh

No.	Jenis Bencana	No.	Jenis Bencana
1	Gempa Bumi	9	Kebakaran Hutan dan Lahan
2	Gunung Api	10	Angin Puting Beliung
3	Tsunami	11	Gelombang Pasang atau Badai
4	Tanah Longsor	12	Abrasi
5	Banjir	13	Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19)
6	Banjir Bandang	14	Likuifaksi
7	Kekeringan	15	Ledakan Sumur Minyak Masyarakat
8	Kebakaran		

Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, dan hasil Kajian Risiko Bencana Aceh Tahun 2020-2025

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat atau kategori risiko bencana di Indonesia, yaitu : kategori rendah (<36), sedang (36-144) dan tinggi (>144). Peta Indeks Rawan Bencana Aceh disajikan pada **Gambar 1.5**.



Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022

Gambar 1.5 Peta Indeks Rawan Bencana Aceh

Data tahun 2022 menunjukkan Provinsi Aceh memiliki tingkat risiko bencana tinggi mencapai 149,1. Sebaran IRB di Provinsi Aceh disajikan dalam gambar

di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di Aceh terkategori memiliki risiko tinggi (peta bergambar merah), sisanya sebanyak 10 wilayah Kabupaten/Kota tergolong berisiko sedang. Untuk itu perlu dilakukan upaya mitigasi, adaptasi, ketahanan tinggi, terstruktur, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar IRB di Provinsi diturunkan menjadi kategori rendah.

C. Jalur Pelayaran Internasional

Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia di Pulau Sumatera. Dengan ibu kota Banda Aceh, Provinsi Aceh memiliki posisi strategis di pintu masuk Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Secara geografis Provinsi Aceh memiliki posisi yang strategis yang diapit oleh dua samudera besar, serta berada dekat dengan jalur Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), wilayah ini menjadi lintasan utama bagi kapal-kapal yang berlayar lintas negara dan benua. Secara khusus, perairan Aceh juga berdekatan langsung dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kepadatan lalu lintas laut di kawasan ini menyebabkan tingginya risiko terjadinya kecelakaan kapal, seperti kebakaran di atas kapal, kapal karam atau tenggelam, kecelakaan kerja awak kapal atau Anak Buah Kapal (ABK), serta situasi membahayakan lainnya yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi.

Pelayaran kapal niaga internasional merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung arus perdagangan global (*World Trade*). Kegiatan ekspor dan impor dalam skala besar sangat bergantung pada sistem perkapalan yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Semakin tinggi intensitas ekspor suatu negara, maka akan semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kepastian dan keberlanjutan pelaksanaan perdagangan dunia menjadi hal yang vital. Komitmen terhadap hal ini juga tercantum dalam dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 serta Pilar Pembangunan Ekonomi SDGs versi Kementerian PPN/Bappenas (Kementerian PPN/ Bappenas, 2020).

Dalam konteks ini, keberadaan dan peran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh sangatlah penting. Mengingat posisi geografis Aceh yang strategis, dekat dengan Selat Malaka dan dilintasi jalur pelayaran internasional, potensi terjadinya kecelakaan kapal sangat tinggi. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh berperan krusial dalam menjaga keselamatan pelayaran dengan menyediakan layanan tanggap darurat terhadap kecelakaan laut, termasuk evakuasi medis awak kapal. Dukungan layanan Pencarian dan Pertolongan terhadap keselamatan pelayaran turut mendukung realisasi target SDGs, khususnya pada aspek pembangunan infrastruktur, peningkatan keselamatan kerja, dan keberlangsungan sistem logistik laut. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan layanan Pencarian dan Pertolongan menjadi bagian integral dari ekosistem perdagangan global yang berkelanjutan.

D. Industri dan Pertambangan

Provinsi Aceh memiliki potensi industri dan pertambangan yang cukup besar dan beragam. Keunggulan geografis, kekayaan sumber daya alam, serta dukungan kebijakan otonomi khusus menjadikan Aceh sebagai wilayah yang prospektif untuk pengembangan sektor industri dan ekstraktif. Beberapa kawasan industri yang berkembang antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, yang menjadi pusat pengolahan gas alam cair (LNG), pupuk, dan petrokimia, serta mendorong tumbuhnya industri turunan lainnya. Di sektor energi, Aceh juga memiliki potensi besar di bidang pembangkit listrik tenaga panas bumi, air, dan energi baru terbarukan, seperti yang dikembangkan di Seulawah (Aceh Besar) dan Jaboi (Sabang).

Untuk sektor pertambangan, Aceh menyimpan berbagai jenis komoditas mineral dan energi. Tambang emas di Beutong (Nagan Raya) dan Geumpang (Pidie) termasuk yang memiliki cadangan signifikan, sementara tambang batu bara di wilayah Aceh Barat dan Aceh Selatan telah dieksplorasi dan sebagian sudah berproduksi. Selain itu, wilayah laut Aceh bagian barat juga termasuk dalam wilayah eksplorasi migas lepas pantai Andaman I dan Andaman II, yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Jika proyek-proyek tersebut berhasil dikembangkan, diperkirakan akan terjadi peningkatan arus

logistik, lalu lintas kapal, serta masuknya tenaga kerja dalam jumlah besar ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya minim infrastruktur.

Situasi ini tentu menuntut kesiapsiagaan operasi Pencarian dan Pertolongan yang tinggi, terutama dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja di area tambang, insiden kapal logistik, ledakan pipa migas, maupun evakuasi medis di wilayah dengan akses sulit. Selain itu, pengawasan dan koordinasi lintas sektor, seperti dengan Kementerian ESDM, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, serta perusahaan-perusahaan migas dan tambang, perlu diperkuat. Dengan pendekatan ini, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh tidak hanya mampu merespons keadaan darurat, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem mitigasi risiko industri dan pertambangan yang berkelanjutan.

E. Transportasi

Provinsi Aceh memiliki jaringan transportasi yang relatif lengkap dan strategis, meliputi moda udara, laut, dan darat. Letaknya yang berada di ujung barat Indonesia menjadikan Aceh sebagai pintu gerbang masuk dari kawasan Selat Malaka dan Samudera Hindia, sekaligus penghubung antara wilayah barat dan tengah Indonesia. Keberadaan sarana transportasi ini sangat penting dalam mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta pengembangan sektor ekonomi dan pariwisata di wilayah Aceh.

Pada sektor transportasi udara, Aceh memiliki beberapa bandara yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Bandara utama adalah Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) di Blang Bintang, Aceh Besar, yang terhubung dengan beberapa kota besar di Indonesia dan negara tetangga. Selain itu, terdapat bandara perintis seperti Bandara Cut Nyak Dhien (Nagan Raya), Bandara Malikussaleh (Lhokseumawe), Bandara Rembele (Aceh Tengah), dan Bandara Lasikin (Sinabang) yang melayani kawasan terpencil dan kepulauan. Keberadaan bandara ini membuka akses transportasi dan logistik ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Di bidang transportasi laut, Aceh memiliki beberapa pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan yang tersebar di sepanjang garis pantai. Pelabuhan Ulee Lheue di Banda Aceh menjadi titik utama konektivitas ke Pulau Weh, sedangkan Pelabuhan Balohan di Sabang merupakan pelabuhan penumpang dan barang penting di kawasan kepulauan. Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Calang digunakan untuk angkutan barang dan distribusi logistik, sementara Pelabuhan Singkil menjadi gerbang laut untuk wilayah Aceh Singkil dan Kepulauan Banyak. Jaringan pelabuhan ini berperan vital dalam mendukung kegiatan ekonomi pesisir dan konektivitas antar wilayah.

Sarana transportasi darat di Aceh didukung oleh jalan nasional lintas barat, tengah, dan timur Sumatera, yang menghubungkan Kabupaten/Kota di Aceh serta menghubungkan Aceh dengan provinsi tetangga, Sumatera Utara. Di tingkat regional, jalan provinsi dan kabupaten menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan pedalaman. Meski demikian, beberapa wilayah masih menghadapi tantangan infrastruktur seperti kerusakan jalan, risiko longsor di dataran tinggi, serta keterbatasan jembatan di daerah terpencil. Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas dan perluasan jaringan jalan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di wilayah Aceh.

1.3.2 Tantangan

Di tengah berbagai peluang yang tersedia, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Tantangan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas, terutama pada jabatan strategis dan teknis Pencarian dan Pertolongan yang berperan langsung dalam operasi penyelamatan. Keterbatasan ini berdampak pada kecepatan, efektivitas, dan cakupan penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah yang cukup luas dan kompleks.

Sarana dan prasarana pendukung operasi Pencarian dan Pertolongan juga masih belum memadai, baik dari sisi jumlah, kondisi, maupun kesesuaian

dengan karakteristik wilayah. Minimnya peralatan Pencarian dan Pertolongan, keterbatasan kendaraan operasional, dan fasilitas di Pos SAR dan Unit Siaga SAR yang belum tersebar secara merata menjadi kendala signifikan dalam respons awal dan mobilisasi tim secara cepat.

Efisiensi anggaran juga menjadi tantangan yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan program, pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan, pengadaan peralatan, serta dukungan logistik operasional. Kondisi ini diperberat oleh luasnya wilayah kerja yang mencakup laut, perbukitan, dan daerah terpencil, yang memerlukan pendekatan operasi berbasis risiko dan dukungan logistik yang kuat.

Di sisi lain, tantangan dalam hal koordinasi lintas sektor, keterlibatan potensi Pencarian dan Pertolongan, serta kurangnya regulasi pendukung di tingkat daerah turut memperlambat proses sinergi dalam operasi Pencarian dan Pertolongan secara terpadu. Peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas layanan juga mendorong perlunya pembaruan sistem kerja, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan.

Dengan mengenali tantangan ini secara komprehensif, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dapat merumuskan strategi penguatan kelembagaan dan operasional yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan untuk menjawab dinamika tantangan ke depan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Visi, misi, sasaran dan arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus selaras dengan Visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Hal yang sama juga diberlakukan untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh, harus mempunyai visi dan misi yang selaras dengan visi dan misi lembaga (Basarnas) dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden.

2.1 VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2025-2029. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2025-2029.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), oleh karena itu visi dan misi yang diusung oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Basarnas secara nasional.

2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2025-2029 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN : BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”.

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh adalah mengemban visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu :

”MEWUJUDKAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH YANG PROFESIONAL, SINERGI, DAN MILITAN DALAM PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN”.

Visi ini memiliki tiga pilar utama, yaitu :

- a. **Profesional**, yaitu Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh berkomitmen untuk meningkatkan keahlian, kemampuan, dan standar operasional personil agar mampu memberikan pelayanan Pencarian dan Pertolongan yang cepat, tepat, dan efektif.
- b. **Sinergi**, yaitu Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi Pemerintah, TNI/Polri, Potensi Pencarian dan Pertolongan serta

masyarakat. Sinergi ini bertujuan untuk membentuk sistem Pencarian dan Pertolongan yang terpadu dan efisien.

- c. **Militan**, yaitu setiap personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh memiliki semangat juang yang tinggi, tidak mudah menyerah, dan selalu siap siaga 24 jam untuk menjalankan tugas kemanusiaan.

2.1.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta penjabaran dari Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, maka ditetapkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Misi 1 (M.1) Menyelenggarakan Pencarian dan Pertolongan yang andal, efektif, terintegrasi dan terkoordinir antar lembaga secara efisien, berstandar internasional, serta mitigasi, kesiapsiagaan dan operasi pada kecelakaan, bencana maupun kejadian yang membahayakan manusia.

Misi 2 (M.2) Meningkatkan manajemen penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan yang terlatih dan berpengalaman, pendanaan yang cukup serta kelembagaan yang kuat.

Misi ke-1 (M.1) merupakan Misi Eksternal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyelenggarakan layanan publik berupa operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat terjadi kecelakaan, bencana, maupun kejadian yang membahayakan manusia. Layanan Pencarian dan Pertolongan tersebut dilakukan secara efektif (dengan tingkat keberhasilan operasi yang tinggi), terintegrasi dan terkoordinir (memadukan seluruh potensi Pencarian dan Pertolongan), dan berstandar internasional (sesuai dengan SOP yang berlaku secara internasional). Di samping itu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai bagian dari

upaya pencegahan untuk meminimalisir korban dalam kecelakaan, bencana, maupun kejadian yang membahayakan manusia.

Misi ke-2 (M.2) merupakan Misi Internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam meningkatkan manajemen penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui beberapa aspek pokok, yakni :

- 1) Pemenuhan kebutuhan (jumlah, kompetensi, dan penempatan) SDM baik tenaga internal maupun potensi Pencarian dan Pertolongan;
- 2) Optimalisasi pengintegrasian seluruh potensi;
- 3) Penguatan kerangka regulasi berupa pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pedoman dan SOP;
- 4) Kelembagaan berupa pembentukan organisasi yang efektif; dan
- 5) Pendanaan yang mencukupi.

Selanjutnya, Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Adapun misi yang dimaksud adalah :

1. Menyelenggarakan kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan guna memonitor, mengawasi, mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.
2. Menyelenggarakan operasi Pencarian dan Pertolongan yang efektif dan efisien melalui tindak awal yang maksimal serta pengerahan potensi Pencarian dan Pertolongan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, fasilitas Pencarian dan Pertolongan yang memadai dan prosedur kerja yang mantap.
3. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan berperan aktif dalam membimbing, melatih, serta bekerja sama dengan potensi Pencarian dan Pertolongan guna memiliki kemampuan yang memadai dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH

2.2.1 Tujuan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

Berikut ini adalah tujuan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh yang diselaraskan dengan Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan :

- T.1 Terselenggaranya layanan Pencarian dan Pertolongan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.
- T.2 Terjalinnnya koordinasi dengan instansi nasional dan internasional serta terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan keterampilan SAR dalam rangka memaksimalkan potensi SAR.
- T.3 Terciptanya standar dan kualitas kompetensi sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan yang andal dan profesional.
- T.4 Terselenggaranya dukungan manajemen untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui perencanaan organisasi dan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, layanan umum, hukum, hubungan masyarakat, pelatihan, teknologi informasi, serta pengawasan kelembagaan yang akuntabel dan berintegritas.

2.2.2 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

Rumusan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC). Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan Sasaran Kegiatan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029 dituangkan dalam peta strategis. Peta strategis merupakan visualisasi dari sasaran kegiatan yang disusun dalam rangka hubungan dengan tujuan dan perspektif guna mencapai visi misi suatu organisasi.



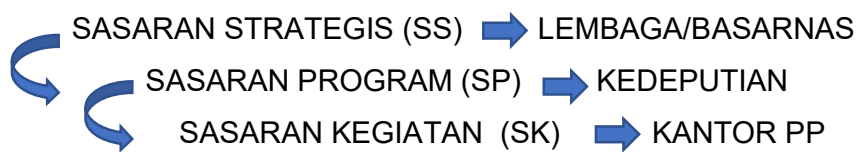
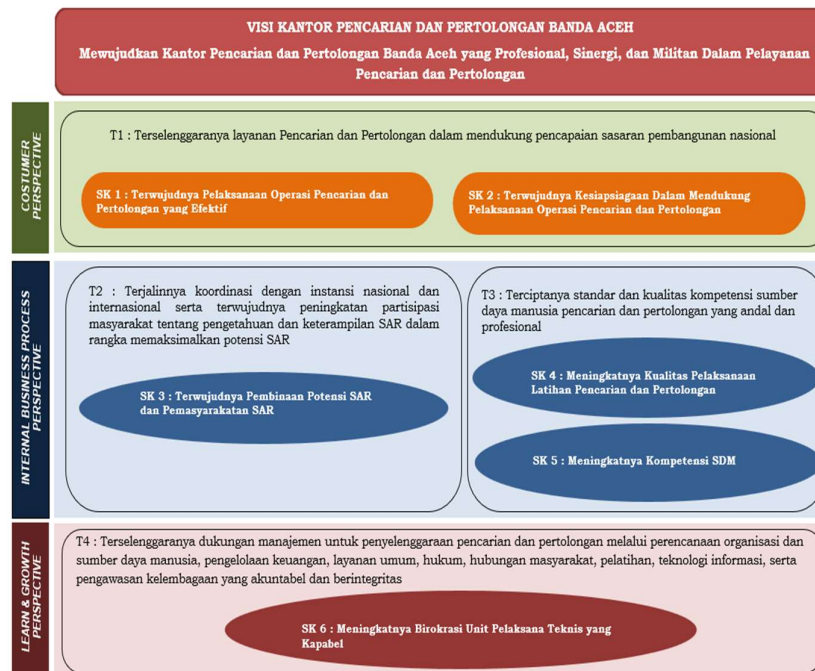
Gambar 2.1 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029

Pada **Gambar 2.1** di atas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh, sasaran tersebut harus diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputan, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Sasaran Strategis Basarnas



Sasaran Program (SP) Kedeputan diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan (SK) Kantor Pencarian dan Pertolongan



Berdasarkan Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh di atas, di dalam BSC Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh untuk periode 2025-2029 ditetapkan Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut :

- SK1 : Terwujudnya pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan yang efektif
- SK2 : Terwujudnya kesiapsiagaan dalam mendukung pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan
- SK3 : Terwujudnya pembinaan potensi SAR dan masyarakat SAR
- SK4 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan latihan Pencarian dan Pertolongan
- SK5 : Meningkatkan kompetensi SDM
- SK6 : Meningkatkan birokrasi unit pelaksana teknis yang kapabel

Keenam Sasaran Kegiatan di atas dapat dijelaskan dalam tiap perspektif *Balanced Scorecard* sebagai berikut :

1. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)

Dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan, *Customer Perspective* mengacu pada cara pandang pihak yang membutuhkan layanan Pencarian dan Pertolongan, yaitu para korban, keluarga korban, dan masyarakat luas terhadap kinerja dan layanan yang diberikan oleh tim Pencarian dan Pertolongan. Tujuan utama dari *Customer Perspective* ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasi Pencarian dan Pertolongan ini tidak hanya berhasil mencapai tujuan menemukan dan evakuasi korban tetapi juga memenuhi harapan, kebutuhan, dan kepuasan masyarakat akan layanan Pencarian dan Pertolongan.

Dari *Customer Perspective*, menggambarkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh memberikan pelayanan dalam bentuk penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan diukur melalui tingkat kepuasan pemangku kepentingan. Sehingga pada perspektif ini sasaran kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh yang berkaitan dengan :

- (1) TERWUJUDNYA PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG EFEKTIF. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan ini adalah :

- IKSK1 Waktu tanggap (*response time*) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan
- IKSK2 Waktu tempuh pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan
- IKSK3 Persentase keberhasilan evakuasi korban Pencarian dan Pertolongan
- IKSK4 Indeks kepuasan masyarakat pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan

(2) TERWUJUDNYA KESIAPSIAGAAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan ini adalah :

- IKSK5 Indeks kesiapsiagaan

Sasaran kegiatan ini berkaitan dengan Tujuan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh yang pertama (T.1) yaitu “Terselenggaranya layanan Pencarian dan Pertolongan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional”.

2. Perspektif Proses Bisnis Internal (*Internal Business Process*)

Pada *Balanced Scorecard (BSC)*, perspektif *Internal Business Process* ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas operasional sebuah organisasi. Dalam konteks Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh, perspektif ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses internal yang terkait dengan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan, latihan Pencarian dan Pertolongan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia berjalan secara optimal untuk mendukung visi dan misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.

Secara keseluruhan *Internal Business Process* ini memastikan bahwa seluruh aktivitas internal Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh berjalan sinergi dan terintegrasi, hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional

tetapi juga memperkuat fondasi organisasi untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Sehingga pada perspektif ini sasaran kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh yang berkaitan dengan :

- (1) TERWUJUDNYA PEMBINAAN POTENSI SAR DAN PEMASYARAKATAN SAR. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan ini adalah :

IKSK6 Persentase pelaksanaan pembinaan potensi SAR dan pemasyarakatan SAR

- (2) MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN LATIHAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan ini adalah :

IKSK7 Nilai latihan Pencarian dan Pertolongan

- (3) MENINGKATNYA KOMPETENSI SDM. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan ini adalah :

IKSK8 Persentase terpeliharanya kompetensi tenaga SAR

IKSK9 Persentase non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi

Sasaran kegiatan yang pertama di perspektif ini berkaitan dengan Tujuan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh yang kedua (T.2) yaitu “Terjalinnya koordinasi dengan instansi nasional dan internasional serta terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan keterampilan SAR dalam rangka memaksimalkan potensi SAR”. Sedangkan Sasaran kegiatan yang kedua dan ketiga di perspektif ini berkaitan dengan Tujuan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh yang ketiga (T.3) yaitu “Terciptanya standar dan kualitas kompetensi sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan yang andal dan profesional”.

3. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (*Learn and Growth Perspective*)
- Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan ini berfokus pada kapasitas internal organisasi mencakup penyediaan SDM yang profesional, pengelolaan rencana program, evaluasi pelaporan dan pengelolaan keuangan, pengelolaan administrasi, perlengkapan, kehumasan, dan protokol, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pengelolaan layanan internal lainnya. Sehingga pada perspektif ini sasaran kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh yang berkaitan dengan MENINGKATNYA BIROKRASI UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG KAPABEL. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan ini adalah :

IKSK10 Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

IKSK11 Hasil Survey Layanan Internal

IKSK12 Nilai Kearsipan

IKSK13 Nilai SAKIP

Sasaran kegiatan ini berkaitan dengan Tujuan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh yang keempat (T.4) yaitu “Terselenggaranya dukungan manajemen untuk penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan melalui perencanaan organisasi dan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, layanan umum, hukum, hubungan masyarakat, pelatihan, teknologi informasi, serta pengawasan kelembagaan yang akuntabel dan berintegritas”.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH

Arah kebijakan dan strategi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029 pada dasarnya akan merujuk dan menjadi turunan dari Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029. Berdasarkan visi Basarnas yang telah disampaikan pada Bab II, maka Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh yang bertanggung jawab di wilayah Aceh yang rawan akan kecelakaan/bencana akan memfokuskan kebijakan dan strategi pada 3 (tiga) permasalahan utama yang disampaikan pada **Tabel 3.1** berikut ini :

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029

No	Permasalahan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
1.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	1. Penyusunan Peta Kebutuhan Sumber Daya Manusia Berbasis Analisis Jabatan, Beban Kerja, dan Cakupan Wilayah Operasi Pencarian dan Pertolongan. 2. Menjalinkan kerja sama dengan Lembaga atau Institusi Pendidikan dan Perguruan Tinggi terkait Edukasi, Mitigasi, hingga Program Magang Kerja. 3. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi Potensi Pencarian dan Pertolongan	1. Pengusulan Kebutuhan Pegawai pada Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Basarnas melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun melalui Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CP3K). 2. Pemanfaatan tenaga magang dari sekolah SMK, SMA/ sederajat, atau Sekolah Pelayaran yang memiliki program magang kerja ke Instansi Pemerintah maupun Perusahaan Swasta. 3. Memberdayakan dan melibatkan Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan.

No	Permasalahan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		Dalam Setiap Operasi Pencarian dan Pertolongan.	
2.	Keterbatasan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	1. Penyusunan Analisis Kebutuhan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Standar Pemenuhan Kebutuhan dan menyesuaikan teknologi terkini, canggih, dan modern. 2. Mempererat kolaborasi dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Swasta, maupun Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam hal kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan di wilayah Aceh.	1. Pengusulan kebutuhan pengadaan sarana, prasarana, dan peralatan Pencarian dan Pertolongan melalui mekanisme Pagu Kebutuhan RKA/K-L setiap awal tahun pada Biro Perencanaan dan Keuangan Basarnas. 2. Mengupayakan penambahan sarana, prasarana, dan peralatan Pencarian dan Pertolongan melalui mekanisme Hibah berupa aset yang dapat dimanfaatkan guna mendukung operasional Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dari Pemerintahan Daerah, Swasta, organisasi ataupun institusi donor lainnya.
3.	Terbatasnya Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kapasitas Pegawai	1. Pemerataan pengembangan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi. 2. Pengembangan sistem pembinaan karir dan manajemen talenta bagi pegawai.	1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi SDM secara mandiri yang diadakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dengan melakukan pemetaan kompetensi pegawai terlebih dahulu secara berkala. 2. Memanfaatkan data dan profil kompetensi pegawai yang tertuang dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Talenta guna pengembangan karir pegawai.

3.1.1 Program dan Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dengan tugas dan fungsi utama melakukan Pencarian dan Pertolongan yang terkait dengan kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, memiliki 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Teknis, yaitu Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana. Program ini menaungi semua kegiatan teknis yang perlu dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam kaitan dengan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang yaitu melakukan Pencarian dan Pertolongan.

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh mencakup unit kerja Seksi Operasi dan Siaga SAR dan Seksi Sumber Daya dengan Sasaran Kegiatan (output) yaitu :

Tabel 3.2 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	Pengadaan Sarana SAR
		Pengadaan Peralatan SAR
		Pengadaan Prasarana SAR
		Pembangunan Prasarana SAR
		Pemeliharaan Sarana SAR
		Pemeliharaan Prasarana SAR
2	Pembinaan Tenaga SAR	Pelaksanaan Kompetensi Tenaga SAR yang Dipelihara
3	Pengelolaan Operasi SAR	Pelaksanaan Dukungan Operasi SAR
		Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR
4	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	Pengadaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR
		Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR
5	Pembinaan Potensi SAR	Pelaksanaan Pemasyarakatan SAR (<i>SAR Goes to School</i>)
		Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)
		Pencarian dan Pertolongan (Penyuluhan Kepramukaan)
		Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan (Pemberdayaan Kelompok Masyarakat)
6	Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	Pelaksanaan Latihan SAR Kantor SAR
		Pelaksanaan Latihan SAR Beregu
		Pelaksanaan Latihan SAR Satuan
		Pelaksanaan Siaga SAR Kantor SAR
		Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Lebaran
		Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Nataru
7	Pengelolaan Diklat SAR	Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR
		Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR
8	Pengelolaan Teknologi Informasi SAR	Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi

2. Program Generik, yaitu Program Dukungan Manajemen. Semua kegiatan yang sifatnya mendukung kegiatan teknis Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh tercakup dalam program generik ini.

Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh mencakup unit kerja Sub Bagian Umum, dengan Sasaran Kegiatan (output), yaitu :

Tabel 3.3 Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)
1	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan	Gaji dan Tunjangan
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor
		Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
		Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
		Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
2	Penyusunan Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pengelolaan Kepegawaian
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3	Pengelolaan Administrasi,	Penyelenggaraan Kehumasan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)
	Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Pelaksanaan Keprotokoleran
		Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor
		Pengelolaan Persuratan/ Kearsipan dan Dokumen Lainnya
4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Bermotor
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
		Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
		Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan
		Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan
5	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi

3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

Tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB II, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 4 (empat) Tujuan dan 6 (enam) Sasaran Kegiatan terdapat 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja

Kegiatan dengan metode SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound*), yaitu :

1. *Specific*, dimaksudkan bahwa indikator kinerja yang baik harus spesifik dan jelas, menggambarkan dengan rinci apa yang ingin dicapai.
2. *Measurable*, dimaksudkan bahwa setiap indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat diukur.
3. *Achievable*, dimaksudkan bahwa indikator kinerja haruslah realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada, namun tetap menantang (*challenging*).
4. *Relevant*, dimaksudkan bahwa indikator kinerja harus relevan dengan tugas pokok dan fungsi serta tujuan instansi/unit kerja.
5. *Time Bound*, dimaksudkan bahwa indikator kinerja harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu dengan pencapaian yang jelas (bulanan, triwulan, tahunan).

Pada **Tabel 3.4** disampaikan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029.

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
T.1	Terselenggaranya layanan Pencarian dan Pertolongan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional	SK.1	Terwujudnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif	1	Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	Menit	S (Specific) Waktu tanggap adalah waktu yang digunakan Basarnas untuk mengukur seberapa cepat, tepat, aman, dan respon yang terkoordinasi untuk menangani operasi pencarian dan pertolongan. Sesuai dengan Perban No 6 Tahun 2022, bahwa batas waktu respons telah ditentukan paling lama 25 menit mulai dari mencatat data pelapor dan informasi kejadian, sampai dengan pemberangkatan SRU (<i>Search and Rescue Unit</i>), serta dapat dipercepat secara simultan. Selama maksimal 25 menit, Basarnas sudah harus mencatat data dan informasi kejadian dari pelapor, melapor kepada pimpinan, pencarian dengan komunikasi awal, mengecek kebenaran informasi, Untuk itu, diperlukan dukungan dari personil, peralatan, deteksi dini, telekomunikasi dan sistem informasi, serta sarana dan prasarana yang memadai. M (Measurable) Waktu respons dapat diukur dengan menghitung rata-rata waktu (dalam satuan menit) saat berita diterima Basarnas sampai dengan waktu yang diperlukan untuk memastikan SRU dalam kondisi siap untuk dikerahkan. SRU harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) khusus agar waktu yang digunakan untuk meluncur ke lokasi kejadian dapat dimaksimalkan terutama dalam mempersiapkan personil, peralatan, dan logistik. Penjelasan tersebut dapat dirumuskan dengan formula berikut ini : Waktu Tanggap = Rata-rata (T1-T0) T1 = Waktu SRU siap berangkat

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
							T0 = Waktu Terima Berita A (Achievable) Data waktu respon pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan dapat diperoleh melalui Aplikasi QR SAR yang dicatat/diarsipkan oleh Petugas Siaga Komunikasi. R (Relevant) Waktu respon yang cepat menunjukkan efektivitas Basarnas dalam menangani operasi pencarian dan pertolongan. Semakin singkat <i>response time</i> semakin tinggi peluang keberhasilan operasi. T (Time-Bound) Penilaian Waktu respon dilakukan setiap pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
				2	Waktu tempuh pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	Menit	S (Specific) Waktu tempuh adalah jangka waktu yang dihitung sejak SRU dikerahkan sampai dengan tiba di lokasi kejadian. Waktu tempuh memerlukan dukungan personel, telekomunikasi dan sarana yang memadai. Waktu tempuh sangat ditentukan oleh jarak, kecepatan, kondisi lalu lintas dan jalan, rute yang dipilih, hingga faktor cuaca. Sesuai Perban Nomor 6 Tahun 2022 batas waktu tempuh telah ditentukan paling lama 150 menit serta dapat dipercepat secara simultan. M (Measurable) Waktu tempuh dapat diukur dengan menghitung rata-rata waktu (dalam satuan menit) saat SRU siap untuk dikerahkan hingga waktu SRU tiba di Lokasi. Penjelasan

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
							tersebut dapat dirumuskan dengan formula berikut ini : Waktu Tempuh = Rata-rata (T2-T1) T2 = Waktu SRU tiba di lokasi T1 = Waktu SRU dikerahkan A (Achievable) Data waktu tempuh pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan dapat diperoleh melalui Aplikasi QR SAR yang dicatat/diarsipkan oleh Petugas Siaga Komunikasi. R (Relevant) Waktu tempuh Basarnas yang optimal dapat memberikan gambaran efektivitas dari penanganan operasi pencarian dan pertolongan. Indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin singkat waktu yang ditempuh SRU sejak dikerahkan hingga tiba di lokasi, maka semakin tinggi peluang keberhasilan Operasi pencarian dan pertolongan. T (Time-Bound) Penilaian Waktu tempuh dilakukan setiap pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
				3	Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan	%	S (Specific) Keberhasilan evakuasi korban dapat dilihat melalui jumlah korban jiwa yang dapat dievakuasi dalam Operasi pencarian dan pertolongan baik dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana.

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
							M (Measurable) Keberhasilan evakuasi korban dapat diukur dengan menghitung persentase korban jiwa yang dapat dievakuasi yaitu dengan membandingkan jumlah korban yang selamat maupun meninggal dengan total korban. Penjelasan tersebut dapat dirumuskan dengan formula berikut ini: $\% \text{ Jumlah Korban terevakuasi} = \frac{\sum \text{Korban terevakuasi (Selamat dan meninggal)}}{\text{Total Korban}} \times 100\%$ A (Achievable) Persentase keberhasilan evakuasi korban pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan dapat diperoleh melalui Aplikasi QR SAR yang dicatat/diarsipkan oleh Petugas Siaga Komunikasi. R (Relevant) Persentase keberhasilan evakuasi korban dapat optimal melalui penanganan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien. Sehingga, indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin banyak korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal, maka semakin meningkat persentase keberhasilannya. T (Time-Bound) Penilaian kepuasan atas keberhasilan evakuasi korban dilakukan setiap waktu.
				4	Indeks Kepuasan Masyarakat pada penanganan operasi pencarian dan	Nilai (1-100)	S (Specific) Indeks kepuasan masyarakat adalah nilai hasil survei yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Basarnas dalam penanganan operasi pencarian

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					pertolongan		dan pertolongan. Indeks ini melibatkan penilaian masyarakat mengenai kecepatan, profesionalisme, kesiapan, dan koordinasi Basarnas dalam pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan. M (Measurable) Indeks kepuasan masyarakat dapat diukur melalui survei yang dirancang untuk mendapatkan penilaian dari masyarakat mengenai pengalaman mereka terhadap layanan yang diberikan Basarnas dalam penanganan operasi pencarian dan pertolongan. A (Achievable) Indeks kepuasan masyarakat Basarnas pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan dapat diperoleh melalui Hasil Survei yang direkapitulasi dan dilaporkan oleh Seksi Operasi dan Siaga. R (Relevant) Indeks kepuasan masyarakat Basarnas dapat optimal melalui penanganan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien. Sehingga, indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi nilai indeks kepuasan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan operasi pencarian dan pertolongan. T (Time-Bound) Penilaian atas indeks kepuasan masyarakat Basarnas dilakukan setiap selesai pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan.

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
		SK.2	Terwujudnya Kesiapsiagaan dalam Mendukung Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	5	Indeks Kesiapsiagaan	Nilai (1-100)	S (Specific) Indeks kesiapsiagaan adalah nilai yang menggambarkan tingkat kesiapsiagaan dan kemampuan dari Basarnas dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Komponen yang digunakan untuk menilai indeks kesiapsiagaan Basarnas dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yaitu melalui perbandingan dari 3 aspek, yaitu ketersediaan petugas siaga, kualifikasi petugas siaga dan kesiapan sarana sesuai Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan. M (Measurable) Indeks kesiapsiagaan Basarnas dapat diukur dengan mempertimbangkan hasil persentase dari ketersediaan petugas siaga, kualifikasi petugas siaga dan kesiapan sarana dengan satuan nilai 1 sampai dengan 100. Formula yang digunakan adalah, sebagai berikut: % ketersediaan petugas siaga = (Jumlah Petugas Siaga/ Jumlah Standar Petugas Siaga) x 100% (Bobot 30%) % kualifikasi petugas siaga = (Jumlah petugas siaga sesuai kualifikasi/ Jumlah Standar kualifikasi Petugas Siaga) x 100% (Bobot 30%) % kesiapan sarana = (Jumlah Hari <i>Serviceable</i>/ 365 hari) x 100% (Bobot 40%) A (Achievable) Indeks kesiapsiagaan Basarnas dalam mendukung

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
							pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dapat diperoleh melalui formulir perhitungan Indeks kesiapsiagaan dari Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya dan Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga. R (Relevant) Indeks kesiapsiagaan Basarnas yang optimal dapat mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan secara efektif dan efisien. Indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi ketersediaan personel dan kualifikasi petugas siaga serta kesiapan sarana maka semakin meningkat persentase kesiapsiagaan Basarnas. T (Time-Bound) Penilaian atas indeks kesiapsiagaan Basarnas dilakukan setiap bulan.
T.2	Terjalannya koordinasi dengan instansi nasional dan internasional serta terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan keterampilan SAR dalam rangka memaksimalkan potensi SAR	SK.3	Terwujudnya Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan dan Pemasarakatan Pencarian dan Pertolongan	6	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan dan Pemasarakatan Pencarian dan Pertolongan	%	S (Specific) Pembinaan Potensi SAR dan Pemasarakatan SAR adalah upaya memperkuat kapasitas serta efektivitas tim untuk memaksimalkan respon cepat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan dan pendidikan, penguatan infrastruktur, simulasi dan latihan bersama, sosialisasi, kerjasama dengan pihak terkait, hingga evaluasi dan peningkatan kapasitas. Pembinaan Potensi SAR dan Pemasarakatan SAR menggunakan anggaran dan non anggaran terhadap Potensi dan Masyarakat yang meliputi Institusi TNI/Polri, Instansi Pemerintah, perusahaan, Organisasi Mahasiswa/ Relawan dan anak sekolah.

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
							M (Measurable) Tingkat keberhasilan indikator ini diukur melalui hasil perbandingan jumlah pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan dengan target pembinaan. Penjelasan tersebut dapat dirumuskan dengan formula berikut ini: % Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR = $\frac{\sum \text{Pelaksanaan Pembinaan}}{\sum \text{Target Pembinaan}} \times 100\%$ A (Achievable) Persentase pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR diperoleh dari laporan pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR yang disusun oleh Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya. R (Relevant) Pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR yang optimal dapat meningkatkan penanganan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien. Sehingga, indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi nilai persentase pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR, maka semakin meningkat kekuatan sumber daya dalam mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan. T (Time-Bound) Penilaian atas pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR dilakukan setiap triwulan.

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
T.3	Terciptanya standar dan kualitas kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan yang andal dan profesional	SK.4	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	7	Nilai Latihan Pencarian dan Pertolongan	Nilai (1-100)	S (Specific) Nilai latihan pencarian dan pertolongan adalah nilai pelaksanaan latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan personel, serta efektivitas dalam menangani operasi pencarian dan pertolongan. Nilai ini diperoleh dengan mempertimbangkan perbandingan 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu kualifikasi peserta latihan, ketersediaan sarana dan prasarana Latihan dan kesesuaian prosedur Latihan. M (Measurable) Nilai latihan pencarian dan pertolongan diukur dari rata-rata hasil penjumlahan nilai kualifikasi peserta latihan, ketersediaan sarana dan prasarana latihan dan kesesuaian prosedur Latihan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesiapsiagaan. Penjelasan perhitungan dirumuskan dengan formula berikut : Nilai Latihan pencarian dan pertolongan = (kualifikasi peserta latihan + ketersediaan sarana dan prasarana Latihan + kesesuaian prosedur Latihan)/ 3 A (Achievable) Nilai Latihan pencarian dan pertolongan diperoleh dari penilaian yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesiapsiagaan. R (Relevant) Latihan pencarian dan pertolongan yang optimal dapat meningkatkan penanganan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien. Sehingga, indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi nilai latihan pencarian dan pertolongan, maka semakin tinggi kualitas

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
							sumber daya dalam mendukung operasi pencarian dan pertolongan. T (Time-Bound) Penilaian latihan pencarian dan pertolongan dilakukan setelah kegiatan Latihan dilaksanakan yang diterbitkan Direktorat Kesiapsiagaan.
		SK.5	Meningkatnya Kompetensi SDM Pencarian dan Pertolongan	8	Persentase terpeliharanya Kompetensi Tenaga SAR	%	S (Specific) Memelihara kompetensi tenaga SAR sangat penting untuk menilai efektivitas pelatihan, pendidikan, dan pembinaan yang diberikan kepada personel SAR. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh tenaga SAR Basarnas. Tenaga SAR yang dimaksud meliputi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan (PKPP), Instruktur, Pranata Pencarian dan Pertolongan (Rescuer), Pengelola Layanan Kesehatan, Pengelola Pencarian dan Pertolongan, Pengelola Layanan Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Kendaraan dan awak sarana laut. M (Measurable) Persentase pemeliharaan kompetensi tenaga SAR dihitung dari setiap kegiatan yang dilakukan Seperti Pembelajaran Rutin, kesamaptaan dan Uji Periodik. % Pemeliharaan kompetensi tenaga SAR = % Rescuer = (Jumlah Kehadiran Rescuer yang mengikuti kesamaptaan dan pembelajaran teknis dan lulus ujian periodik kesamaptaan dan pembelajaran teknis/ Jumlah Rescuer x 100% (Bobot 70%)

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
							% Non Rescuer = (Jumlah kehadiran Non Rescuer yang mengikuti kesamaptaan dan lulus uji periodik kesamaptaan/ Jumlah Non Rescuer) x 100% (Bobot 30%) A (Achievable) Persentase terpeliharanya kompetensi tenaga SAR untuk meningkatnya kompetensi SDM diperoleh melalui laporan hasil pembinaan tenaga SAR yang disusun oleh Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya. R (Relevant) Kompetensi tenaga SAR yang terpelihara dengan optimal dapat menjaga kualitas kompetensi tenaga SAR Basarnas. Indikator ini menggambarkan semakin tinggi nilai persentase terpeliharanya kompetensi tenaga SAR, maka tenaga SAR semakin handal untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan. T (Time-Bound) Penilaian pemeliharaan kompetensi SAR dilakukan setiap 6 Bulan.
				9	Persentase non Tenaga SAR yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	S (Spesific) Selain tenaga SAR, menghitung persentase non tenaga SAR juga terhitung penting. Meskipun mereka bukan bagian dari tim inti yang terjun langsung dalam operasi pencarian dan pertolongan, mereka tetap memiliki kontribusi besar dalam mendukung kelancaran operasional SAR. Kontribusi yang dimaksud antara lain adalah meningkatkan efisiensi dan koordinasi, kesiapsiagaan yang lebih baik, peningkatan kualitas kerja tim, meningkatkan keamanan, sampai dengan peningkatan profesionalisme.

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
							Non-tenaga SAR mencakup berbagai peran pendukung, seperti Pejabat Struktural, Arsiparis, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Pranata Humas, Pranata Komputer, dan pemangku jabatan umum lainnya yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam 1 tahun. M (Measurable) Untuk menghitung persentase non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi diukur melalui hasil perbandingan dari jumlah non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP selama 1 tahun dengan jumlah non tenaga SAR. Penjelasan tersebut sesuai dengan formula berikut ini: % pengembangan kompetensi non tenaga SAR = $\frac{\sum \text{Non tenaga SAR yang memenuhi 20 JP dalam 1 tahun}}{\sum \text{Non Tenaga SAR}} \times 100$ A (Achievable) Persentase non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi diperoleh melalui laporan pembinaan non tenaga SAR yang disusun oleh Sub Bagian Umum/ Urusan Umum. R (Relevant) Non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi diperlukan guna mengoptimalkan kompetensi SDM non Tenaga SAR di lingkungan Basarnas. Sehingga, semakin tinggi angka persentase non tenaga SAR yang

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
							memenuhi minimal 20 JP, maka semakin meningkat kompetensi SDM non tenaga SAR Basarnas. T (Time-Bound) Penilaian terhadap non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi dilakukan setiap triwulan.
T.4	Terselenggaranya dukungan manajemen untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui perencanaan organisasi dan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, layanan umum, hukum, hubungan masyarakat, pelatihan, teknologi informasi, serta pengawasan kelembagaan yang akuntabel dan berintegritas	SK.6	Meningkatnya Birokrasi Unit Pelaksana Teknis yang Kapabel	10	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Nilai (1-100)	S (Specific) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah sebuah matrik yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran. NKA ini menjadi tolak ukur dalam menilai perencanaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). M (Measurable) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diperoleh dari perhitungan hasil perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Adapun indikator yang digunakan untuk menilai perencanaan anggaran adalah capaian realisasi output (CRO), penggunaan SBK dan Efisiensi SBK. Selanjutnya indikator untuk menilai pelaksanaan anggaran adalah revisi DIPA, belanja kontraktual, dispensasi SPM, deviasi halaman 3 DIPA, penyelesaian tagihan, capaian output, penyerapan anggaran, dan pengelolaan UP dan TUP. A (Achievable) Nilai kerja anggaran (NKA) Basarnas diperoleh melalui Aplikasi Monev Kementerian Keuangan RI. R (Relevant) Kinerja anggaran Basarnas yang optimal dapat membantu menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kualitas

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
							perencanaan dan penggunaan anggaran. Indikator ini menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai kinerja anggaran, maka menunjukkan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan efisien. T (Time-Bound) Nilai kinerja anggaran Basarnas diperoleh setiap bulan.
				11	Hasil Survei Layanan Internal	Nilai (1-100)	S (Specific) Hasil survey layanan internal merupakan gambaran dari hasil pengukuran tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh Basarnas kepada pegawai di lingkungan kantor pencarian dan pertolongan. Beberapa aspek utama penilaiannya antara lain terkait efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan yang meliputi kepuasan terhadap fasilitas dan sumber daya, kepuasan terhadap proses pelatihan dan pengembangan, komunikasi dan koordinasi internal, kepuasan terhadap manajemen dan kepemimpinan, ketersediaan dan penggunaan anggaran, kepuasan terhadap dukungan teknologi dan sistem informasi, hingga budaya kerja dan kepuasan layanan umum lainnya. Hasil survei selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta untuk merumuskan kebijakan maupun program berkelanjutan guna meningkatkan kinerja layanan internal. M (Measurable) Hasil survei layanan internal diukur dengan terlebih dahulu menentukan indikator layanan umum yang relevan dengan tujuan survei beserta skala likert atau rating dan peringkat. Kemudian data survei dapat dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap standar atau target yang telah

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
							ditentukan. Selanjutnya hasil analisis dapat dirangkum menjadi sebuah laporan hasil survei yang jelas dan mudah dipahami. Hasil survei layanan internal diukur menggunakan satuan nilai 1 sampai dengan 100. A (Achievable) Hasil survei layanan internal diperoleh melalui Laporan hasil survei layanan internal yang disusun oleh Sub Bagian Umum/ Urusan Umum. R (Relevant) Hasil survei layanan internal yang optimal dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap tingkat kepuasan, efektifitas dan efisiensi layanan umum. Indikator ini menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai hasil survei layanan internal, maka semakin berkualitas layanan umum internal yang tersedia. T (Time-Bound) Penilaian hasil survei layanan internal dilakukan setiap triwulan.
				12	Nilai Kearsipan	Nilai (1-100)	S (Spesific) Nilai Kearsipan diperoleh dari pengawasan kearsipan mencakup penilaian terhadap berbagai aspek pengelolaan arsip, termasuk kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang berlaku. M (Measurable) Nilai kearsipan dinilai melalui Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) meliputi aspek pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan dengan klasifikasi sebagai

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
							berikut : (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang A (Achievable) Nilai kearsipan diperoleh dari Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) dari Biro Hubungan Masyarakat dan Umum R (Relevant) Nilai kearsipan yang optimal dapat menunjukkan pengelolaan arsip yang berjalan tertib, sistematis, aman dan sesuai kaidah peraturan yang berlaku. Indikator ini menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai kearsipan, maka mencerminkan tata Kelola arsip dilakukan dengan baik, tranparansi dan akuntabel. T (Time-Bound) Penilaian kearsipan dilakukan setiap tahun.
				13	Nilai SAKIP	Nilai (1-100)	S (Spesific) Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
							akuntabilitas UPT. Nilai SAKIP memberikan gambaran tentang seberapa efektif instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sejauh mana menjalankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam kinerjanya. Sistem ini mendukung proses perbaikan berkelanjutan, sehingga kinerja semakin optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. M (Measurable) Nilai SAKIP diukur melalui penilaian perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi, serta laporan kinerja. Selain itu nilai SAKIP juga diukur melalui pengelolaan anggaran dan sumber daya, serta perbaikan berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat dengan Klasifikasi sebagai berikut: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang A (Achievable) Nilai SAKIP diperoleh melalui hasil evaluasi APIP yang dilakukan oleh Inspektorat Basarnas. R (Relevant) Nilai SAKIP yang optimal dapat meningkatkan birokrasi unit pelaksana teknis yang kapabel. Indikator ini menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai SAKIP, maka semakin meningkatkan kapabilitas dari birokrasi unit

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
							pelaksanaan teknis. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan bahwa UPT memiliki manajemen kinerja yang baik, pengelolaan anggaran yang efisien, serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan baik. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang harus diperbaiki. T (Time-Bound) Penilaian SAKIP dilakukan setiap tahun.

Definisi rumusan pada **Tabel 3.4** di atas sudah sesuai dengan Manual IKU yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pada **Tabel 3.5** di bawah ini adalah Indikator Kinerja dan kegiatan *real* yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maupun Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dengan para Kepala Seksi maupun Kepala Subbag Umum di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan Banda Aceh.

Tabel 3.5 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN
SK.1 Terwujudnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif	1	Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	Koordinasi (3948.AEA)
	2	Waktu tempuh pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana (3948.QHC)
	3	Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana (3948.QHC)
	4	Indeks Kepuasan Masyarakat pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana (3948.QHC)
SK.2 Terwujudnya kesiapsiagaan dalam mendukung pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan	5	Indeks Kesiapsiagaan	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana (3946.RCM)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN
			OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana (3946.RDH) OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL) Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)
SK.3 Terwujudnya Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR	6	Persentase pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (6931.QDC) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (3971.QDD)
SK.4 Meningkatnya kualitas pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	7	Nilai Latihan pencarian dan pertolongan	Koordinasi (3972.AEA)
SK.5 Meningkatnya kompetensi SDM	8	Persentase terpeliharanya kompetensi tenaga SAR	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)
	9	Persentase non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)
SK.6 Meningkatnya Birokrasi Unit Pelaksana Teknis yang kapabel	10	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941.EBA) Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD.952) Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD.955) Layanan Sarana dan Prasarana Internal

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN
			(3944.EBB)
	11	Hasil Survey Layanan Internal	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA) OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL) / (7065.RCL) Layanan Manajemen SDM Internal (3942.EBC)
	12	Nilai Kearsipan	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD)
	13	Nilai SAKIP	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD.953)

3.1.3 Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kegiatan prioritas yang difokuskan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan responsibilitas dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan, yaitu :

Tabel 3.6 Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029

No	Kegiatan Prioritas	Lokasi	Prakiraan Harga (Rp.)
1.	Tahun 2025		
	1. Latihan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan Nasional	KPP Banda Aceh	25.000.000,-
2.	Tahun 2026		
	1. Rapat Koordinasi dan Penyusunan Kontingensi SAR	KPP Banda Aceh	160.000.000,-
	2. Program SAR Goes to School	KPP Banda Aceh, Pos SAR, dan Unit Siaga SAR	31.250.000,-
	3. Latihan Kesiapsiagaan	KPP Banda Aceh	109.368.000,-

	Pencarian dan Pertolongan Nasional		
	4. Latihan SAR Gabungan	KPP Banda Aceh	99.380.000,-
	5. Latihan SAR Beregu di Ketinggian	KPP Banda Aceh	14.447.000,-
	6. Latihan SAR Satuan di Bawah Air	KPP Banda Aceh	69.052.000,-
	7. Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan	KPP Banda Aceh	308.000.000,-
	8. Pengadaan PC	Pos SAR dan Unit Siaga SAR	75.000.000,-
	9. Pengadaan Printer	Pos SAR dan Unit Siaga SAR	30.000.000,-
	10. Pengadaan CCTV Pos Pencarian dan Pertolongan Meulaboh	Pos SAR Meulaboh	35.000.000,-
	11. Pengadaan AC	Pos SAR dan Unit Siaga SAR	90.000.000,-
	12. Pengadaan Meubelair	KPP Banda Aceh Pos SAR Sabang Unit Siaga SAR Bireuen Unit Siaga SAR Takengon	200.000.000,-
	13. Pembangunan Gedung Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen	Unit Siaga SAR Bireuen	1.369.548.000,-
	14. Pembangunan Pagar dan Papan Nama Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen	Unit Siaga SAR Bireuen	447.842.000,-
3.	Tahun 2027		
	1. Pengadaan APD Rescuer Kantor Pencarian dan Pertolongan	KPP Banda Aceh, Pos SAR, dan Unit Siaga SAR	200.000.000,-
	2. Rapat Koordinasi dan Penyusunan Kontingensi SAR	KPP Banda Aceh	160.000.000,-
	3. Program SAR Goes to School	KPP Banda Aceh, Pos SAR, dan Unit Siaga SAR	31.250.000,-
	4. Latihan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan Nasional	KPP Banda Aceh	84.663.000,-
	5. Latihan SAR Gabungan	KPP Banda Aceh	94.648.000,-
	6. Latihan SAR Beregu di Permukaan Air	KPP Banda Aceh	30.516.000,-

	7. Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan	KPP Banda Aceh	47.040.000,-
	8. Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air	KPP Banda Aceh	300.000.000,-
	9. Pengadaan CCTV Pos Pencarian dan Pertolongan Kutacane	Pos SAR Kutacane	35.000.000,-
	10. Pengadaan Perlengkapan Gudang Peralatan	KPP Banda Aceh, Pos SAR, dan Unit Siaga SAR	200.000.000,-
	11. Pembangunan Gudang Peralatan Pos SAR Langsa	Pos SAR Langsa	579.050.000,-
	12. Pembangunan Saluran Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen	Unit Siaga SAR Bireuen	248.412.000,-
4.	Tahun 2028		
	1. Rapat Koordinasi dan Penyusunan Kontingensi SAR	KPP Banda Aceh	160.000.000,-
	2. Program SAR Goes to School	KPP Banda Aceh, Pos SAR, dan Unit Siaga SAR	31.250.000,-
	3. Latihan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan Nasional	KPP Banda Aceh	84.663.000,-
	4. Latihan SAR Gabungan	KPP Banda Aceh	94.648.000,-
	5. Latihan SAR Beregu di Gunung dan Hutan	KPP Banda Aceh	36.336.000,-
	6. Latihan SAR Satuan di Ketinggian	KPP Banda Aceh	18.434.000,-
	7. Pelatihan Teknis Potensi SAR di Medical First Responder	KPP Banda Aceh	290.000.000,-
	8. Pengadaan PC	KPP Banda Aceh	75.000.000,-
	9. Pengadaan Laptop	KPP Banda Aceh	100.000.000,-
	10. Pengadaan Printer	KPP Banda Aceh	30.000.000,-
	11. Pengadaan CCTV Pos Pencarian dan Pertolongan Bireuen	Unit Siaga SAR Bireuen	35.000.000,-
	12. Pengadaan Genset > 50 Kva	Unit Siaga SAR Bireuen/Takengon	350.000.000,-
	13. Pembangunan Gudang Peralatan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen	Unit Siaga SAR Bireuen	579.050.000,-

	14. Pembangunan Rumah Genset Pos Pencarian dan Pertolongan Langsa	Pos SAR Langsa	93.806.000,-
5.	Tahun 2029		
	1. Pembangunan Tower Rappelling Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen	Unit Siaga SAR Bireuen	579.050.000,-
	2. Rapat Koordinasi dan Penyusunan Kontingensi SAR	KPP Banda Aceh	160.000.000,-
	3. Program SAR Goes to School	KPP Banda Aceh, Pos SAR, dan Unit Siaga SAR	31.250.000,-
	4. Latihan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan Nasional	KPP Banda Aceh	84.663.000,-
	5. Latihan SAR Gabungan	KPP Banda Aceh	94.648.000,-
	6. Latihan SAR Beregu di Bawah Air	KPP Banda Aceh	61.027.000,-
	7. Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh	KPP Banda Aceh	69.054.000,-
	8. Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian	KPP Banda Aceh	288.000.000,-
	9. Pengadaan PC	KPP Banda Aceh	75.000.000,-
	10. Pengadaan AC	KPP Banda Aceh	90.000.000,-
	11. Pembangunan Shelter Pos Pencarian dan Pertolongan Kutacane	Pos SAR Kutacane	425.601.000,-

3.2 KERANGKA REGULASI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH

Kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan UPT.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional

Pencarian dan Pertolongan. Adapun kerangka regulasi yang diterbitkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh yang merupakan turunan dari serangkaian Peraturan maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Nomor : SK.KKS-90/PR.02.02/XII/SAR.BNA-2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Nomor : SK.KKS-15/PR.02.02/I/SAR.BNA-2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.
2. Surat Edaran Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Nomor : SE.01/KP.07.09/II/SAR.BNA-2024 tentang Zakat Infaq dan Sedekah di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.
3. Surat Edaran Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Nomor : SE.01/KP.07.09/III/SAR.BNA-2025 tentang Penggunaan Finger Print di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH

3.3.1 Pengembangan Struktur Organisasi

Pengembangan struktur organisasi bisa menjadi langkah penting untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan bisnis, pertumbuhan organisasi, atau perubahan tujuan strategis.

Kebutuhan pengembangan struktur Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029 lebih diarahkan untuk :

1. Peningkatan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan;
2. Peningkatan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan; dan

3. Pengusulan restrukturisasi Unit Kerja Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

3.3.2 Kegiatan Strategis Pengembangan Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan fungsi Pencarian dan Pertolongan dimana sangat diperlukan kecepatan *response time* dan waktu tempuh, maka masih sangat diperlukan penguatan kedudukan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam menyelenggarakan operasi Pencarian dan Pertolongan di Provinsi Aceh, pembentukan Pos Pencarian dan Pertolongan baru sangat diperlukan sehingga menjangkau daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Sejalan dengan program Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, Kementerian PAN dan RB mendorong Basarnas untuk memperluas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tidak hanya di lingkungan Basarnas namun juga hingga ke Kantor Pencarian dan Pertolongan selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Basarnas. Penataan kelembagaan lewat peningkatan Pos Pencarian dan Pertolongan serta pembentukan Pos Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan sejalan dengan proses penyederhanaan birokrasi dimaksud.

Adapun pengusulan peningkatan Pos Pencarian dan Pertolongan yang dimaksud diatas dalam rentang tahun 2025-2029 ke depan adalah pengusulan peningkatan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan.

Dalam rangka memperkuat kinerja organisasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh memerlukan penguatan aspek hukum dan kelembagaan secara berkelanjutan terutama terkait tata kelola pemerintahan yang berkembang. Salah satu arah strategis pengembangan kelembagaan adalah pembentukan unit kerja baru yang lebih spesifik, sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pengembangan organisasi ini mencakup usulan pembentukan Kepala Seksi/Subseksi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Komunikasi SAR, Kepala Seksi/Subseksi Potensi, serta Kepala

Seksi/Subseksi Bina Tenaga di dalam struktur Kantor Pencarian dan Pertolongan. Ketiga seksi ini diharapkan mampu mendukung fungsi utama SAR secara lebih terfokus dan profesional, serta mempercepat respon dalam pelayanan operasi maupun pembinaan sumber daya.

Selain itu, penguatan kelembagaan juga diarahkan pada kejelasan mandat, tupoksi (tugas pokok dan fungsi), serta pengembangan kapasitas aparatur. Keberadaan Kepala Seksi/Subseksi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Komunikasi SAR menjadi sangat penting untuk menjamin kesiapan dan kelayakan alat utama (alut) Pencarian dan Pertolongan, baik dari sisi pemeliharaan preventif maupun responsif. Sementara itu, Kepala Seksi/Subseksi Potensi berperan besar dalam menjaga hubungan dengan potensi Pencarian dan Pertolongan dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dalam pembinaan kerja sama lintas sektor. Di sisi lain, Kepala Seksi/Subseksi Bina Tenaga memiliki peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, dan pemetaan kompetensi. Ketiganya saling melengkapi untuk mewujudkan kelembagaan SAR yang modern, responsif, dan adaptif terhadap tantangan ke depan.

Dalam mewujudkan capaian kecepatan tanggap (*response time*) dan waktu tempuh dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan, mengingat luasnya wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh, maka sangat diperlukan penguatan kedudukan dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan mengusulkan peningkatan status Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan yang ada menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan serta mengusulkan penambahan beberapa Pos Pencarian dan Pertolongan guna menjangkau lokasi kejadian kecelakaan/bencana yang jauh dan akses yang terbatas.

Dalam upaya penguatan kelembagaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh, berikut adalah tabel kebutuhan pembentukan Pos Pencarian dan Pertolongan dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan yang diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh periode Tahun 2025-2029.

Tabel 3.7 Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR Tahun 2025-2029

No.	Penguatan Kelembagaan	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jumlah Pos SAR	6	4	2	-	1	-	-	1
2.	Jumlah Unit Siaga SAR	2	2	-	-	-	-	-	-

A. Peningkatan Pos Pencarian dan Pertolongan Bireuen

Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen adalah unit kerja non struktural di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, yang didirikan berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.4 Tahun 2017 tentang Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Demi mewujudkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu mengutamakan kecepatan respons dan waktu tempuh dalam merespons setiap kecelakaan merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan. Untuk mendukung hal tersebut, peningkatan status Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan Bireuen dianggap sangat diperlukan. Wilayah pesisir timur Provinsi Aceh memiliki cakupan wilayah kerja yang luas dan tingkat risiko kecelakaan yang cukup tinggi. Dengan peningkatan status ini, diharapkan respons terhadap setiap kejadian dapat lebih cepat dan efektif, sehingga pelayanan Pencarian dan Pertolongan di wilayah Provinsi Aceh dapat berjalan optimal.

Salah satu langkah penting adalah meningkatkan status Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan untuk mengatasi tantangan dalam mempercepat waktu respons terhadap kejadian darurat. Dengan peningkatan status ini, pemenuhan biaya operasional serta perawatan sarana dan prasarana dapat lebih terjamin, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan operasi SAR. Respons yang lebih cepat diharapkan dapat meminimalkan jumlah korban dan meningkatkan keselamatan masyarakat di wilayah pesisir timur Aceh.

1. Kondisi Saat Ini

Pada awal pembentukannya, Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen hanya diperkuat oleh 4 (empat) orang personil yang bertugas menangani berbagai kejadian darurat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan operasional, jumlah personil bertambah menjadi 7 (tujuh) orang hingga saat ini. Pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan dukungan penuh terhadap keberadaan unit ini dengan menyediakan gedung pinjam pakai yang berasal dari Pemadam Kebakaran (Damkar) BPBD Bireuen sejak tahun 2016. Selain itu, hasil koordinasi yang baik antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen membuahkan hasil yang signifikan, yaitu hibah tanah seluas 1.000 meter persegi di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen yang beralamat di Gampong Beunytot Kec. Juli Kab. Bireuen berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : 900/015/2023 tanggal 23 Maret 2023. Hibah tanah ini menjadi langkah awal dalam mendukung pengembangan sarana dan prasarana Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen agar dapat beroperasi lebih optimal dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

2. Sarana, Prasarana, dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan

a. Prasarana

Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan pinjam pakai gedung Damkar BPBD Bireuen.

b. Sarana dan Peralatan SAR

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. Truck Personil | : 1 Unit |
| 2. Rescue Car Type II | : 1 Unit |
| 3. Motor Trail | : 1 Unit |
| 4. Rubber Boat | : 2 Unit |
| 5. Alat Selam | : 2 Set |

3. Operasi Pencarian dan Pertolongan

Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan meliputi wilayah Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie Jaya, dan Selat

Malaka. Berdasarkan rekapitulasi kecelakaan sejak Oktober 2016 hingga Agustus 2025 telah dilakukan sebanyak 125 operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen, sebagai berikut :

Tabel 3.8 Rekapitulasi Kecelakaan Berdasarkan Klasifikasi Kecelakaan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen Oktober 2016-Agustus 2025

NO	KLASIFIKASI KECELAKAAN	TAHUN										TOTAL
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Kecelakaan Pesawat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kecelakaan Kapal	3	3	-	3	2	6	-	4	1	5	27
3	Bencana	1	5	3	-	1	-	2	3	1	-	16
4	Kondisi Membahayakan Manusia	2	17	8	11	2	9	5	5	13	10	82
5	Kecelakaan dengan Penanganan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		6	25	11	14	5	15	7	12	15	15	125

Adapun rekapitulasi jumlah korban yang ditangani oleh Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen dari Oktober 2016 hingga Agustus 2025, adalah sebagai berikut :

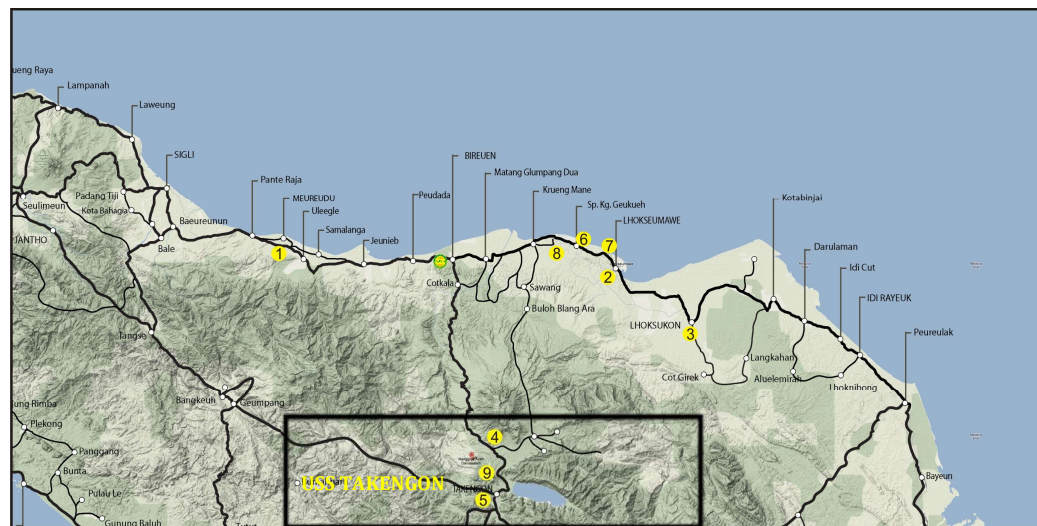
Tabel 3.9 Rekapitulasi Kecelakaan Berdasarkan Kondisi Korban Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen Oktober 2016-Agustus 2025

NO	KONDISI KORBAN	TAHUN										TOTAL
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Selamat	934	8	-	8	1684	7	267	58	533	10	3509
2	Meninggal Dunia	108	14	6	10	2	11	5	6	15	12	189
3	Hilang	-	4	2	2	-	-	-	4	-	5	17
Total		1042	26	8	20	1686	18	272	68	548	27	3715

4. Analisis Lingkungan Strategis

a. Faktor Pendukung

- 1) Mempercepat *response time* di karenakan posisi Kabupaten Bireuen berada ditengah-tengah antara Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Pidie Jaya;
- 2) Terciptanya SDM potensi Pencarian dan Pertolongan yang lebih baik hasil dari binaan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen di 4 (empat) Kabupaten/Kota tersebut;
- 3) Terdapat 2 (dua) Pelabuhan di dekat Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen yaitu Pelabuhan Umum Krueng Guekueh dan Pelabuhan PT. Perta Arun Gas di Kabupaten Aceh Utara; dan
- 4) Terdapat 1 (satu) bandara di wilayah kerja Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen yaitu Bandara Malikussaleh di Kota Lhokseumawe.



Data jarak lokasi penting dan rawan kecelakaan dengan Unit Siaga SAR Bireuen :

1. Unit Siaga SAR Bireuen – Kec. Meureudu (Kab. Pidie Jaya) = 60 KM / 1 Jam
2. Unit Siaga SAR Bireuen – Kota Lhokseumawe = 60 KM / 1 Jam
3. Unit Siaga SAR Bireuen – Lhoksukon (Kab. Aceh Utara) = 90 KM / 1,5 Jam
4. Unit Siaga SAR Bireuen – Pelabuhan Krueng Guekueh = 49 KM / 45 Menit
5. Unit Siaga SAR Bireuen – Pelabuhan PT. Perta Arun Gas = 52 KM / 50 Menit
6. Unit Siaga SAR Bireuen – Bandar Udara Sultan Malikul Saleh = 35 KM / 30 Menit

Gambar 3.1 Peta Jarak Antara Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten/Kota, Pelabuhan, dan Bandara Udara

a. Faktor Ancaman

Tingginya faktor kecelakaan dan bencana di wilayah kerja Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen dengan data sebagai berikut :

- 1) Kabupaten Aceh Utara : Bencana banjir dan kecelakaan kapal di Selat Malaka
- 2) Kota Lhokseumawe : Bencana banjir dan kecelakaan kapal di Selat Malaka
- 3) Kabupaten Bireuen : Bencana banjir dan kecelakaan kapal di Selat Malaka
- 4) Kabupaten Pidie Jaya : Bencana banjir dan kecelakaan kapal di Selat Malaka

5. Kondisi Yang Diharapkan

Berdasarkan analisis di atas terdapat sejumlah justifikasi yang realistis dan mendesak untuk merealisasikan peningkatan status Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen tersebut, antara lain :

- a. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen telah beroperasi sejak tahun 2016, sehingga dari sisi pengalaman dan eksistensi di bidang Pencarian dan Pertolongan, Unit Siaga ini sudah layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan;
- b. Peningkatan status menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan akan mempercepat akses terhadap kecelakaan/bencana yang terjadi di Kabupaten Bireuen serta 3 (tiga) Kabupaten/Kota di sekitarnya;
- c. Wilayah ini memiliki potensi bencana yang tinggi, baik bencana alam seperti banjir dan tanah longsor maupun kecelakaan transportasi di laut dan darat;
- d. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menunjukkan dukungan nyata dengan menghibahkan lahan seluas 1.000 meter persegi di Kecamatan Juli sebagai lokasi operasional Pencarian dan Pertolongan yang lebih memadai;
- e. Letak strategis Kabupaten Bireuen yang berada di tengah jalur utama memudahkan akses dan koordinasi dalam operasi Pencarian dan Pertolongan ke beberapa Kabupaten/Kota di sekitarnya;
- f. Tingginya frekuensi kecelakaan kapal dan insiden lainnya di wilayah ini membutuhkan keberadaan Pos Pencarian dan Pertolongan yang lebih siap dan memiliki sumber daya yang lebih memadai;

- g. Kabupaten Bireuen merupakan daerah yang sedang berkembang pesat dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga peningkatan infrastruktur Pencarian dan Pertolongan menjadi kebutuhan yang mendesak;
- h. Tersedianya tenaga potensi Pencarian dan Pertolongan yang telah dibina dan siap mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah ini menjadi keunggulan tersendiri bagi peningkatan status;
- i. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi serta *stakeholder* terkait telah berjalan dengan sangat baik, sehingga memudahkan sinergi dalam pelaksanaan tugas Pencarian dan Pertolongan;
- j. Permintaan terhadap layanan jasa Pencarian dan Pertolongan di wilayah ini terus meningkat, seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi dan kepadatan transportasi laut serta darat; dan
- k. Peningkatan status Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan juga telah mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Bireuen, termasuk Bupati Bireuen yang secara aktif mendorong penguatan kapasitas Pencarian dan Pertolongan di daerahnya.

Berdasarkan berbagai alasan di atas, peningkatan status Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan Pencarian dan Pertolongan di wilayah pesisir timur Aceh. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, kesiapan personil, serta meningkatnya kebutuhan layanan Pencarian dan Pertolongan, peningkatan status ini akan membawa manfaat besar dalam mempercepat respons terhadap kondisi darurat dan meningkatkan keselamatan masyarakat secara keseluruhan.

B. Peningkatan Pos Pencarian dan Pertolongan Takengon

Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon adalah unit kerja non struktural di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, yang didirikan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan Nomor : SK.KBSN-91/OT.01.05/II/BSN-2020 tentang Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Sejak berdiri tahun 2020, Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon selama ini telah menunjukkan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas Pencarian dan Pertolongan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan sekitarnya. Tugas-tugas tersebut mencakup penanganan kecelakaan lalu lintas, pencarian korban tenggelam di Danau Lut Tawar, evakuasi pendaki gunung yang mengalami kecelakaan di kawasan Leuser, serta respons terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan banjir bandang yang sering melanda wilayah dataran tinggi Gayo.

Pertimbangan peningkatan status ini sangat mendesak, mengingat letak geografis Kabupaten Aceh Tengah yang terpencil dan dikelilingi wilayah rawan bencana. Peningkatan status Pos Pencarian dan Pertolongan Takengon diharapkan dapat memperkuat kapasitas personil, mempercepat waktu respons, serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan yang lebih lengkap dan siap pakai. Lebih dari itu, keberadaan Pos Pencarian dan Pertolongan yang permanen di Takengon akan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan dan sekitar Danau Lut Tawar, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi segala bentuk ancaman keselamatan jiwa manusia di wilayah tengah Provinsi Aceh.

1. Kondisi Saat Ini

Pada awal pembentukannya pada 16 April 2020, Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon hanya diperkuat oleh 4 (empat) personil yang bertugas menangani berbagai kejadian darurat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan operasional, jumlah personil bertambah menjadi 9 (sembilan) orang hingga saat ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menghibahkan bangunan beserta tanah di dua lokasi yang berbeda. Pertama, tanah dengan luas 952 M² dan bangunan yang berlokasi di Desa Toweren Toa Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Kedua, satu unit bangunan dengan luas 186,96 yang berlokasi Desa Alfitrah Kecamatan

Bebesan Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon juga diberikan kendaraan operasional berupa Toyota Hilux dengan status pinjam pakai. Hibah tanah dan bangunan serta kendaraan operasional ini menjadi langkah awal dalam mendukung pengembangan sarana dan prasarana Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon agar dapat beroperasi lebih optimal dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Kemudian diharapkan agar Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon ini dapat ditingkatkan statusnya menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan.

2. Sarana, Prasarana, dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan

a. Prasarana

Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Takengon dengan 2 (dua) tanah dan bangunan hibah, saat ini layanan operasional perkantoran berada di Desa Toweren Toa Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

b. Sarana dan Peralatan SAR

1. Double Cabin (Pinjam Pakai) : 1 Unit
2. Motor Trail KLX : 1 Unit
3. Rubber Boat : 1 Unit
4. Rafting Boat : 1 Unit
5. RIB 12 Meter : 1 Unit
6. Alat Selam : 2 Set

3. Operasi Pencarian dan Pertolongan

Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan meliputi wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan rekapitulasi kecelakaan sejak April 2020 hingga Agustus 2025 telah dilakukan sebanyak 21 operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon, sebagai berikut :

Tabel 3.10 Rekapitulasi Kecelakaan Berdasarkan Klasifikasi Kecelakaan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon April 2020-Agustus 2025

NO	KLASIFIKASI KECELAKAAN	TAHUN						TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Kecelakaan Pesawat	-	-	-	-	-	-	-
2	Kecelakaan Kapal	-	-	1	-	-	-	1
3	Bencana	2	-	-	-	1	1	4
4	Kondisi Membahayakan Manusia	2	3	5	3	-	2	15
5	Kecelakaan dengan Penanganan Khusus	-	1	-	-	-	-	1
Total		4	4	6	3	1	3	21

Adapun rekapitulasi jumlah korban yang ditangani oleh Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon dari April 2020 hingga Agustus 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Rekapitulasi Kecelakaan Berdasarkan Kondisi Korban Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon April 2020-Agustus 2025

NO	KONDISI KORBAN	TAHUN						TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Selamat	190	20	6	-	-	1	217
2	Meninggal Dunia	-	3	4	2	4	6	19
3	Hilang	1	-	1	1	-	1	4
Total		191	23	11	3	4	8	240

4. Analisis Lingkungan Strategis

a. Faktor Pendukung

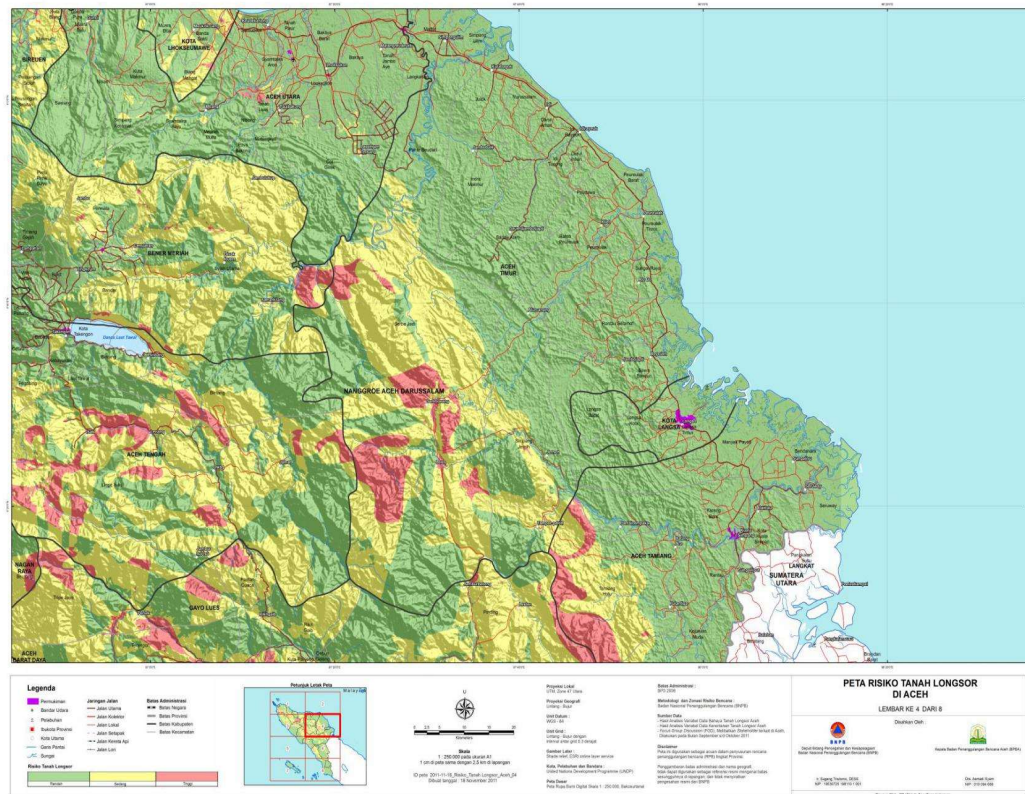
- 1) Mempercepat *response time* di karenakan posisi Takengon berada tengah antara Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Lues;

- 2) Terciptanya SDM potensi Pencarian dan Pertolongan yang lebih baik hasil dari binaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen di 3 Kabupaten tersebut;
- 3) Terdapat 1 (satu) objek wisata unggulan di Provinsi Aceh yaitu Danau Lut Tawar;
- 4) Terdapat 2 (dua) bandara yaitu Bandara Rembele di Kabupaten Aceh Tengah dan Bandara Perintis Patiambang Kabupaten Gayo Lues; dan
- 5) Terdapat 2 (dua) sesar aktif yaitu Patahan Segmen Peusangan (dari Aceh Tengah sampai ke laut bagian utara Bireuen), Patahan Segmen Batee dan Patahan Segmen Tripa.

b. Faktor Ancaman

Tingginya faktor kecelakaan dan bencana di wilayah kerja Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon dengan data sebagai berikut :

- 1) Kabupaten Bener Meriah : Korban tenggelam, korban hilang di hutan dan gunung serta kecelakaan dengan penanganan khusus seperti kendaraan jatuh ke jurang.
- 2) Kabupaten Aceh Tengah : Korban tenggelam, korban hilang di hutan dan gunung, kecelakaan dengan penanganan khusus seperti kendaraan jatuh ke jurang, longsor dan gempa bumi.
- 3) Kabupaten Gayo Lues : Korban tenggelam, korban hilang di hutan dan gunung, kecelakaan dengan penanganan khusus seperti kendaraan jatuh ke jurang, longsor dan gempa bumi.



Gambar 3.2 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor di Takengon dan Sekitarnya

5. Kondisi Yang Diharapkan

Berdasarkan analisis di atas terdapat sejumlah justifikasi yang realistis dan mendesak untuk merealisasikan peningkatan status Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon tersebut, antara lain :

- Mempercepat *response time* apabila terjadi kecelakaan di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Lues;
- Merupakan daerah dengan potensi bencana yang tinggi;
- Berada di daerah strategis untuk akses menuju ke beberapa Kabupaten lainnya;
- Sering terjadi bencana longsor dan korban hilang di hutan maupun pegunungan;
- Daerah baru berkembang dan cepat pertumbuhan perekonomiannya;
- Tersedianya jumlah tenaga potensi Pencarian dan Pertolongan yang telah di bina;
- Koordinasi dan komunikasi dengan instansi/stakeholder sangat baik; dan
- Permintaan akan pelayanan jasa Pencarian dan Pertolongan sangat tinggi.

Berdasarkan berbagai alasan di atas, peningkatan status Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan Pencarian dan Pertolongan di wilayah pesisir tengah Aceh. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, kesiapan personil, serta meningkatnya kebutuhan layanan Pencarian dan Pertolongan, peningkatan status ini akan membawa manfaat besar dalam mempercepat respons terhadap kondisi darurat dan meningkatkan keselamatan masyarakat di daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan kecelakaan/bencana tinggi.

3.3.3 Penguatan Sumber Daya Manusia

Penguatan sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas layanan Pencarian dan Pertolongan yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap tantangan kedaruratan yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan SDM secara strategis dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Rencana kebutuhan SDM difokuskan pada pemenuhan formasi jabatan fungsional teknis dan strategis yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan dinamika operasi Pencarian dan Pertolongan di Provinsi Aceh. Selain itu, penguatan kapasitas ASN juga akan ditempuh melalui skema pelatihan berjenjang, pendidikan teknis SAR, sertifikasi kompetensi, pengembangan kepemimpinan, serta pembinaan mental dan etika profesi.

Pemetaan kebutuhan pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, peta jabatan, standar pelayanan minimal, serta proyeksi pengembangan wilayah kerja. Dalam jangka menengah, dibutuhkan penambahan SDM operasional, tenaga komunikasi dan pemantauan, personil pengelola pelatihan dan potensi Pencarian dan Pertolongan, serta tenaga pendukung manajemen dan kelembagaan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan

birokrasi yang kapabel, agility, dan berorientasi hasil dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi serta keselamatan masyarakat secara luas.

Tabel 3.12 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029

No	Jabatan	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat ini	Kekurangan SDM
Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh				
I	Jabatan Administrator			
1	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan	1	1	0
II	Jabatan Pengawas			
1	Kepala Subbagian Umum	1	1	0
2	Kepala Seksi Operasi dan Siaga	1	1	0
3	Kepala Seksi Sumber Daya	1	1	0
III	Jabatan Pelaksana			
1	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
2	Pengelola Pencarian dan Pertolongan	6	6	0
3	Pengelola Layanan Operasional	0	0	0
4	Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
5	Operator Layanan Operasional	6	7	0
6	Pengelola Layanan Kesehatan	1	1	0
7	Analisis Barang Milik Negara	1	0	1
8	Penata Laporan Keuangan	1	0	1
9	Analisis Keuangan	4	0	4
10	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2	0	2
11	Pengelola Urusan Dalam	1	0	1
12	Pengemudi	10	0	10
13	Analisis Pencarian dan Pertolongan	4	0	4
14	Operator Komunikasi	12	0	12
15	Instruktur Pencarian dan Pertolongan	6	3	3
16	Pengelola Peralatan dan Logistik	2	0	2
17	Pengelolaan Kendaraan	4	0	4
18	Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi	2	0	2
IV	Jabatan Pelaksana Anak Buah Kapal			

No	Jabatan	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat ini	Kekurangan SDM
1	Nakhoda Kapal Kelas II	1	1	0
2	Mualim I Kapal Kelas II	1	1	0
3	Mualim II Kapal Kelas II	1	1	0
4	Markonis Kapal Kelas II	1	0	1
5	Serang Kapal Kelas II	1	0	1
6	Juru Mudi Kapal Kelas II	3	3	0
7	Kelasi Kapal Kelas II	2	2	0
8	Juru Masak Kapal Kelas II	1	0	1
9	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas II	1	1	0
10	Masinis I Kapal Kelas II	1	1	0
11	Masinis II Kapal Kelas II	1	0	1
12	Teknisi Listrik Kapal Kelas II	1	0	1
13	Mandor Mesin Kapal Kelas II	1	0	1
14	Juru Minyak Kapal Kelas II	3	1	2
V	Jabatan Fungsional			
1	Analisis SDM Aparatur			
	Muda	1	0	1
	Pertama	1	0	1
2	Pranata SDM Aparatur			
	Penyelia	1	1	0
	Mahir	1	0	1
	Terampil	1	0	1
3	Arsiparis			
	Muda	1	0	1
	Pertama	1	0	1
	Penyelia	2	0	2
	Mahir	2	1	1
	Terampil	2	0	2
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN			
	Muda	2	1	1
	Pertama	2	0	2
5	Pranata Keuangan APBN			
	Penyelia	1	1	0

No	Jabatan	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat ini	Kekurangan SDM
	Mahir	0	0	0
	Terampil	0	0	0
6	Perencana			
	Muda	1	0	1
	Pertama	1	0	1
7	Pranata Komputer			
	Muda	0	0	0
	Pertama	1	0	1
	Penyelia	1	0	1
	Mahir	1	0	1
	Terampil	1	0	1
8	Asisten Statistisi			
	Penyelia	0	0	0
	Mahir	1	0	1
	Terampil	1	0	1
9	Pranata Hubungan Masyarakat			
	Muda	1	0	1
	Pertama	1	1	0
	Penyelia	1	0	1
	Mahir	2	0	2
	Terampil	2	1	1
10	Perawat			
	Muda	1	0	1
	Pertama	1	1	0
	Penyelia	3	0	3
	Mahir	3	0	3
	Terampil	3	0	3
11	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan			
	Madya	1	0	1
	Muda	6	4	2
	Pertama	6	2	4
12	Pranata Pencarian dan Pertolongan			
	Penyelia	12	0	12

No	Jabatan	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat ini	Kekurangan SDM
	Mahir	36	4	32
	Terampil	48	11	37
	Pemula	48	30	18
Pos Pencarian dan Pertolongan Kutacane				
I	Jabatan Pelaksana			
1	Operator Layanan Operasional	0	0	0
2	Pengelola Peralatan dan Logistik	1	0	1
II	Jabatan Fungsional			
1	Pranata Pencarian dan Pertolongan			
	Penyelia	9	0	9
	Mahir	27	0	27
	Terampil	36	8	28
	Pemula	36	0	36
Pos Pencarian dan Pertolongan Meulaboh				
I	Jabatan Pelaksana			
1	Operator Layanan Operasional	0	0	0
2	Pengelola Peralatan dan Logistik	1	0	1
II	Jabatan Fungsional			
1	Pranata Pencarian dan Pertolongan			
	Penyelia	9	0	9
	Mahir	27	2	25
	Terampil	36	5	31
	Pemula	36	1	35
Pos Pencarian dan Pertolongan Langsa				
I	Jabatan Pelaksana			
1	Operator Layanan Operasional	0	0	0
2	Pengelola Peralatan dan Logistik	1	0	1
II	Jabatan Fungsional			
1	Pranata Pencarian dan Pertolongan			
	Penyelia	9	0	9
	Mahir	27	1	26
	Terampil	36	5	31
	Pemula	36	1	35

No	Jabatan	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat ini	Kekurangan SDM
Pos Pencarian dan Pertolongan Sabang				
I	Jabatan Pelaksana			
1	Operator Layanan Operasional	0	0	0
2	Pengelola Peralatan dan Logistik	1	0	1
II	Jabatan Fungsional			
1	Pranata Pencarian dan Pertolongan			
	Penyelia	9	0	9
	Mahir	27	1	26
	Terampil	36	5	31
	Pemula	36	1	35
Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Bireuen				
I	Jabatan Pelaksana			
1	Operator Layanan Operasional	0	0	0
2	Pengelola Peralatan dan Logistik	1	0	1
II	Jabatan Fungsional			
1	Pranata Pencarian dan Pertolongan			
	Penyelia	9	0	9
	Mahir	27	0	27
	Terampil	36	4	32
	Pemula	36	3	33
Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Takengon				
I	Jabatan Pelaksana			
1	Operator Layanan Operasional	0	0	0
2	Pengelola Peralatan dan Logistik	1	0	1
II	Jabatan Fungsional			
1	Pranata Pencarian dan Pertolongan			
	Penyelia	9	0	9
	Mahir	27	0	27
	Terampil	36	8	28
	Pemula	36	0	36
TOTAL PEGAWAI		932	136	796

Sumber : Peta Jabatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025

Berdasarkan **Tabel 3.12** di atas jumlah tenaga Pranata Pencarian dan Pertolongan yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh sebanyak 89 orang yang merupakan 11.23% dari kebutuhan tenaga *rescuer* yaitu 792 orang. Selain itu jumlah ABK yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh hanya sebanyak 11 orang, sehingga jumlah ABK yang sudah terpenuhi saat ini baru sebesar 57.89% dari kebutuhan ABK yaitu 19 orang, begitupun juga dengan tenaga administrasi baik jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional yang dimiliki sebanyak 36 orang yang merupakan 29.75% dari kebutuhan tenaga administrasi yaitu 121 orang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dengan jumlah pegawai sebanyak 137 orang masih membutuhkan SDM sebanyak 795 orang dari total kebutuhan SDM berjumlah 932 orang. Dari data tersebut, maka pemenuhan SDM sangat mutlak dilakukan baik melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun melalui Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerimaan pegawai melalui jalur prestasi juga merupakan salah satu cara untuk menjaring talenta-talenta terbaik di berbagai bidang guna memenuhi kebutuhan SDM Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat (17) menjelaskan bahwa sasaran (target) didefinisikan sebagai hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 yang menyebutkan 3 (tiga) nomenklatur sasaran, yaitu :

1. Sasaran Strategis (SS) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
2. Sasaran Program (SP) Adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis K/L.
3. Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PAN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN serta Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PAN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, membagi strategi pencapaian hasil kerja menjadi 3 (tiga) kategori yaitu outcome, output, dan layanan. Penyusunan strategi pencapaian hasil kerja dapat dilakukan dengan metode

cascading langsung (*direct cascading*) atau cascading tidak langsung (*non direct cascading*).

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan/atau dampak (*impact*).

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Dalam rangka Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menetapkan sasaran strategis sebagai landasan operasional dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi lembaga yang profesional, modern, responsif, dan andal dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan. Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dari Rencana Strategis Basarnas yang selaras dengan Arah Kebijakan Nasional bidang penanggulangan bencana dan penanganan keadaan darurat.

Sasaran strategis dirumuskan guna menjawab tantangan dinamis lingkungan eksternal dan internal, serta untuk menjamin tercapainya pelayanan Pencarian dan Pertolongan yang efektif, cepat, dan tepat. Setiap sasaran didukung oleh indikator kinerja utama yang terukur, sehingga memungkinkan evaluasi secara berkala terhadap tingkat pencapaian, efektivitas implementasi kebijakan, serta perbaikan berkelanjutan.

Dengan demikian indikator sasaran strategis Basarnas periode Tahun 2025-2029 bukan hanya berperan sebagai tolak ukur keberhasilan, tetapi juga

sebagai instrumen manajerial dalam mengarahkan sumber daya, menyelaraskan program, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi kinerja lembaga. Penyusunan indikator ini mempertimbangkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound*) agar mampu menjadi dasar evaluasi pembangunan kelembagaan dan operasional Basarnas dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
T.1	Terselenggaranya layanan Pencarian dan Pertolongan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional	SK.1	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSS.1	Indeks efektivitas penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan
				IKSS.2	Indeks tingkat pemberdayaan masyarakat akan Pencarian dan Pertolongan
T.2	Terjalinnya koordinasi dengan Instansi Nasional dan Internasional serta terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan keterampilan SAR dalam rangka memaksimalkan potensi SAR	SK.2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan layanan Pencarian dan Pertolongan	IKSS.3	Indeks kepuasan pemangku kepentingan dalam layanan Pencarian dan Pertolongan
T.3	Terciptanya standar dan kualitas kompetensi sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan yang andal dan profesional	SK.3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga dan potensi SAR	IKSS.4	Rasio Pranata Pencarian dan Pertolongan per unit layanan SAR
				IKSS.5	Persentase pemenuhan kompetensi tenaga Pencarian dan Pertolongan
				IKSS.6	Persentase pemenuhan kompetensi potensi Pencarian dan Pertolongan
T.4	Tersedianya sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi dan teknologi informasi SAR sesuai dengan kebutuhan	SK.4	Meningkatnya pemenuhan dan keandalan infrastruktur Pencarian dan Pertolongan	IKSS.7	Persentase tingkat pemenuhan infrastruktur Pencarian dan Pertolongan
				IKSS.8	Persentase tingkat keandalan infrastruktur Pencarian dan

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
					Pertolongan
T.5	Terselenggaranya dukungan manajemen untuk penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan melalui perencanaan organisasi dan sumber daya, pengelolaan keuangan, layanan umum, hukum, hubungan masyarakat, pelatihan, teknologi informasi, serta pengawasan kelembagaan yang akuntabel dan berintegritas	SK.5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	IKSS.9	Nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP

4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis. Indikator ini disusun secara terukur dan relevan, agar mampu menggambarkan efektivitas, efisiensi, dan hasil dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Penggunaan indikator kinerja ini juga berfungsi sebagai dasar dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja Basarnas, guna memastikan bahwa seluruh sumber daya digunakan secara optimal dalam mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029.

Tabel 4.2 Matriks Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
SS. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS. 1 Indeks efektivitas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	SP. 1 Meningkatnya kualitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKP. 1.1 Indeks pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	SK. 1.1.1 Terwujudnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif	IKK. 1.1.1.a Persentase keberhasilan evakuasi korban dalam operasi pencarian dan pertolongan
					IKK. 1.1.1.b Persentase korban selamat dalam operasi pencarian dan pertolongan
					IKK. 1.1.1.c Persentase Keselamatan petugas pencarian dan pertolongan
				SK. 1.1.2 Meningkatnya pemenuhan dukungan teknis operasi pencarian dan pertolongan	IKK. 1.1.2.a Persentase pemenuhan dukungan teknis operasi pencarian dan pertolongan
				SK. 1.1.3 Terukurnya kualitas operasi pencarian dan pertolongan melalui uji pelaksanaan	IKK. 1.1.3.a Nilai uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (Rerata)

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
				operasi pencarian dan pertolongan	
				SK. 1.1.4 Meningkatnya kapasitas teknis operasi pencarian dan pertolongan	IKK. 1.1.4.a Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas teknis operasi pencarian dan pertolongan
				SK. 1.1.5 Meningkatnya tata kelola Direktorat Operasi	IKK. 1.1.5.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Operasi
					IKK. 1.1.5.b Nilai Kearsipan Direktorat Operasi
					IKK. 1.1.5.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Direktorat Operasi
					IKK. 1.1.5.d Persentase rancangan norma/standar/prosedur/kriteria (NSPK) Direktorat Operasi
		SP. 2 Meningkatnya kualitas	IKP. 2.1 Indeks kesiapsiagaan	SK. 2.1.1 Tercapainya kesiapsiagaan	IKK. 2.1.1.a Waktu tanggap (<i>response time</i>)

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
		kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan		pencarian dan pertolongan	pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan
					IKK. 2.1.1.b Kesiapsiagaan sumber daya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi pencarian dan pertolongan
					IKK. 2.1.1.c Indeks Siaga
					IKK. 2.1.1.d Indeks Latihan
				SK. 2.1.2 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kesiapsiagaan	IKK. 2.1.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kesiapsiagaan
					IKK. 2.1.2.b Nilai Kearsipan Direktorat Kesiapsiagaan
					IKK. 2.1.2.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Direktorat Kesiapsiagaan
					IKK. 2.1.2.d Jumlah norma/standar/pro

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					sedur/kriteria (NSPK) Direktorat Kesiapsiagaan yang telah ditetapkan
		SP. 3 Meningkatnya koordinasi potensi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKP 3.1 Persentase operasi SAR yang melibatkan potensi pencarian dan pertolongan	SK. 3.1.1 Terwujudnya keterlibatan potensi pencarian dan Pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKK. 3.1.1.a Persentase pelibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
		SP. 4 Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana serta sistem komunikasi dalam penyelenggara an operasi pencarian dan pertolongan	IKP. 4.1 Persentase dukungan sarana prasarana dalam penyelenggara an operasi pencarian dan pertolongan	SK. 4.1.1 Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana	IKK. 4.1.1.a Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana
					IKK. 4.1.1.b Persentase penerapan materi pembinaan teknis sarana dan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					prasarana
					IKK. 4.1.1.c Jumlah pelaksanaan pengujian sarana
					IKK. 4.1.1.d Persentase pemenuhan dukungan perbekalan
			IKP. 4.2 Persentase dukungan sistem komunikasi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	SK. 4.2.1 Meningkatnya kualitas dukungan sistem komunikasi	IKK. 4.2.1.a Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan
					IKK. 4.2.1.b Persentase nilai <i>false alert</i> berdasarkan hasil pendeteksian LUT MCC
					IKK. 4.2.1.c Jumlah data registrasi dan sertifikasi sinyal marabahaya
	IKSS. 2 Indeks tingkat pemberdayaan masyarakat akan pencarian dan	SP. 5 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam	IKP. 5.1 Indeks tingkat kesadaran masyarakat (<i>public</i>	SK. 5.1.1 Meningkatnya sosialisasi dan edukasi ke masyarakat	IKK. 5.1.1.a Persentase kelompok Masyarakat yang mendapatkan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
	pertolongan	penyelenggaraan pencarian dan pertolongan	<i>awareness</i>) akan pencarian dan pertolongan	akan pencarian dan pertolongan	sosialisasi dan edukasi pencarian dan pertolongan terhadap daerah yang menjadi sasaran
SS. Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan dalam layanan pencarian dan pertolongan	IKSS. Indeks kepuasan pemangku kepentingan	SP. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan publik	IKP. 6.1 Indeks kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan	SK. 6.1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan	IKK. 6.1.1.a Indeks kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan
			IKP. 6.2 Indeks kepuasan masyarakat pada layanan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	SK. 6.2.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	IKK. 6.2.1.a Indeks kepuasan masyarakat pada layanan kesiapsiagaan SAR
			IKP. 6.3 Indeks kepuasan pranata pencarian dan pertolongan pada layanan pembinaan jabatan fungsional pranata	SK. 6.3.1 Meningkatnya layanan pembinaan jabatan fungsional pencarian dan pertolongan	IKK. 6.3.1.a Indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional pencarian dan pertolongan pada K/L/PD

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
			pencarian dan pertolongan di K/L/PD		
					IKK. 6.3.1.b Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pencarian dan Pertolongan secara internal
			IKP. 6.4 Indeks kepuasan masyarakat pada layanan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan	SK. 6.4.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan	IKK. 6.4.1.a Indeks kepuasan masyarakat pada layanan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan
			IKP. 6.5 Indeks kepuasan masyarakat pada layanan pelatihan potensi pencarian dan pertolongan	SK. 6.5.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan pelatihan potensi SAR	IKK. 6.5.1.a Indeks kepuasan masyarakat pada layanan pelatihan potensi SAR
			IKP. 6.6 Indeks kepuasan masyarakat	SK. 6.6.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat	IKK. 6.6.1.a Indeks kepuasan masyarakat pada layanan registrasi

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
			pada layanan registrasi <i>Radio Beacon</i>	pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>beacon</i>)	alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>beacon</i>)
SS. 3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga dan potensi SAR	IKSS. 4 Rasio Pranata pencarian dan pertolongan per unit layanan SAR	SP. 7 Meningkatnya pemenuhan jumlah tenaga pencarian dan pertolongan	IKP. 7.1 Rasio Pranata pencarian dan pertolongan per unit layanan SAR	SK. 7.1.1 Meningkatnya jumlah pranata pencarian dan pertolongan	IKK. 7.1.1.a Persentase pemenuhan kebutuhan pranata pencarian dan pertolongan
	IKSS. 5 Persentase pemenuhan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan	SP. 8 Meningkatnya pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan	IKP. 8.1 Persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan	SK. 8.1.1 Terwujudnya peningkatan pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan	IKK. 8.1.1.a Persentase tenaga pencarian dan pertolongan yang terpelihara kompetensinya
					IKK. 8.1.1.b Persentase petugas pencarian dan pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi
					IKK. 8.1.1.c Persentase pranata pencarian dan pertolongan yang terbina
				SK. 8.1.2 Meningkatnya tata kelola Direktorat Bina	IKK. 8.1.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Tenaga

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
				Tenaga	
					IKK. 8.1.2.b Nilai Kearsipan Direktorat Bina Tenaga
					IKK. 8.1.2.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Direktorat Bina Tenaga
					IKK. 8.1.2.d Jumlah norma/standar/prosedur/kriteria (NSPK) Direktorat Bina Tenaga yang telah ditetapkan
			IKP. 8.2 Persentase tenaga pencarian dan pertolongan yang lulus pelatihan teknis pencarian dan pertolongan	SK. 8.2.1 Meningkatnya kompetensi teknis tenaga pencarian dan pertolongan	IKK. 8.2.1.a Mutu Penyelenggaraan Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
			IKP. 8.3 Persentase pengelolaan pelatihan teknis	SK. 8.3.1 Meningkatnya pengelolaan Pelatihan teknis SDM	IKK. 8.3.1.a Jumlah dokumen rencana pengembangan dan standarisasi

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
			pencarian dan pertolongan	Pencarian dan Pertolongan yang berkualitas	Pusat Pelatihan SDM pencarian dan pertolongan
					IKK. 8.3.1.b Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan teknis pencarian dan pertolongan
	IKSS. 6 Persentase pemenuhan kompetensi potensi pencarian dan pertolongan	SP. 9 Meningkatnya pembinaan potensi pencarian dan pertolongan	IKP 9.1 Persentase pembinaan potensi pencarian dan pertolongan	SK. 9.1.1 Terwujudnya peningkatan pembinaan potensi, sertifikasi dan pengelolaan data potensi pencarian dan pertolongan	IKK. 9.1.1.a Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi
				SK. 9.1.2 Meningkatnya tata kelola Direktorat Bina Potensi	IKK. 9.1.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Potensi
					IKK. 9.1.2.b Nilai Kearsipan Direktorat Bina Potensi
					IKK. 9.1.2.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					pengadaan barang/jasa Direktorat Bina Potensi
					IKK. 9.1.2.d Jumlah norma/standar/prosedur/kriteria (NSPK) Direktorat Bina Potensi yang telah ditetapkan
			IKP. 9.2 Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang lulus pelatihan teknis pencarian dan pertolongan	SK. 9.2.1 Meningkatnya kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	IKK. 9.2.1.a Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan
SS. 4 Meningkatnya pemenuhan dan keandalan infrastruktur Pencarian dan Pertolongan	IKSS. 7 Persentase tingkat pemenuhan infrastruktur Pencarian dan Pertolongan	SP. 10 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan minimum sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	IKP. 10.1 Persentase pemenuhan kebutuhan minimum sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	SK. 10.1.1 Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas	IKK. 10.1.1.a Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan darat
					IKK. Persentase

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					10.1.1.b pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan laut
					IKK. 10.1.1.c Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan udara
					IKK. 10.1.1.d Persentase pemenuhan peralatan pencarian dan pertolongan
					IKK. 10.1.1.e Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan
					IKK. 10.1.1.f Jumlah dokumen evaluasi dan rencana pengembangan sarana dan prasarana
			IKP 10.2 Persentase pemenuhan kebutuhan minimum sistem	SK. 10.2.1 Meningkatnya pemenuhan peralatan sistem komunikasi	IKK. 10.2.1.a Persentase Pemenuhan Peralatan Komunikasi

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
			komunikasi pencarian dan pertolongan	yang berkualitas	
					IKK. 10.2.1.b Jumlah dokumen rencana pengembangan
	IKSS. 8 Persentase tingkat keandalan infrastrukturPencarian dan Pertolongan	SP. 11 Meningkatnya keandalan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	IKP. 11.1 Persentase keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	SK. 11.1.1 Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan	IKK. 11.1.1.a Persentase keandalan sarana pencarian dan pertolongan darat
					IKK. 11.1.1.b Persentase keandalan sarana pencarian dan pertolongan laut
					IKK. 11.1.1.c Persentase keandalan sarana pencarian dan pertolongan udara
					IKK. 11.1.1.d Persentase keandalan peralatan pencarian dan pertolongan
					IKK. 11.1.1.e Persentase keandalan prasarana

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					pencarian dan pertolongan
					IKK. 11.1.1.f Persentase pemutakhiran data inventarisasi sarana dan prasarana
				SK. 11.1.2 Meningkatnya tata kelola Direktorat Sarana dan Prasarana	IKK. 11.1.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Sarana dan Prasarana
					IKK. 11.1.2.b Nilai Kearsipan Direktorat Sarana dan Prasarana
					IKK. 11.1.2.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Direktorat Sarana dan Prasarana
					IKK. 11.1.2.d Jumlah norma/standar/prosedur/kriteria (NSPK) Direktorat Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan
			IKP. Persentase	SK. Meningkatnya	IKK. Persentase

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
			11.2 keandalan perangkat dan peralatan sistem komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	11.2.1 keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan sistem komunikasi	11.2.1.a kualitas pemeliharaan peralatan komunikasi
				SK. 11.2.2 Meningkatnya tata kelola Direktorat Sistem Komunikasi	IKK. 11.2.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Sistem Komunikasi
					IKK. 11.2.2.b Nilai Kearsipan Direktorat Sistem Komunikasi
					IKK. 11.2.2.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Direktorat Sistem Komunikasi
					IKK. 11.2.2.d Jumlah norma/standar/prosedur/kriteria (NSPK) Direktorat

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					Sistem Komunikasi yang telah ditetapkan
		SP. 12 Meningkatnya pemenuhan dan keandalan teknologi informasi pencarian dan pertolongan	IKP. 12.1 Persentase pemenuhan teknologi informasi pencarian dan pertolongan	SK. 12.1.1 Meningkatnya pemenuhan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKK. 12.1.1.a Persentase terpenuhinya kebutuhan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
			IKP. 12.2 Persentase keandalan teknologi informasi pencarian dan pertolongan	SK. 12.2.1 Meningkatnya keandalan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKK. 12.2.1.a Persentase kesiapan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
SS. 5 Meningkatnya tata kelola organisasi	IKSS. 9 Nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP	SP. 13 Meningkatnya penyediaan dan penyebaran data dan informasi kepada semua pihak yang	IKP. 13.1 Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 13.1.1 Terwujudnya penyelenggaraan satu data bidang pencarian dan pertolongan	IKK. 13.1.1.a Persentase penyelenggaraan statistik pada produsen data utama

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
		berkepentingan			
			IKP. 13.2 Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 13.2.1 Meningkatnya kualitas layanan informasi pencarian dan pertolongan	IKK. 13.2.1.a Persentase data dan informasi yang dipublikasikan terhadap jumlah data yang dimiliki
					IKK. 13.2.1.b Persentase Tingkat <i>engagement</i> media sosial
					IKK. 13.2.1.c Persentase <i>event</i> /kegiatan publik yang diselenggarakan atau diikuti
					IKK. 13.2.1.d Nilai JDIH Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
					IKK. 13.2.1.e Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum dan kerjasama
		SP. 14 Meningkatnya profesionalitas ASN Badan	IKP. 14.1 Indeks Sistem Merit Badan Nasional	SK. 14.1.1 Meningkatnya kualitas dan kinerja	IKK. 14.1.1.a Indeks Sistem Merit

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
		Nasional Pencarian dan Pertolongan	Pencarian dan Pertolongan	pegawai	
					IKK. 14.1.1.b Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian
				SK. 14.1.2 Meningkatnya kompetensi Aparatur	IKK. 14.1.2.a Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi aparatur
					IKK. 14.1.2.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi aparatur
				SK. 14.1.3 Meningkatnya tata kelola Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan	IKK. 14.1.3.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
					IKK. 14.1.3.b Nilai Kearsipan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					IKK. 14.1.3.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
					IKK. 14.1.3.d Jumlah norma/standar/prosedur/kriteria (NSPK) Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan yang telah ditetapkan
		SP. 15 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKP. 15.1 Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 15.1.1 Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel	IKK. 15.1.1.a Persentase pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan
					IKK. 15.1.1.b Persentase realisasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor
					IKK. Indeks kepuasan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					15.1.1.c terhadap layanan kesehatan dan layanan umum
					IKK. 15.1.1.d Persentase kepuasan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan
					IKK. 15.1.1.e Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
			IKP. 15.2 Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 15.2.1 Terwujudnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa yang profesional	IKK. 15.2.1.a Persentase penyelesaian proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan
				SK. 15.2.2 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	IKK. 15.2.2.a Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP
					IKK. 15.2.2.b Persentase Penyampaian Laporan Keuangan tepat

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					waktu
					IKK. 15.2.2.c Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNB
					IKK. 15.2.2.d Indeks kepuasan terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan
			IKP. 15.3 Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 15.3.1 Meningkatnya nilai IKPA unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKK. 15.3.1.a Nilai IKPA unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
			IKP. 15.4 Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa Badan Nasional Pencarian dan	SK. 15.4.1 Meningkatnya persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan	IKK. 15.4.1.a Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
			Pertolongan	Pertolongan	
		SP. 16 Meningkatnya efektivitas pemanfaatan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKP. 16.1 Nilai Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 16.1.1 Tercapainya kematangan penyelenggaraan SPBE	IKK. 16.1.1.a Jumlah indikator penilaian SPBE yang nilainya meningkat
					IKK. 16.1.1.b Persentase insiden keamanan siber yang ditangani
				SK. 16.1.2 Terwujudnya pengelolaan layanan data dan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	IKK. 16.1.2.a Persentase penanganan permintaan layanan data dan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional
					IKK. 16.1.2.b Indeks kepuasan terhadap layanan Pusat Data dan Informasi
					IKK. 16.1.2.c Persentase SDM yang mendapatkan pembinaan bidang

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					data dan teknologi informasi
				SK. 16.1.3 Meningkatnya tata kelola Pusat Data dan Informasi	IKK. 16.1.3.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Pusat Data dan Informasi
					IKK. 16.1.3.b Nilai Kearsipan Pusat Data dan Informasi
					IKK. 16.1.3.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pusat Data dan Informasi
		SP. 17 Meningkatnya efektivitas regulasi dan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	IKP. 17.1 Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 17.1.1 Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	IKK. 17.1.1.a Persentase penyelesaian produk hukum yang terprogram dan usulan produk hukum tambahan
					IKK. 17.1.1.b Persentase terfasilitasinya Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Produk Hukum

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					yang berkualitas
				SK. 17.1.2 Terlaksananya pendampingan /advokasi hukum dan perkara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKK. 17.1.2.a Persentase layanan advokasi hukum
					IKK. 17.1.2.b Indeks Kepuasan terhadap layanan advokasi hukum
			IKP. 17.2 Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pencarian dan pertolongan yang ditetapkan		
			IKP. 17.3 Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri	SK. 17.3.1 Terwujudnya layanan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	IKK. 17.3.1.a Persentase kerja sama yang ditandatangani terhadap yang disusun di bidang

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
			dan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan		pencarian dan pertolongan
					IKK. 17.3.1.b Persentase kerja sama yang disosialisasikan terhadap yang direncanakan di bidang pencarian dan pertolongan
					IKK. 17.3.1.c Persentase evaluasi kerja sama terhadap kerja sama yang direncanakan di bidang pencarian dan pertolongan
				SK. 17.3.2 Meningkatnya peran kerja sama dalam fórum internasional	IKK. 17.3.2.a Persentase keterlibatan dalam fórum internasional
		SP. 18 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan	IKP. 18.1 Nilai AKUNTABILITAS KINERJA Badan Nasional Pencarian dan	SK. 18.1.1 Meningkatnya kinerja kelembagaan	IKK. 18.1.1.a Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
		Pertolongan	Pertolongan		Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
					IKK. 18.1.1.b Persentase laporan evaluasi yang diterbitkan
					IKK. 18.1.1.c Nilai atas evaluasi kinerja anggaran
					IKK. 18.1.1.d Persentase Unit Kerja yang hasil evaluasi AKIP memperoleh kategori BB
				SK. 18.1.2 Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan dan Keuangan	IKK. 18.1.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan
					IKK. 18.1.2.b Nilai Kearsipan Biro Perencanaan dan Keuangan
					IKK. 18.1.3.c Persentase Produk Dalam Negeri pada pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa Biro Hukum dan Kerja Sama

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					IKK. 18.1.3.d Jumlah norma/standar/prosedur/kriteria (NSPK) Biro Hukum dan Kerja Sama yang telah ditetapkan
			IKP. 18.2 Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 18.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	IKK. 18.2.1.a Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
			IKP. 18.3 Indeks Kesesuaian Organisasi yang tepat struktur	SK. 18.3.1 Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien	IKK. 18.3.1.a Indeks Kesesuaian Organisasi yang tepat struktur
					IKK. 18.3.1.b Indeks kepuasan layanan SOP
					IKK. 18.3.1.c Indeks Kepuasan Layanan Fasilitas Reformasi Birokrasi
				SK. 18.3.2 Meningkatnya tata kelola Biro Kepegawaian, Organisasi,	IKK. 18.3.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi, dan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
				dan Tata Laksana	Tata Laksana
					IKK. 18.3.2.b Nilai Kearsipan Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
			IKP 18.4 Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 18.4.1 Terwujudnya administrasi dan kearsipan yang handal	IKK. 18.4.1.a Persentase unit kerja berpredikat "Baik" dalam pengawasan kearsipan internal
				SK. 18.4.2 Meningkatnya tata kelola Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	IKK. 18.4.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
					IKK. 18.4.2.b Nilai Kearsipan Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
			IKP. 18.5 Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 18.5.1 Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi pencarian dan pertolongan	IKK. 18.5.1.a Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
				SK. 18.5.2 Meningkatnya tata kelola Biro	IKK. 18.3.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
				Hukum dan Kerja sama	Hukum dan Kerja Sama
					IKK. 18.3.2.b Nilai Kearsipan Biro Hukum dan Kerja Sama
		SP. 19 Meningkatnya kualitas pengawasan internal	IKP. 19.1 Maturitas SPIP	SK. 19.1.1 Meningkatnya kualitas pengawasan internal	IKK. 19.1.1.a Tingkat kapabilitas APIP
					IKK. 19.1.1.b Indeks kepuasan layanan terhadap pengawasan internal
					IKK. 19.1.1.c Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti
					IKK. 19.1.1.d Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko
					IKK. 19.1.1.e Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas
					IKK. 19.1.1.f Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN dan LHKASN
				SK. Meningkatnya	IKK. Nilai Akuntabilitas

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
				19.1.2 tata kelola Inspektorat	19.1.2.a Kinerja Inspektorat
					IKK. Nilai Kearsipan 19.1.2.b Inspektorat

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029 yang disertai dengan target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029

Tujuan		Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Kinerja				
						2025	2026	2027	2028	2029
T.1	Terselenggaranya layanan Pencarian dan Pertolongan dalam mendukung pencapaian sasaran pembanguna nasional	SK.1	Terwujudnya pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan yang efektif	1	Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan	21 Menit	20,75 Menit	20,50 Menit	20,25 Menit	20 Menit
				2	Waktu tempuh pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan	150 Menit	149 Menit	148 Menit	147 Menit	146 Menit
				3	Persentase keberhasilan evakuasi korban Pencarian dan Pertolongan	98,5%	98,6%	98,7%	98,8%	98,9%
				4	Indeks kepuasan masyarakat pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan	85	86	87	88	89
		SK.2	Terwujudnya kesiapsiagaan dalam mendukung pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	5	Indeks Kesiapsiagaan	68	69	70	71	72
T.2	Terjalinnya koordinasi dengan instansi nasional dan internasional serta terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat	SK.3	Terwujudnya pembinaan potensi SAR dan pemasyarakatan SAR	6	Persentase pelaksanaan pembinaan potensi SAR dan pemasyarakatan SAR	100%	100%	100%	100%	100%

	tentang pengetahuan dan keterampilan SAR dalam rangka memaksimalkan potensi SAR									
T.3	Terciptanya standar dan kualitas kompetensi sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan yang andal dan profesional	SK.4	Meningkatnya kualitas pelaksanaan latihan Pencarian dan Pertolongan	7	Nilai latihan Pencarian dan Pertolongan	75	76	77	78	79
		SK.5	Meningkatnya kompetensi SDM	8	Persentase terpeliharanya kompetensi tenaga SAR	80%	81%	82%	83%	84%
				9	Persentase non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi	70%	71%	72%	73%	74%
T.5	Terciptanya standar dan kualitas kompetensi sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan yang andal dan profesional	SK.6	Meningkatnya Birokrasi Unit Pelaksana Teknis yang kapabel	10	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	90	90,25	90,50	90,75	91
				11	Hasil Survey Layanan Internal	80	81	82	83	84
				12	Nilai Kearsipan	80	81	82	83	84
				13	Nilai SAKIP	BB (71,00)	BB (71,50)	BB (72,00)	BB (72,50)	BB (73,00)

4.2 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2025-2029 Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Adapun kedua program yang akan dijalankan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana, mencakup unit kerja Seksi Operasi dan Siaga dan Seksi Sumber Daya, dengan sasaran kegiatan (output) sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR.
 - b. Pembinaan Tenaga SAR.
 - c. Pengelolaan Operasi SAR.
 - d. Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR.
 - e. Pengelolaan Potensi SAR.
 - f. Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR.
 - g. Pengelolaan Diklat.
 - h. Pengelolaan Teknologi Informasi SAR
2. Program Dukungan Manajemen, mencakup unit kerja Sub Bagian Umum, dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :
 - a. Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Pengelolaan Keuangan.
 - b. Penyusunan Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian.
 - c. Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol.
 - d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - e. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.

Dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan pelaksanaan berbagai program prioritas, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh menyusun kerangka pendanaan sebagai dasar perencanaan pembiayaan jangka menengah Tahun 2025-2029. Kerangka ini mencerminkan estimasi kebutuhan

anggaran secara menyeluruh yang mencakup aspek operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta pengadaan dan pengembangan sarana prasarana dan peralatan sebagai penunjang pelaksanaan tugas.

Seluruh kebutuhan pendanaan yang diusulkan dirancang agar selaras dengan arah kebijakan nasional dan rencana pembangunan sektor Pencarian dan Pertolongan, serta didasarkan pada analisis kebutuhan nyata dan skala prioritas. Sumber pendanaan utama direncanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Rupiah Murni (RM).

Adapun total kebutuhan anggaran yang diperlukan selama periode Tahun 2025-2029 diperkirakan sebesar Rp. 157.590.318.000,- (Seratur Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah). Rincian usulan pendanaan tersebut dapat dilihat pada **Tabel 4.4** sebagai berikut :

Tabel 4.4 Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)

No	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Tahun					Jumlah	Total
				2025	2026	2027	2028	2029		
1	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	Pengadaan Sarana Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	-	-	-	19.634
			Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	-	90	290	90	90	560	
			Pengadaan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	-	579	579	
			Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan	3.519	3.669	3.669	3.669	3.669	18.195	
			Pemeliharaan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	60	60	60	60	60	300	
		Pembinaan Tenaga SAR	Pelaksanaan Kompetensi Tenaga SAR yang Dipelihara	501	492	492	492	492	2.469	2.469
		Pengelolaan Operasi SAR	Pelaksanaan Dukungan Operasi SAR	-	160	160	160	160	640	9.129
			Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR	1.405	1.771	1.771	1.771	1.771	8.489	
		Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	Pengadaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR	-	-	-	-	-	-	1.275
			Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR	175	275	275	275	275	1.275	
		Pembinaan Potensi SAR	Pelaksanaan Pemasyarakatan Potensi SAR (<i>SAR Goes to School</i>)	-	31	31	31	31	124	124
			Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan (Penyuluhan Kepramukaan)	-	-	-	-	-	-	

No	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Tahun					Jumlah	Total
				2025	2026	2027	2028	2029		
			Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan (Pemberdayaan Kelompok Masyarakat)	-	-	-	-	-	-	6.265
		Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	Pelaksanaan Latihan SAR Kantor SAR	25	208	179	179	179	770	
			Pelaksanaan Latihan SAR Beregu	-	14	30	36	61	141	
			Pelaksanaan Latihan SAR Satuan	-	69	47	18	69	203	
			Pelaksanaan Siaga SAR Kantor SAR	195	958	1.249	1.042	1.087	4.531	
			Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Lebaran	84	134	134	134	134	620	
		Pengelolaan Diklat SAR	Pelaksanaan Pelatihan Dasar Potensi SAR	-	-	-	-	-	-	1.186
			Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR	-	308	300	290	288	1.186	
		Pengelolaan Teknologi Informasi SAR	Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi	-	52	52	52	52	208	208
2	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan	Gaji dan Tunjangan	14.815	15.556	16.334	17.150	18.008	81.863	83.735
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	111	174	174	174	174	807	
			Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	40	85	85	85	85	380	
			Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	35	65	65	65	65	295	
			Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	42	87	87	87	87	390	
		Penyusunan Organisasi Tata	Pengelolaan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Tahun					Jumlah	Total
				2025	2026	2027	2028	2029		
		Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	
		Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Penyelenggaraan Kehumasan	20	50	60	60	70	260	28.309
			Pelaksanaan Keprotokoleran	30	200	200	200	200	830	
			Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	135	271	294	316	339	1.355	
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.904	5.098	5.253	5.272	5.287	25.814	
			Pengelolaan Persuratan/Kearsipan dan Dokumen Lainnya	10	10	10	10	10	50	
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	5.161
			Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	105	-	205	75	385	
			Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	-	325	235	385	90	1.035	
			Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	-	1.817	827	672	425	3.741	
			Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	
		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi	52	-	-	-	-	52	52
TOTAL ALOKASI PENDANAAN				26.165	32.142	32.370	32.989	33.921	157.590	157.590

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari proses perencanaan strategis yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan efektif dan efisien. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Renstra ini telah merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Dengan visi “**Mewujudkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh yang Profesional, Sinergi, dan Militan Dalam Pelayanan Pencarian dan Pertolongan**” menjadi landasan bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh dalam periode Tahun 2025-2029. Untuk mencapai visi ini, telah ditetapkan 3 (tiga) misi yang diselaraskan dengan misi Basarnas, yaitu :

1. Menyelenggarakan kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan guna memonitor, mengawasi, mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.
2. Menyelenggarakan operasi Pencarian dan Pertolongan yang efektif dan efisien melalui tindak awal yang maksimal serta pengerahan potensi Pencarian dan Pertolongan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, fasilitas Pencarian dan Pertolongan yang memadai dan prosedur kerja yang mantap.
3. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan berperan aktif dalam membimbing, melatih, serta bekerja sama dengan potensi Pencarian dan Pertolongan guna memiliki kemampuan yang memadai dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pencapaian sasaran strategis hingga 5 (lima) tahun ke depan akan di ukur melalui Indikator Kinerja yang terukur dan target yang jelas. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat di wilayah kerja Provinsi Aceh. Pengukuran kinerja secara berkala akan dilakukan untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang optimal.

Pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap proses pelaksanaan Renstra ini dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang menjelaskan bahwa evaluasi kinerja dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan cara periodik dan tahunan.

- a. Pengukuran Kinerja Periodik Organisasi

Pengukuran kinerja periodik organisasi didasarkan pada capaian rencana aksi (*milestone*) dan/atau capaian target periodik (*trajectory target*), dengan cara membandingkan realiasi dengan target masing-masing aktivitas dalam POK dan dilengkapi dengan bukti dukung. Pengukuran ini dilaksanakan setiap tanggal 1 s.d 10 setelah triwulan berakhir.

- b. Pengukuran Kinerja Tahunan Organisasi

Pengukuran kinerja tahunan organisasi membandingkan realiasi dengan target masing-masing indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut menjadi dasar penetapan predikat kinerja organisasi. Pengukuran kinerja tahunan organisasi dilaksanakan setiap tanggal 1 s.d 10 setelah tahun anggaran berakhir.

2. Penetapan Predikat Kinerja Organisasi

Hasil pengukuran kinerja menjadi dasar penetapan predikat kinerja periodik maupun tahunan organisasi yang dinyatakan dalam predikat Istimewa, Baik, Butuh Perbaikan (Cukup), Kurang, dan Sangat Kurang.

3. Penetapan Pola Distribusi Predikat Kinerja Pegawai

Berdasarkan hasil penetapan Predikat Kinerja Organisasi, Pimpinan Unit Kerja menetapkan sebaran Predikat Kinerja Pegawai berdasarkan jumlah pegawai di unit kerjanya.

4. Penetapan Predikat Kinerja Pegawai

Dalam penetapan predikat kinerja pegawai berdasarkan pola distribusi predikat dilakukan pengukuran Indikator Kinerja Individu dengan cara membandingkan realisasi dengan target masing-masing indikator kinerja yang telah disepakati dengan Pejabat Penilai Kinerja serta perilaku kerja sesuai dengan ekspektasi pimpinan yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) beserta bukti dukung.

Pengendalian dan evaluasi kinerja ini dilakukan untuk memastikan capaian kinerja telah sesuai dengan target yang diharapkan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra. Pengendalian dan evaluasi kinerja ini juga dilakukan sebagai salah satu *early warning system* terhadap capaian kinerja, dimana melalui pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara periodik dan tahunan diharapkan *progress* capaian kinerja terpantau dengan baik, sehingga memungkinkan dilakukannya berbagai rekomendasi berupa tindakan akselerasi yang dibutuhkan jika rencana aksi belum terwujud atau mengalami kendala, hal ini juga sebagai pengendalian dan evaluasi bagi pimpinan dan atasan langsung untuk memastikan capaian kinerja yang diraih masih *on the track* dan sesuai dengan rencana yang diharapkan.

Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama dari seluruh jajaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh serta dukungan dari semua pihak, diharapkan Renstra ini dapat diimplementasikan secara optimal, yang akan membawa dampak positif bagi keselamatan masyarakat dan meningkatkan

citra Basarnas sebagai lembaga yang terdepan dalam pelayanan Pencarian dan Pertolongan.



LAMPIRAN I

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH TAHUN 2025-2029

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh								32,546	30,619	30,149	30,508	30,895	
	SK.1 Terwujudnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif												Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh
	IKSK.1 Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan		21 Menit	20,75 Menit	20,50 Menit	20,25 Menit	20 Menit	160	160	160	160	160	
	IKSK.2 Waktu tempuh pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan		150 Menit	149 Menit	148 Menit	147 Menit	146 Menit	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771	
	IKSK.3 Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan		98,5%	98,6%	98,7%	98,8%	98,9%	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771	
	IKSK.4 Indeks Kepuasan Masyarakat pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan		85	86	87	88	89	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771	
	SK.2 Terwujudnya kesiapsiagaan dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan												Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh
	IKSK.5 Indeks Kesiapsiagaan		68	69	70	71	72	4,277	4,277	4,277	4,277	4,277	
	SK.3 Terwujudnya Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR												Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh
	IKSK.6 Persentase pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR		100%	100%	100%	100%	100%	288	308	300	290	288	
	SK.4 Meningkatnya kualitas pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan												Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh
	IKSK.7 Nilai Latihan pencarian dan pertolongan		75	76	77	78	79	269	262	256	234	309	
	SK.5 Meningkatnya kompetensi SDM												Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh
	IKSK.8 Persentase terpeliharanya kompetensi tenaga SAR		80%	81%	82%	83%	84%	492	492	492	492	492	
	IKSK.9 Persentase non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi		70%	71%	72%	73%	74%	492	492	492	492	492	
	SK.6 Meningkatnya Birokrasi Unit Pelaksana Teknis yang kapabel												Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh
	IKSK.10 Nilai Kinerja Anggaran (NKA)		90	90,25	90,50	90,75	91	19,576	17,479	16,636	17,186	16,873	
	IKSK.11 Hasil Survey Layanan Internal		80	81	82	83	84	5,605	5,672	5,859	5,900	5,949	

	IKSK.12 Nilai Kearsipan		80	81	82	83	84	10	10	10	10	10	
	IKSK.13 Nilai SAKIP		BB (71,00)	BB (71,50)	BB (72,00)	BB (72,50)	BB (73,00)	65	65	65	65	65	



Banda Aceh, 07 Agustus 2025
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Banda Aceh,

Ibnu Harris Al Hussain, S.Si., M.Si.
Pembina (IV/a)



LAMPIRAN II

**MATRIKS PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN
LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN
PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH
TAHUN 2025-2029**

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas
Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Tahun 2025-2029**

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
02.Terwujudnya kesiapsiagaan dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan		75	75	75	75	75	4,004	4,004	4,004	4,004	4,004						4,004	4,004	4,004	4,004	4,004
01.Sarana bidang pencarian, pertolongan dan penanganan bencana		69	69	69	69	69	3,669	3,669	3,669	3,669	3,669						3,669	3,669	3,669	3,669	3,669
001.Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional)	Indikator 05. Indeks Kesiapsiagaan	69	69	69	69	69	3,669	3,669	3,669	3,669	3,669						3,669	3,669	3,669	3,669	3,669
02.Prasarana bidang pencarian, pertolongan dan penanganan bencana		4	4	4	4	4	60	60	60	60	60						60	60	60	60	60
001.Pemeliharaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional)	Indikator 05. Indeks Kesiapsiagaan	4	4	4	4	4	60	60	60	60	60						60	60	60	60	60
03.Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi		2	2	2	2	2	275	275	275	275	275						275	275	275	275	275
001.Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)	Indikator 05. Indeks Kesiapsiagaan	2	2	2	2	2	275	275	275	275	275						275	275	275	275	275
01.Terwujudnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif		1	1	1	1	1	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771						1,771	1,771	1,771	1,771	1,771
02.Operasi bidang pencarian, pertolongan dan penanganan bencana		1	1	1	1	1	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771						1,771	1,771	1,771	1,771	1,771
001.Pelaksanaan Operasi SAR (Prioritas Nasional)	Indikator 02. Waktu tempuh pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan																				
	Indikator 03. Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan	1	1	1	1	1	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771						1,771	1,771	1,771	1,771	1,771
	Indikator 04. Indeks Kepuasan Masyarakat pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan																				
03.Terwujudnya pembinaan potensi SAR dan pemasyarakatan SAR		50	50	50	50	50	288	308	300	290	288						288	308	300	290	288
001.Fasilitasi dan pembinaan masyarakat		50	50	50	50	50	288	308	300	290	288						288	308	300	290	288
U04.Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	Indikator 06. Persentase pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR	50	-	-	-	50	288	-	-	-	288						288	-	-	-	288
U07.Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	Indikator 06. Persentase pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR	-	50	-	-	-	-	308	-	-	-						-	308	-	-	-

U01.Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	Indikator 06. Persentase pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR	-	-	50	-	-	-	-	300	-	-						-	-	300	-	-
U10.Pelatihan Teknis Potensi SAR di Medical First Responder untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	Indikator 06. Persentase pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR	-	-	-	50	-	-	-	-	290	-						-	-	-	290	-
06.Meningkatnya birokrasi unit pelaksana teknis yang kapabel		1	1	1	1	1	52	52	52	52	52						52	52	52	52	52
005.Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi		1	1	1	1	1	52	52	52	52	52						52	52	52	52	52
001.Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)	Indikator 11. Hasil Survey Layanan Internal	1	1	1	1	1	52	52	52	52	52						52	52	52	52	52



Banda Aceh, 07 Agustus 2025
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Banda Aceh,
Ibnu Harris Al Hussain, S.Si., M.Si.
Pembina (I/V/a)